

Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia mengkaji tinjauan perspektif sejarah melalui pendekatan periodisasi pemerintahan kepala negara mengeluarkan kebijakan luar negeri. Politik Luar Negeri Indonesia dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kebijakan luar negeri merupakan aksi, strategi, dan keputusan yang ditujukan kepada aktor-aktor di luar batas sistem politik domestik, menyangkut berbagai macam isu, mulai dari keamanan, ekonomi, politik, lingkungan, bantuan luar negeri, HAM dsb.

Presiden sebagai aktor kebijakan luar negeri akan menafsirkan kepentingan nasional yang diperjuangkan sesuai dengan kurun waktu tertentu menyangkut kelangsungan hidup bangsa. Periode Presiden Soekarno kepentingan nasional Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Pada periode Presiden Soeharto lebih menekankan pada kepentingan nasional ekonomi agar Indonesia menjadi negara kuat.

Periode Presiden Habibie lebih menekankan pada pemulihan ekonomi akibat krisis moneter agar Indonesia tetap dipercaya dunia internasional. Sedangkan pada periode Presiden Gus Dur lebih mengutamakan menjalin hubungan luar negeri pada semua negara dengan sering melakukan kunjungan luar negeri. Periode Megawati lebih fokus terhadap pemulihan kekuatan ekonomi domestik.

Sedangkan dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak pada menjalin hubungan baik dengan semua negara dan stabilitas politik nasional. Pada periode Jokowi dengan program Nawacita dan prinsip Trisakti lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk menyatukan lautan dan daratan dalam kerangka NKRI. Prediksi Politik luar negeri Indonesia dibayangi kekuatan Amerika dan China untuk memperjuangkan kepentingan nasional, dan kekuatan nasional Indonesia sebagai penentu posisi tawar di dunia.

ISBN 978-623-7376-39-9



9 786237 376194

Lembaga Penerbitan UNAS

PENGANTAR  
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

YUMETRI ABIDIN

YUMETRI ABIDIN

# PENGANTAR POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA



Lembaga Penerbitan UNAS

Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia mengkaji tinjauan perspektif sejarah melalui pendekatan periodisasi pemerintahan kepala negara mengeluarkan kebijakan luar negeri. Politik Luar Negeri Indonesia dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kebijakan luar negeri merupakan aksi, strategi, dan keputusan yang ditujukan kepada aktor-aktor di luar batas sistem politik domestik, menyangkut berbagai macam isu, mulai dari keamanan, ekonomi, politik, lingkungan, bantuan luar negeri, HAM dsb.

Presiden sebagai aktor kebijakan luar negeri akan menafsirkan kepentingan nasional yang diperjuangkan sesuai dengan kurun waktu tertentu menyangkut kelangsungan hidup bangsa. Periode Presiden Soekarno kepentingan nasional Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Pada periode Presiden Soeharto lebih menekankan pada kepentingan nasional ekonomi agar Indonesia menjadi negara kuat.

Periode Presiden Habibie lebih menekankan pada pemulihan ekonomi akibat krisis moneter agar Indonesia tetap dipercaya dunia internasional. Sedangkan pada periode Presiden Gus Dur lebih mengutamakan menjalin hubungan luar negeri pada semua negara dengan sering melakukan kunjungan luar negeri. Periode Megawati lebih fokus terhadap pemulihan kekuatan ekonomi domestik.

Sedangkan dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak pada menjalin hubungan baik dengan semua negara dan stabilitas politik nasional. Pada periode Jokowi dengan program Nawacita dan prinsip Trisakti lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk menyatukan lautan dan daratan dalam kerangka NKRI. Prediksi Politik luar negeri Indonesia dibayangi kekuatan Amerika dan China untuk memperjuangkan kepentingan nasional, dan kekuatan nasional Indonesia sebagai penentu posisi tawar di dunia.

ISBN 978-623-7376-39-9



9 786237 376194

Lembaga Penerbitan UNAS

PENGANTAR  
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

YUMETRI ABIDIN

YUMETRI ABIDIN

# PENGANTAR POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA



Lembaga Penerbitan UNAS

**YUMETRI ABIDIN**

**PENGANTAR  
POLITIK LUAR NEGERI  
INDONESIA**

**LEMBAGA PENERBITAN UNAS**

## **PENGANTAR POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA**

Penulis : YUMETRI ABIDIN

Editor : Zikri Neni Iska

Ilustrator : Syauqi, Yuzi Filzi

Diterbitkan : UNAS PRESS- Universitas Nasional, Jakarta.

Cetakan Pertama.

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abidin, Yumetri

Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia,

Editor: Neni Iska, Zikri .

Cet. 1 – Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS, 2019

Vi + 285 hlm; 150 X 230 mm

ISBN : 978-623-7376-19-4

I. Buku

II. Judul

III. Zikri Neni Iska

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan pada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah, sehingga dapat diterbitkan Buku Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan negara, khususnya bagi diri penulis. Amin.

Kajian Pengantar Politik luar negeri Indonesia dimulai dari pengertian politik luar negeri dan dilanjutkan dengan pendekatan teori-teori politik luar negeri. Prinsip dasar Politik Luar Negeri Indonesia sebagai acuan dalam kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini Presiden sebagai kepala negara memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional yang dimulai dari zaman kemerdekaan hingga sekarang. Untuk mengkaji lebih dalam buku ini akan membahas kebijakan yang diambil dari periodisasi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah.

Dimulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Masing-masing Presiden mempunyai ciri khas dalam mengambil kebijakan luar negeri Indonesia sesuai dengan sosok kepribadian dan kepentingan nasional Indonesia pada kurun waktu itu.

Kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh karakter dari kepala negara pada saat itu, yaitu presiden. Dalam hal ini melihat profil dari masing-masing Presiden mulai dari kelahiran, keluarga, pendidikan, pekerjaan, karier politik sampai dengan kebijakan domestik yang telah diambil. Kebijakan domestik ini sangat mempengaruhi atas kebijakan luar negeri yang akan diambil. Dalam kata lain kondisi dalam



negeri sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh Presiden pada kurun waktu tertentu.

Dari pendekatan perspektif sejarah akan menjadi study komperatif tentang pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Hal ini akan menjadi dasar analisis tentang prospek politik luar negeri Indonesia ke depan.

Demikianlah buku ini disusun sebagai bahan referensi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan hubungan internasional pada mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyusun buku ini sampai dapat diterbitkan. Penulis menyadari bahwa ada kekurangan dalam penyusunan buku ini. Penulis menerima kritik dan saran agar buku ini dapat disempurnakan.

Jakarta, 25 Nopember 2019

Wasalam,

Penulis.

Yumetri Abidin

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

|                 |                                                                                |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB I</b>    | <b>: PENDAHULUAN</b>                                                           | <b>1</b>   |
| <b>BAB II</b>   | <b>: Prinsip Dasar Politik Luar Negeri Indonesia.</b>                          | <b>23</b>  |
| <b>BAB III</b>  | <b>: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Presiden Soekarno.</b>                 | <b>35</b>  |
| <b>BAB IV</b>   | <b>: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Presiden Soeharto.</b>                 | <b>91</b>  |
| <b>BAB V</b>    | <b>: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Presiden BJ. Habibie.</b>              | <b>118</b> |
| <b>BAB VI</b>   | <b>: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Presiden Abdurrahman Wahid.</b>        | <b>142</b> |
| <b>BAB VII</b>  | <b>: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Presiden Megawati.</b>                 | <b>179</b> |
| <b>BAB VIII</b> | <b>: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</b> | <b>200</b> |

|                |                                                               |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| BAB IX         | : Politik Luar Negeri Indonesia Masa<br>Presiden Joko Widodo. | 234 |
| DAFTAR PUSTAKA |                                                               | 271 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pengertian Politik Luar Negeri**

Pengertian politik luar negeri secara umum adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Hal ini merupakan seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara atau sistem tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintahan lainnya.

Politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara pada dasarnya merupakan suatu komitmen berupa strategi dasar dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri juga menjadi cerminan dari keinginan dan aspirasi seluruh rakyat suatu negara yang harus diperjuangkan pemerintahnya di luar negeri.

Definisi lain politik luar negeri (foreign policy) yaitu merupakan strategi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional negara tersebut di dalam kancah dunia internasional. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kebijakan dan strategi politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional masing masing negara.<sup>1</sup>

Kebijakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Hal ini dikarenakan bentuk strategi politik luar negeri merupakan

---

<sup>1</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hal 48

cerminan dari aspirasi seluruh rakyat sebuah negara yang harus diperjuangkan pemerintah di hadapan dunia internasional.

Politik luar negeri mempunyai definisi yang berbeda-beda dari para ahli. Namun, dalam masyarakat secara umum, politik luar negeri adalah sebuah hubungan atau kerjasama antar negara dalam lingkup internasional atau dengan negara tetangga. Definisi politik luar negeri menurut para ahli, yaitu :

- **Menurut J.R Childs**

J.R Childs mendefinisikan politik luar negeri secara singkat, yaitu sebagai pokok-pokok yang menjadi dasar hubungan luar negeri suatu negara. Hubungan tersebut dapat bersifat regional; dengan negara tetangga atau dengan negara yang berada dalam satu wilayah, dan hubungan internasional ; negara-negara seluruh dunia dan organisasi-organisasi yang ada.

- **Menurut Riza Sihbudi**

Menurut Riza Sihbudi, seorang pakar ilmu politik dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), politik luar negeri adalah kelanjutan atau perpanjangan tangan dari politik dalam negeri suatu negara. Politik luar negeri adalah sebuah kebijakan politik yang berhubungan dengan tujuan pembangunan dalam suatu negara.

Ada juga beberapa ahli yang mendefinisikan politik luar negeri berdasarkan teori hubungan internasional. Politik luar negeri menurut teori ini adalah sebuah dasar pemahaman tentang ideologi-ideologi negara di dunia dan hubungan kerjasama dengan negara-negara tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional.

- **Goldstein**

Menurut Goldstein, politik luar negeri mencakup pada kebijakan atau strategi yang diterapkan pemerintah suatu negara yang menjadi pedoman hubungannya dengan negara lain di dunia internasional.

- **Plano dan Olton**

Menurut Plano dan Olton, politik luar negeri adalah serangkaian kebijakan, strategi, dan rencana tindakan yang akan dibuat oleh para petinggi negara sebagai pembuat keputusan dan kebijakan. Politik luar negeri ini nantinya akan menentukan sikap bagaimana jika menghadapi negara lain dan atau unit politik secara internasional.

- **Hudson :**

Menurut definisi Hudson yang menyatakan bahwa pengertian politik luar negeri adalah sub-disiplin dari hubungan internasional tentang politik luar negeri untuk menjadi panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat dan bermusuhan dengan negara tersebut.

- **Crabb Jr. dalam Couloumbis & Wolfe.**

Politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi. Dua sisi ini saling terkait yang alatnya adalah kekuatan nasional dan kepentingan nasional pada kurun waktu tertentu yang dirumuskan oleh elite politik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Couloumbis, Theodore A. & John H. Wolfe, 1985. *Introduction to International Relations*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Hal 234.

- **Perwita & Yani.**

Politik luar negeri adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri.<sup>3</sup>

Dari semua pengertian tentang politik luar negeri akhirnya kita dapat menyimpulkan tujuan dilakukan Politik Luar Negeri. Secara singkat bisa kita katakan bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri tersebut menggambarkan tentang masa depan suatu negara yang diawali dari penetapan kebijakan dan keputusan yang didasarkan kepada kepentingan nasional.

Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan, sikap, dan langkah – langkah yang dilakukan oleh suatu Negara dalam melakukan hubungan luar negerinya dengan Negara lain, baik dengan organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan Negara yang melakukan politik luar negeri tersebut. Politik luar negeri dapat menjadi pedoman bagi sebuah Negara dalam menjalankan tindakan yang akan dilakukannya jika berhubungan dengan Negara lain, agar tujuan nasional negaranya dapat tercapai.

Formulasi politik luar negeri dapat berarti komponen komponen yang diperlukan untuk melahirkan politik luar negeri, dalam formulasi dan rumusan. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa formulasi politik luar negeri adalah hal hal yang diperlukan sehingga terwujud sebuah politik luar negeri untuk tujuan nasional. Formulasi politik luar negeri antara lain penetapan tujuan yang ingin dicapai, kemampuan negara, elit

---

<sup>3</sup> Op.cit. Anak Agung. hal 49.



elit politik, kondisi sebuah negara, hubungan dengan negara lain, serangkaian sikap yang akan dilakukan dan lainnya.

Proses politik luar negeri merupakan serangkaian runtutan peristiwa yang akan dilaksanakan sebuah negara sehingga terwujudnya politik luar negerinya yang merupakan sikap yang akan dilaksanakan dengan berhubungan dengan dunia internasional untuk mencapai tujuan nasional. Proses politik luar negeri dapat meliputi, pengumpulan atau perumusan tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan politik luar negeri, identifikasi kemampuan dan situasi kondisi dunia internasional dan nasional, pemutusan sebuah kebijakan, pelaksanaan rumusan kebijakan dalam politik luar negeri dan evaluasi.

Politik luar negeri merupakan serangkaian sikap untuk melakukan hubungan dengan luar negeri dalam rangka pencapaian tujuan nasional, formulasi politik luar negeri adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk melaksanakan politik luar negeri seperti pembuatan kebijakan perhubungan dengan Negara elit, pemikiran-pemikiran oleh elite politik untuk membuat sebuah kebijakan dalam politik luar negeri. Sedangkan proses politik luar negeri adalah serangkaian kegiatan peristiwa yang dilewati dalam melakukan politik luar negeri, terutama dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri dengan menggunakan formulasi pada politik luar negeri. Jadi politik luar negeri merupakan apa yang akan dilakukan, proses politik luar negeri adalah bagaimana melakukannya dan formulasi politik luar negeri berarti apa yang dibutuhkan untuk melakukannya.

## **B. Pendekatan konsep Politik Luar Negeri.**

Beberapa pendekatan konseptual dalam menganalisis politik luar negeri beserta tokoh-tokoh pemikirnya, antara lain:

## **1. Pendekatan pemikiran strategis suatu Negara.**

Pendekatan ini dapat juga dikatakan dengan pendekatan adaptif, salah satu tokoh pemikirnya adalah James N. Rosenau. Model adaptif politik luar negeri merupakan teoritisasi pendekatan yang mengatakan lingkungan akan menimbulkan akibat akibat khusus, terlepas dari tindakan apa yang dilakukan oleh negara tersebut, model ini akan memisahkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah negara dengan posisi geopolitiknya, keadaan geografis dan sebagainya. Menurut Rosenau politik luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya.

Kondisi sebuah negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda. Contohnya Indonesia yang berada diantara dua benua yang tentunya posisinya strategis pasti harus beradaptasi dengan lingkungan seperti ini, sehingga akan mempunyai politik luar negeri yang berbeda dengan Amerika misalnya. Sebuah negara dalam melakukan politik luar negerinya merupakan hasil adaptasi dari lingkungannya. Dan bagaimana mengembangkan lingkungan yang strategis bagi sebuah negara sehingga ia dapat mempengaruhi pada politik luar negerinya. keadaan geografis, lokasi, luas wilayah akan ikut mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara.

## **2. Pendekatan konsep tingkat analisis ( *Levels of analysis* )**

Salah satu tokoh yang menggunakan pendekatan level of analysis adalah Bary Buzan, menurut Bary Buzan, pendekatan analisis berfungsi sebagai tahapan dalam melaksanakan hubungan luar negeri dalam memilahnya pada tatanan internasional, dalam menggunakan level analisis, Buzan membagi tingkatan analisis menjadi level internasional,

level regional, level negara, level sub Negara dan level individu. Sehingga dalam menganalisis politik luar negeri tidak cukup hanya memperhatikan kondisi nasionalnya saja ,tetapi juga sampai pada tahap internasional dan juga perlu menganalisis level pada tingkat individu sendiri.<sup>4</sup>

### **3. Pendekatan “ rings of power “ atau lingkaran kekuasaan.**

Analisis dengan pendekatan ini menganggap bahwa sebuah Negara dalam melakukan politik luar negerinya dengan Negara lain akan melakukan suatu perjuangan dengan Negara lain, agar kepentingan negaranya dapat tercapai. Pendekatan model ini berasumsi bahwa politik luar negeri akan dilakukan oleh Negara Negara dalam dunia internasional yang merupakan sebuah lingkaran kekuasaan antara satu Negara dengan Negara lainnya.

Sebuah Negara berhubungan dengan Negara lain merupakan sebuah hubungan dalam sistem internasional, semua memiliki kekuasaan dan kekuatan, dimana hal ini akan digunakan untuk dapat mencapai tujuannya ( power ). Kekuatan nasional yang dimiliki oleh sebuah Negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Salah satu tokohnya seperti Allison ( fractionated power) yang beranggapan bahwa walaupun ada pemisahan kekuasaan antara sebuah negara dengan Negara lain, namun dalam melaksanakan politik luar negeri sebuah Negara akan membutuhkan power dan berada ditengah tengah power Negara lain juga, sehingga yang satu akan berhubungan dengan Negara lain. Dengan kekuasaan tersebut maka dapat dicapai tujuan poltik luar negerinya, semakin banyak power yang digunakan dan dihubungkan

---

<sup>4</sup> Op.cit. Couloumbis, Theodore A. & John H. Wolfe. Hal 235.

maka akan semakin cepat pencapaian tujuannya. Seperti kata Allison, *“where you stands, depends on where your sit”*.

#### **4. Pendekatan formulasi akhir dan implementasi.**

Seperti yang kita ketahui, hasil akhir dari sebuah politik luar negeri adalah keluarnya serangkaian kebijakan , atau sikap. Jadi yang terpenting disini adalah perumusan politik luar negeri tersebut. Model yang digunakan untuk pendekatan ini yaitu “ decision making.”

Tokoh yang menganalisis model ini yaitu Richard Snyder. Tokoh tokoh dalam pendekatan analisis ini menyatakan bahwa tindakan internasional merupakan sekumpulan keputusan – keputusan yang dibuat oleh unit unit politik nasional dimana elit elit politik merupakan aktor utama yang mengambil keputusan tersebut. Yang terpenting dari pendekatan ini adalah struktur dan proses dari pengambilan keputusan politik luar negeri. Para pembuat keputusan (elit politik ) akan menganalisis factor factor yang berkaitan dengan politik luar negeri seperti motivasi pembuat keputusan, jaringan informasi, pengaruh politik luar negeri, dan situasi kondisi dalam menjalankan politik luar negeri. sehingga terbentuk suatu keputusan untuk menjalankan politik luar negeri.

#### **5. Pendekatan rasionalitas dan rintangannya.**

Salah satu tokoh yang menggunakan analisis pendekatan ini adalah William D. Coplin. Pendekatan ini menekankan bahwa Negara merupakan actor untuk mencapai tujuan nasional mereka dengan mengkalkulasikan secara rasional dalam kancah politik global. Coplin mengidentifikasi empat langkah sebelum melakukan pendekatan rasional ;

- Mendefinisikan situasi yang terjadi di lingkungan eksternal.
- Memilih tujuan politik luar negeri
- Menentukan alternatif alternatif keputusan yang mungkin akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan situasi.
- Memilih alternatif / tindakan dari banyaknya alternatif yang ada.

Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau menganalisis dari alternatif alternatif yang ada mana alternatif yang paling baik untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri (pada Coplin merupakan tindakan ke 3), menghitung mana yang lebih baik merupakan tindakan rasional. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan karena kadang kadang tindakan / alternatif yang menurut satu orang rasional tidak rasional menurut orang lain.<sup>5</sup>

### **C. Konsep dan Teorisi dalam kajian politik luar negeri.**

Kajian politik luar negeri dalam pendekatan konsep dan teoritis akan melihat cara sebuah negara membuat kebijakan politik luar negerinya. Untuk menjelaskan bagaimana sebuah negara membuat kebijakan luar negerinya, kita akan mengambil langkah langkah yang dikemukakan oleh Rosenau. Langkah – langkah dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri menurut Rosenau yaitu ;

---

<sup>5</sup> Ibid.

- Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
- Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
- Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikendaki.
- Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
- Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikendaki.<sup>6</sup>

Menurut Rosenau, sebelum sebuah negara melaksanakan kebijakan luar negerinya, terlebih dahulu sebuah Negara tersebut harus menentukan dengan jelas, apa tujuannya melaksanakan kebijakan luar negerinya, apa sasaran yang ingin dicapai dengan melaksanakan kebijakan luar negeri tersebut. Sehingga, dapat menunjang kehidupan nasional. Tujuan yang hendak dicapai tersebut juga harus melihat kepada bagaimana situasi dan kondisi dalam negeri dan luar negeri, agar tujuan yang dikemukakan diatas dapat terwujud. Sebuah negara melakukan kebijakan luar negeri, bertujuan untuk memajukan kehidupan nasionalnya, maka, kebijakan luar negeri juga harus melihat bagaimana situasi nasionalnya sehingga sasaran yang dicapai dapat terwujud.

---

<sup>6</sup> Vioti, Paul R, Mark V. Kauppi.1998, *International Relation Theory*, United States America: Needham Heights, hal. 211.

Sedangkan dalam melakukan kebijakan luar negeri, sebuah Negara akan berhubungan negara Negara lain. Untuk itulah penting juga melihat situasi internasional. setelah melihat situasi dalam dunia nasional maupun internasional, negara akan melihat bagaimana kemampuannya dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, apakah dengan kemampuan yang dimiliki dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai, setelah itu barulah tujuan yang ingin dicapai dikembangkan secara lebih mendalam lagi, dan kemudian dilaksanakan tindakan yang perlu, terakhir, akan dilakukan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan.<sup>7</sup>

Langkah langkah yang dilakukan suatu negara dalam setiap tahap proses politik luar negerinya. Langkah-langkah yang dilakukan suatu negara sehingga membentuk satu rangkaian proses politik luar negerinya yang merupakan sebuah siklus, langkah langkah tersebut antara lain pertama sebuah negara akan menetapkan semua tujuan dan kemana arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data data penting seperti bagaimana kemampuan negaranya, kondisi dunia luar saat ini dan lainnya, tahap kedua adalah perumusan kebijakan dalam politik luar negeri untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, biasanya hal ini akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri.<sup>8</sup>

Tahap selanjutnya yang dilalui oleh sebuah negara adalah keluarnya suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan, dimana dalam kebijakan tersebut terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebuah negara. Berikutnya negara akan melaksanakan politik luar negeri berdasarkan pada rumusan yang telah dibuatnya, hal ini dilakukan dengan cara berhubungan dengan dunia luar, dalam bagan terlihat adanya external environment. setelah melaksanakan serangkaian kegiatan tersebut, maka pasti akan

---

<sup>7</sup> Ibid. hal 214.

<sup>8</sup> Op.cit. Anak Agung P, hal 50.

muncul kemampuan baru sebuah negara dan tujuan lain yang hendak dicapai kembali, yang kemudian akan kembali pada proses awal yaitu information assessment.

Politik luar negeri merupakan serangkaian kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional, dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Dimana kebijakan tersebut merupakan akumulasi dari kepentingan rakyat yang disebut sebagai kepentingan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa.

Dengan kata lain, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Hal ini sejalan dengan definisi yang disebutkan Goldstein, "*Foreign policies are the strategies used by governments to guide their actions in the international arena* (Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan pemerintah sebagai pedoman tindakan dalam kancah internasional).

Plano dan Olton menegaskan pula bahwa politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa politik luar negeri sengaja dibuat oleh suatu negara sebagai pedoman tindakan dalam forum internasional, yang pelaksanaannya bertujuan demi mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan nasional itu sendiri timbul untuk menutupi kekurangan sumber daya nasional, atau apa yang dibahasakan sebagai kekuatan nasional, yang ternyata hanya bisa diperoleh diluar batas-batas teritorial negaranya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Burchil , Scott dan Andrew Linkarter.2009, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Nusa Media, Bandung, hal 224.



Secara umum politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di percaturan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri mencerminkan kepentingan nasional di bidang luar negeri. Politik luar negeri adalah suatu komitmen yang merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan, baik dalam konteks dalam negeri atau luar negeri sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitar.

Jika dilihat dari unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen utama yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan instrumen yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan yang ingin dicapai dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan elit suatu negara. Sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan. Dengan demikian, politik luar negeri yang dijalankan suatu negara dapat dianggap berhasil jika memiliki suatu strategi diplomasi tertentu yang efektif dapat melindungi pencapaian kepentingan nasional negara tersebut.<sup>10</sup>

Sementara itu, James N Rossenau membedakan konsep politik luar negeri ke dalam tiga pengertian yaitu:

1. politik luar negeri sebagai kumpulan orientasi;
2. politik luar negeri sebagai sejumlah komitmen terhadap suatu tindakan dan rencana bagi suatu tindakan; dan
3. politik luar negeri sebagai bentuk perilaku.

Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi berarti adanya sejumlah cita-cita suatu negara yang diarahkan atau yang berhubungan dengan negara lain. Sekumpulan orientasi

---

<sup>10</sup> Ibid. hal 245.

yang terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional. Selain itu politik luar negeri merupakan rencana dan komitmen kongkret yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan kebijakan luar negeri. Pengertian politik luar negeri yang berikutnya mengarah pada aksi atau perilaku. Pada tingkat ini politik luar negeri berada pada tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan situasi di lingkungan eksternal.

Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geo-politiknnya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai (*good values*) yang terdapat dalam sistemnya.”

Penjelasan dari konsep diatas dapat merujuk pada teori sistem politik yang dikemukakan oleh Almond dan Powell, “sebuah sistem secara tidak langsung merupakan ketergantungan antar bagian-bagian dan batas antara sistem dengan lingkungannya.” Interdependensi ini mengandung makna bahwa perubahan dalam satu bagian sistem akan mempengaruhi seluruh komponen dan keseluruhan sistem, dan juga akan berpengaruh pada sistem domestik dan kapabilitas internasional. Dilihat dari perspektif sistem, politik luar negeri juga tidak dapat dipisahkan dari politik dalam negeri karena keduanya merupakan sub sistem dari sistem politik suatu negara.

Dalam pembahasan politik luar negeri, ada tiga determinan yang tak terpisahkan. Determinan pertama adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional, sekaligus merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Holsti berpandangan bahwa

kepentingan nasional atau apa yang disebut sebagai kepentingan dan nilai inti digambarkannya sebagai jenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini menurutnya lagi, biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa *reserve* atau sikap kritis.<sup>11</sup>

Para ahli hubungan internasional telah bersepakat bahwa politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara terhadap lingkungannya. Pun dengan segala kegiatan dan langkah-langkah yang diambil dalam ranah kebijaksanaan luar negerinya tidak lepas dari apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Maka, kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya. Perumusan dan penentuan kepentingan nasional suatu negara harus berpatokan pada apa yang menjadi kebutuhan dalam negeri dengan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Donal E. Nuchterlin menyebutkan sedikitnya ada empat jenis kepentingan nasional, yaitu:

1. kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara serta wilayahnya dan sistem politiknya dari ancaman negara lain;
2. kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;
3. kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 227.

ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya; dan

4. kepentingan ideologi, ialah kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Determinan yang kedua adalah kekuatan nasional. Kekuatan nasional sering diartikan sebagai *power*, dimana pendefinisianya sering mengarah pada kekuasaan. Selain itu, kekuatan nasional juga dimaknai sebagai *capability*, dimana peristilahan ini sering digunakan oleh para sarjanawan hubungan internasional. Penulis mengambil definisi kekuatan nasional dalam pengertian *national capability*, yaitu kemampuan yang dimiliki suatu negara yang nyata terlihat (*tangible*) dan yang tidak nyata terlihat (*intangible*) yang kedudukannya selaras dengan kepentingan serta tujuan nasional.

Kekuatan nasional atau kekuatan negara merupakan jaminan bagi keberhasilan politik luar negerinya. Sedangkan kekuatan dalam pengertiannya yang menonjol adalah kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pihak lain. Kekuatan negara dalam hubungan internasional dan dalam pentas dunia berarti kepeduliannya terhadap pihak lain ketika mereka mengambil keputusan dalam beberapa masalah.

Secara konvensional, kekuatan nasional terbagi ke dalam tiga

Kategori, yaitu instrument ekonomi, politik (diplomasi), dan militer. Tiga komponen ini bermanfaat bagi tujuan analitik, sedangkan pada prakteknya ketiga bentuk kekuatan ini saling berhubungan satu sama lain. Instrumen kekuatan politik atau diplomatik meliputi segala aktivitas yang terukur dan terampil dari para diplomat suatu negara yang berusaha meyakinkan pihak lain akan garis kebijaksanaan negaranya.

Keterbatasan kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional secara internal mengharuskan negara tersebut mencari pemenuhan

kepentingannya diluar batas-batas negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri dapat dianggap sebagai penyeimbang kepentingan nasional dengan kekuatan nasional.

Hans J. Morgenthau membagi kekuatan nasional atas unsur-unsur yang stabil (tidak mudah berubah) sebagai berikut:

1. Geografi (letak, luas dan kondisi wilayah)
2. Sumber Daya Alam
3. Kemampuan Industri
4. Kesiagaan militer
5. Jumlah dan Kualitas Penduduk

Dan yang labil (mudah berubah), sebagai berikut:

1. Karakter Nasional
2. Moral Nasional
3. Kualitas Diplomasi
4. Kualitas Pemerintah.

Hampir serupa, Lerche dan Said membagi kapabilitas negara dalam dua kategori yaitu *tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur, yaitu:

- Populasi (penduduk)
- Teritorial (wilayah)
- Sumber Alam dan Kapasitas Industri
- Kapasitas Pertanian
- Kekuatan Militer dan Mobilitas
- *Intangible elements*, yaitu: Kepemimpinan dan Kepribadian.
- Efisiensi Organisasi-Birokrasi
- Tipe Pemerintahan
- Persatuan Masyarakat
- Reputasi Negara
- Dukungan Luar Negeri dan Ketergantungan.

Hal ini menunjukkan bahwa negara dalam menghimpun kekuatannya tidak saja bergantung pada alat pemaksa kekuasaan berupa peralatan militer, melainkan juga segenap potensi kemampuan pendukung dari negaranya. Dimana, unsur-unsur ini yang menjadikan negara tersebut kuat dan mampu mengubah konflik kepentingan menjadi sesuatu yang menguntungkan baginya.

Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik saja namun juga dipengaruhi oleh faktor internasional. Dengan kondisi internasional yang senantiasa dinamis mengharuskan suatu negara membuat penyesuaian-penyesuaian untuk mengejar kepentingan nasional di luar batas teritorialnya. Dalam hal ini keberhasilan suatu politik luar negeri akan sangat bergantung pada bagaimana suatu negara melihat dan membaca kondisi internasional, kemudian menyesuaikannya dengan kebijakan politik luar negerinya.

Tatanan internasional terus berubah seiring dengan terjadinya pergeseran geo-politik dan geo-ekonomi termasuk perubahan lingkungan geostrategis pasca krisis global. Pada gilirannya, berbagai perubahan internasional yang terjadi mendorong terjadinya perubahan dalam pola-pola hubungan antar bangsa dan negara. Perubahan global juga mengharuskan adanya revitalisasi mekanisme kerjasama global agar mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang semakin besar dan berat.

Dari pola ini, dapat dilihat bahwa kondisi internasional yang begitu dinamis, selain memberikan tantangan-tantangan juga memberikan peluang-peluang. Dalam hal ini tugas setiap negara untuk meningkatkan kapasitasnya masing-masing, serta merumuskan politik luar negeri yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang bermuara pada pencapaian kepentingan nasional masing-masing.

Konsepsi politik luar negeri menurut Sufri Yusuf :  
“Politik luar negeri itu adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada. Karena situasi dan kondisi global yang senantiasa dinamis, maka kebijakan politik suatu negara selalu mengalami penyusunan dan penyesuaian, karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri. Olehnya, kebijakan politik luar negeri sangat ditentukan oleh kondisi objektif politik dalam negeri. Segala yang dirumuskan dari pertimbangan politik dalam negeri, akan menjadi acuan perumusan politik luar negeri yang ditujukan pada kancah internasional.”<sup>12</sup>

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu domestik dan faktor eksternal yaitu luar negeri. Jika faktor internal lebih dominan maka negara tersebut dikatakan negara kuat dan besar yang dapat menentukan kebijakan sendiri tanpa terpengaruh oleh tekanan pihak luar negeri. Contohnya negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis dan sebagainya. Jika faktor eksternal lebih dominan dari faktor domestik, negara tersebut negara lemah karena didikte oleh negara asing. Contohnya negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia dan negara-negara lainnya yang terikat oleh politik ketergantungan melalui program Hutang, bantuan, alih teknologi dsb.

Teori pengambilan keputusan luar negeri secara umum dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor domestik dan faktor luar negeri. Faktor domestik ini kita kenal dengan faktor

---

<sup>12</sup> Suffri, Yusuf, 1989, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta: Sinar Harapan. Hal 110.

internal dalam negeri Indonesia, Sedangkan Faktor luar negeri kita kenal dengan faktor eksternal yang kita kenal dengan situasi internasional. Unsur faktor domestic ini sangat dominan datang dari kepribadian Presiden sebagai kepala negara tertinggi yang mempunyai otoritas tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat.

Kepentingan nasional menurut para ahli hubungan internasional, yang menjelaskan bahwa kepentingan nasional suatu bangsa terkait dengan tidak hanya masalah internal, tetapi juga eksternal. Menurut Hans J. Morgenthau menyampaikan pemikirannya tentang konsep kepentingan nasional pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yaitu *pertama*, didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan *kedua*, mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri dapat diraih dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas wilayah internasional, sistem politik, dan identitas budaya ancaman bangsa lain. Sedangkan, pertimbangan kondisi lingkungan yang strategis dapat dilakukan dengan cara menjalankan politik luar negeri melalui upaya diplomasi.<sup>13</sup>

Menurut Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa kepentingan nasional dari sebuah Negara hendaknya tidak hanya didasarkan pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan internal bagi tiap-tiap warga negaranya, menyediakan pertahanan terhadap agresi dari luar, dan melindungi nilai-nilai Negara dan cara hidup. Mereka juga menyatakan bahwa tidak mungkin sebuah Negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya jika melakukan pengurangan keamanan dan kesejahteraan terhadap para

---

<sup>13</sup>TeoriKepentinganNasional.

<http://siswantoprajogo.wordpress.com/2009/08/02/kepentingan-nasional-sebuah-teori-universal-dan-penerapannya-oleh-as-di-indonesia/>. Diakses pada 23 April 2012



pesaingnya. Demi mencapai tujuan nasional seperti yang diharapkan, maka setiap Negara harus menghubungkan kepentingan nasionalnya melalui usaha kerjasama dengan banyak bangsa dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keamanan global.<sup>14</sup>

Sesuai dengan hal yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap Negara selalu berupaya melakukan kerjasama dengan Negara lain, baik dalam bentuk bilateral, maupun multilateral. Untuk merealisasikan kerjasama tersebut dibutuhkan kebijakan luar negeri sebagai alat diplomasi dalam rangka menjamin dan mengembangkan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, terdapat kaitan yang sangat erat antara kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri suatu Negara.<sup>15</sup>

Konsep kepentingan nasional dijadikan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara. Para penganut paham realis menyamakan kepentingan nasional sebagai usaha Negara untuk mengejar power dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara control atas suatu Negara terhadap Negara lain.<sup>16</sup>

Menurut Daniel S. Papp menjelaskan bahwa kepentingan nasional suatu Negara berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu Negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Dengan tercapainya kepentingan nasional suatu Negara berarti Negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi poliitik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Kepentingan nasional dibuat oleh para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negerinya.<sup>17</sup>

Teori kepentingan nasional menyangkut beberapa aspek yaitu ekonomi, ideologi, kekuatan, keamanan militer, serta

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Op.cit. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. Hal..

<sup>17</sup> Daniel S. Papp, "Contemporary International Relation" : A Framework for Understanding, Second Editions (New York: MacMillan Publishing Company, 1988)

moralitas, dan legalitas. Dalam hal ini, faktor ekonomi yang diambil dalam setiap kebijakan suatu Negara selalu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Negara yang dinilai sebagai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional dibidang ekonomi dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya.

## **BAB II**

### **PRINSIP DASAR POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA**

#### **A. Pengertian politik luar negeri Indonesia**

Pada dasarnya politik luar negeri merupakan kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Politik luar negeri diartikan sebagai skema atau pola dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu berhadapan dengan negara lain atau sekelompok negara lain. Politik luar negeri merupakan perpaduan dari tujuan atau merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan nasional negara tersebut.<sup>18</sup>

Kepentingan nasional diperjuangkan dengan power dan kapabilitas (kemampuan). Dalam arti sempit, pengertian politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangkan dalam arti luas, pengertian politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Pada umumnya tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Selain itu tujuannya yaitu: untuk mempertahankan, mengamankan serta memajukan kepentingan nasional dan percaturan internasional. Dan juga politik luar negeri bertujuan untuk menentukan keterlibatan suatu negara didalam isu-isu internasional/lingkungan sekitarnya.

---

<sup>18</sup> Mooctar Kusumaaatmadja, 1983, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Bandung: Penerbit Alumni, Hal. 7

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 1 ayat (2) Politik Luar Negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

Adapun tujuan politik luar negeri menurut Moh. Hatta adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang tersebut tidak ada atau belum dihasilkan sendiri.
3. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul.
5. Membentuk negara yang demokratis yang bersatu dan berdaulat.
6. Membentuk persahabatan dengan negara lain di Asia Pasifik yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme.<sup>19</sup>

Tujuan politik luar negeri Indonesia secara umum antara lain:

---

<sup>19</sup>Mohammad. Hatta, 1986. *Mendayung Diantara Dua Karang*, Jakarta: Djembatan, hal 7..

1. Mempertahankan integritas negara.
2. Meningkatkan kepentingan ekonomi bangsa.
3. Menjamin keamanan nasional.
4. Melindungi martabat dan keperibadian nasional.
5. Membangun kekuasaan dan pengaruh terhadap negara lain.<sup>20</sup>

Adapun uraian tentang tujuan politik luar negeri Indonesia dalam preambuli tersebut kurang lebihnya sebagai berikut:

- Indonesia mengupayakan agar setiap manusia di muka bumi bergaul dengan damai antara satu dengan yang lain, menghormati hak asasi manusia, juga menghormati kedaulatan negara masing-masing.
- Indonesia menghendaki pergaulan internasional tertib tanpa pertikaian, perang, atau penjajahan oleh satu bangsa kepada bangsa lain.
- Indonesia mengupayakan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik antara negara satu dengan yang lain.
- Indonesia berusaha agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga disumbangkan kepada masyarakat di negara lain.
- Indonesia berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.<sup>21</sup>

## **B. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia.**

---

<sup>20</sup> Wirajuda, Hasan. 2004, *Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Jakarta: Gramedia., hal. 35.

<sup>21</sup> Ibid. hal 38.

Sebenarnya, jauh sebelum Indonesia merdeka, politik luar negeri Indonesia sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Dibuktikan isi pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yang telah mencantumkan semuanya. Tujuan politik luar negeri Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain :

1. Menghapuskan semua kesewenangan yang terjadi di dunia, seperti penindasan dan penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan secara fisik. Penindasan dan penjajahan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
2. Mengupayakan perdamaian setiap manusia di dunia, di mana akan tercapainya tujuan yang pertama.
3. Mencapai pergaulan Internasional yang tertib tanpa pertikaian atau perang atau penjajahan.
4. Indonsia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban yang akan tercapai jika antara semua negara di dunia saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati tanpa membedakan warna kulit, suku, ras, dan agama. Karena pada dasarnya semua manusia mempunyai hak yang sama.
5. Memajukan kesejahteraan umum, secara umum adalah kesejahteraan semua bangsa di dunia, secara khusus adalah kesejahteraan Bangsa Indonesia. Diharapkan, tidak ada kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik di seluruh negara dunia. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat Indonesia akan ikut meningkat. Hubungan ke negara lain, adalah keikutsertaan Indonesia membantu negara yang mengalami bencana dan perang dalam bentuk bantuan pangan, sandang, dan medis.
6. Melindungi segenap Bangsa Indonesia. Pergaulan dengan dunia internasional, dengan semua organisasi yang ada, antar negara di wilayah yang sama / regional / antar negara tetangga seharusnya juga bertujuan

melindungi rakyat Indonesia di mana saja mereka berada. jika ada masalah dengan salah satu warga negara Indonesia di negara lain, maka pemerintah dapat segera menyelesaikannya melalui hubungan diplomatik

7. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, tujuan politik luar negeri Indonesia selanjutnya, menurut pembukaan UUD 1945 haruslah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh politik luar negeri yang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan pertukaran pelajar, dengan mengirim siswa yang berprestasi ke luar negeri dan jika lulus kembali ke Indonesia untuk mengabdikan pada bangsa dan tanah air. Contoh lain dari mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pertukaran budaya. Dengan mempelajari budaya negara lain yang baik, diharapkan kebudayaan Indonesia menjadi lebih beragam.
8. Berpartisipasi aktif dalam hubungan dan organisasi internasional demi terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia.

Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia tercermin dalam Pancasila dan pembukaan UUD 45. Secara eksplisit dapat kita lihat antara lain:

1. Negara Indonesia melakukan politik damai.
2. Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
3. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum Internasional dan organisasi Internasional untuk menjamin tercapainya perdamaian yang kekal.
4. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran Internasional.

5. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial Internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.
6. Negara Indonesia dalam lingkup PBB berusaha membantu perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Politik Luar Negeri Indonesia.

1. Faktor geografis, yaitu Letak geografis suatu negara mempengaruhi kebijakan politik luar negeri. Contohnya: negara Indonesia wilayahnya berupa lautan, bekerjasama dengan negara lain yang mampu membantu pembangunan geografis lautan.
2. Faktor kependudukan. Jumlah dan kualitas penduduk disuatu negara akan mempengaruhi kebijakan politik luar negerinya. Maka, akan mengembangkan politik luar negeri yang mampu mengatasi kepadatan penduduk.
3. Faktor sumber daya ekonomi. Suatu negara pasti ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Agar sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu negara dapat dimanfaatkan secara maksimal perlu bekerjasama dengan negara lain.
4. Faktor ideologi. Ideologi suatu negara menjadi acuan dalam membangun negaranya, termasuk kebijakan politik luar negerinya.
5. Faktor hukum. Hukum suatu negara menjadi acuan dalam mengembangkan politik luar negeri.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Djalal, Hasjim, 1997, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990*, Jakarta: CSIS. Hal 57.



Adapun faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri mencakup hal-hal berikut :

- Letak geografis Indonesia

Indonesia memiliki letak geografis yang strategis yaitu di posisi silang antara negara-negara di dunia. Hal ini dapat membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia.

- Sejarah perjuangan

Selama kurang lebih 350 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa lain, dan terus berjuang agar tidak kembali dijajah dalam bentuk apapun.

- Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak sehingga dapat menjadi modal atau kekuatan bagi pembangunan bangsa apabila dipimpin dan dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk Indonesia yang banyak tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik akan mengundang kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan politik luar negeri.

- Kekayaan alam

Tanah air Indonesia adalah negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Apabila bangsa Indonesia tersebut dapat memanfaatkan kekayaan tersebut secara efektif dan optimal, bangsa Indonesia dapat memainkan peranan yang besar dalam menanggulangi krisis pangan dunia.

- Militer

Apabila militer Indonesia kuat, akan dapat menangkal ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar.

- Situasi internasional

Berbagai pertikaian antar negara ndan perkembangan teknologi dapat memicu timbulnya konflik yang bersifat internasional.

- Diplomasi

Para diplomat harus dapat menjalankan tugas secara efektif sesuia dengan tugas, kewajiban, dan fungsional.

- Pemerintahan yang bersih

Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun negara lain, sangat diperlikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolisi, dan nepotisme.

- Kepentingan nasional

Kepentingan nasional lebih berorientasi pada pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus mengabdikan kepada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa.

### **C. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif**

Politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia bertujuan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Oleh sebab itu, sikap bangsa Indonesia terhadap masalah-masalah

internasional selalu didasarkan pada politik bebas aktif.<sup>23</sup>

Bebas , artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional. Selain itu, bebas juga berarti Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan dunia, baik itu Blok Barat ( liberalis) maupun kekuatan Blok Timur (komunis).

Aktif, artinya Indonesia aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia. Selain itu, Indonesia juga aktif memperjuangkan terwujudnya keadilan, kebebasan, kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Makna bebas aktif muncul dari perkataan muhammad hatta pada saat perang dingin berlangsung. Beliau memandang Indonesia harus mempunyai sebuah kebijakan luar negeri untuk meredam konstelasi politik internasional pada saat itu agar terlepas dari intervensi-intervensi dari negara-negara yang mendominasi Perang Dingin.<sup>24</sup>

Dengan kondisi domestik Indonesia, sebagai sebuah negara yang baru berdiri, negara ini kemudian mencoba mencari sosok atau membangun profilnye dalam dunia internasional. Kondisi ekonomi yang relatif lemah namun memiliki semangat patriotisme yang besar membuat pemerintah Indonesia harus menentukan arah kebijakannya diluar negeri untuk membangun citra Indonesia. Mohammad Hatta mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia bagaikan “mendayung diantara dua karang”.

Artinya, politik luar negeri Indonesia berada pada posisi yang netral diantara dua kekuatan besar dunia (Amerika Serikat dan Uni Soviet). Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Soekarno cenderung mendekati kelompok sosialis China. Sebenarnya kebijakan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pertentangan ideologi yang sedang berkembang saat

---

<sup>23</sup> Mohammad, Hatta, . 1992. Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 14..

<sup>24</sup> Ibid. hal 59.

itu, namun lebih diwarnai oleh semangat menentang kolonialisme yang masih berlangsung di beberapa negara di Asia dan Afrika.

Pentingnya politik luar negeri di masyarakat internasional adalah:

- Meningkatkan kerjasama antarbangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keamanan, dan kepribadian bangsa.
- Membangun tatanan dunia global yang tertib dan damai.
- Meningkatkan kebersamaan antarnegara dalam mengatasi berbagai persoalan global, contoh: terorisme, kerusakan lingkungan dan kejahatan internasional.<sup>25</sup>

## **D. Landasan hukum politik luar negeri Indonesia**

### **1. Landasan idiil**

Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua tersebut menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang menolak penindasan manusia atas manusia atau pengisapan oleh bangsa lain. Atas dasar sila kedua Pancasila tersebut, Indonesia secara aktif menentang segala bentuk penjajahan.

### **2. Landasan Konstitusional.**

Landasan Konstitusional pelaksanaan politik luar negeri

---

<sup>25</sup> Op.Cit. Coulombuis. Hal 263.

Indonesia ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:<sup>26</sup>

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea I berbunyi, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”
  2. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV berbunyi , “...Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”
- UUD 1945 pasal 11 dan pasal 13
1. Pasal 11 ayat 1 berbunyi , “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perjanjian, dan perdamaian dengan negara lain”.
  2. Pasal 13 terdiri atas tiga ayat sebagai berikut.
    - Ayat (1): Presiden mengangkat duta dan konsul
    - Ayat (2) Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR
    - Ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR

---

<sup>26</sup> Wuryandari, Ganewati (ed.). 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P-LIPI.hal. 28.

### 3. Landasan Operasional

Landasan operasional atau landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 antara lain:

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. (RJPN 2005-2025).
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- TAP MPR No. XII/MPR/1966
- GBHN (TAP MPR NO IV/MPR/1999)
- UU No. 37 Tahun 1999 (H.I)
- Keputusan Presiden No 45 Tahun 1974 (susunan organisasi Deplu)<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.

### **BAB III**

## **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA**

### **MASA PRESIDEN SOEKARNO**

#### **A. Profil Presiden Soekarno**

Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno (ER, EYD: Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo) (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 – meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945–1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.<sup>28</sup>

Ketika dilahirkan, Soekarno diberikan nama Kusno oleh orangtuanya. Namun karena ia sering sakit maka ketika berumur sebelas tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharata Yudha yaitu Karna. Nama "Karna" menjadi "Karno" karena dalam bahasa Jawa huruf "a" berubah menjadi "o" sedangkan awalan "su" memiliki arti "baik".

Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena

---

<sup>28</sup> Ricklefs, M.C.2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi. Hal 27.

menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah (Belanda). Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah, selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno.

Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis *Achmed Soekarno*. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, "Siapa nama kecil Soekar karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki.

Soekarno menyebutkan bahwa nama Achmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Achmed di depan nama Soekarno, dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara. Dalam buku *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (terjemahan Syamsu Hadi. Ed. Rev. 2011. Yogyakarta: Media Pressindo, dan Yayasan Bung Karno, ISBN 979-911-032-7-9) halaman 32 dijelaskan bahwa namanya hanya "Sukarno" saja, karena dalam masyarakat Indonesia bukan hal yang tidak biasa memiliki nama yang terdiri satu kata.<sup>29</sup>

Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Soekemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden

---

<sup>29</sup> Ibid. hal 28.



Soekemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur.

Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orangtuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukan Soekarno ke *Eerste Inlandse School*, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke *Europeesche Lagere School (ELS)* untuk memudahkannya diterima di *Hogere Burger School (HBS)*. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama H.O.S. Tjokroaminoto.<sup>30</sup>

Tjokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Musso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muis. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Tri Koro Dharmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi *Jong Java* (Pemuda Jawa) pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian "Oetoesan Hindia" yang dipimpin oleh Tjokroaminoto.

Tamat HBS Soerabaja bulan Juli 1921, bersama Djoko Asmo rekan satu angkatan di HBS, Soekarno melanjutkan ke *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921, setelah dua bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada

---

<sup>30</sup> Taufik Adi. 2008. Soekarno Biografi Singkat 1901-1970. Jogjakarta: GARASI, hal. 45.

tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian *insinyur* pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 ITB Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama delapan belas insinyur lainnya. Prof. Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan "*Terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa*". Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Soetedjo, selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Johannes Alexander Henricus Ondang.

Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Tjokroaminoto. Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926.<sup>31</sup>

Riwayat pekerjaan Soekarno al:

- Ir. Soekarno pada tahun 1926 mendirikan biro insinyur bersama Ir. Anwari, banyak mengerjakan rancang bangun bangunan. Selanjutnya bersama Ir. Rooseno juga merancang dan membangun rumah-rumah dan jenis bangunan lainnya.

---

<sup>31</sup> Setyohadi.Tuk. 2004. *Perjalan Bangsa Indonesia Dari Masa ke Masa*. Bogor: Rajawali Corporation. Hal. 57.

- Ketika dibuang di Bengkulu menyempatkan merancang beberapa rumah dan merenovasi total masjid Jami' di tengah kota.

Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka.

Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah (muka) Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota itu, namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan pada masa datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Frederich Silaban dan R.M. Soedarsono, dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara.

- Masjid Istiqlal 1951
- Monumen Nasional 1960
- Gedung Conefo
- Gedung Sarinah
- Wisma Nusantara
- Hotel Indonesia 1962
- Tugu Selamat Datang
- Monumen Pembebasan Irian Barat
- Patung Dirgantara
- Tahun 1955 Ir. Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan sebagai seorang arsitek, Soekarno tergerak memberikan sumbangan ide arsitektural kepada pemerintah Arab Saudi agar membuat bangunan untuk melakukan *sa'i* menjadi dua jalur dalam

bangunan dua lantai. Pemerintah Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran pada tahun 1966, termasuk pembuatan lantai bertingkat bagi umat yang melaksanakan *sa'i* menjadi dua jalur dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf

- Rancangan skema Tata Ruang Kota Palangkaraya yang diresmikan pada tahun 1957.<sup>32</sup>

Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jong Java cabang Surabaya Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa *ngoko* (kasar). Sebulan kemudian dia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Jong Java diterbitkan dalam bahasa Melayu saja, dan bukan dalam bahasa Belanda.

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan *Algemeene Studie Club (ASC)* di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari *Indonesische Studie Club* oleh Dr. Soetomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung, untuk dijejloskan ke Penjara Banceuy. Pada tahun 1930 ia dipindahkan ke Sukamiskin dan di pengadilan Landraad Bandung 18 Desember 1930 ia membacakan pledoinya yang fenomenal *Indonesia Menggugat*, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931.<sup>33</sup>

Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI.

---

<sup>32</sup> Ibid. hal 58.

<sup>33</sup> Opcit. Taufik Hadi. Hal 48.

Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang Guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan.

Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu, ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada awal masa penjajahan Jepang (1942–1945), pemerintah Jepang sempat tidak memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk "*mengamankan*" keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer.

Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memerhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansyur, dan lain-lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif.

Akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir

ke Rengasdengklok.<sup>34</sup>

Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri.

Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus romusha. Ruang tamu rumah persembunyian Bung Karno di Rengasdengklok saksi sejarah perjuangan. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>35</sup>

## **B. Politik Luar Negeri Indonesia masa periode Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949.**

Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus

---

<sup>34</sup> Ibid. Hal 59.

<sup>35</sup> Ibid. Hal 60.

1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air (PETA) Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang.<sup>36</sup>

Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP. Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada tempat 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.<sup>37</sup>

Kepentingan nasional Indonesia pada periode ini adalah mempertahankan kemerdekaan dan Memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan perjuangan diplomasi dan kekuatan militer atau perang.

---

<sup>36</sup> Michael, Leifer, Michael. 1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.. hal 57.

<sup>37</sup> A H, Nasution, . 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid 6. Bandung., hal 62.

- **Perjanjian Linggarjati.**

Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian bersejarah antara pihak Indonesia dan Belanda dengan pihak Inggris sebagai mediator yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Penandatanganan perjanjian baru disahkan secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947. Isi perjanjian ini meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto serta pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Diadakannya perundingan Linggarjati dilatarbelangi oleh masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia. Hal ini karena Jepang menetapkan ‘status quo’ di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda seperti peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab berupaya menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Pada akhirnya diplomat Inggris bernama Sir Archibald Clark Kerr mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hooge Veluwe.

Para pemimpin negara menyadari bahwa untuk menyelesaikan konflik dengan peperangan hanya akan menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Namun perundingan yang direncanakan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Madura, sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia dalam menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibukalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Lord Killearn.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid. Hal 63.



Dalam perundingan awal ini akhirnya menghasilkan persetujuan untuk gencatan senjata pada 14 Oktober dan rencana untuk mengadakan perundingan lebih lanjut, yakni Perundingan Linggarjati yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 November 1946. Meski dilaksanakan pada 11-13 November 1946, namun penandatanganan perjanjian Linggarjati baru dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947. Di waktu senggang, para delegasi melakukan perbaikan terhadap isi-isi perjanjian agar kedua belah pihak bisa menemui titik temu untuk menyetujui perjanjian ini.

Ada beberapa tokoh penting yang terlibat dalam perjanjian Linggarjati, baik dari pihak Indonesia, Belanda atau dari pihak Inggris selaku mediator atau penengah. Berikut nama-nama tokoh dalam perjanjian Linggarjati.

- Pemerintah Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (ketua), A. K. Gani, Susanto Tirtoprojo, Mohammad Roem
- Pemerintah Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn (ketua), H. J. van Mook, Max van Pool, F. de Boer
- Pemerintah Inggris selaku mediator/penengah diwakili oleh Lord Killearn.

Penandatanganan perjanjian Linggarjati dilakukan pada 25 Maret 1947 antara kedua belah pihak. Hasil perundingan Linggarjati menghasilkan beberapa poin dan pasal sebagai berikut.

1. Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura
2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949
3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri

dari wilayah Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar sebelum tanggal 1 Januari 1949

4. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kesepakatan dalam perundingan Linggarjati tersebut. Dampak positif perjanjian Linggarjati bagi Indonesia adalah pemerintah Indonesia mendapat pengakuan secara *de facto* dari pihak Belanda. Namun ada juga dampak negatifnya yaitu wilayah Indonesia menjadi semakin sempit karena yang diakui hanya wilayah Jawa, Sebelumnya juga terjadi pro-kontra terkait perundingan ini. Beberapa partai nasional mengkritik pemerintah karena mau menandatangani perundingan ini dan menuding bahwa pemerintahan Indonesia lemah untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

Namun pemerintah memberi alasan kenapa mau menyetujui isi perjanjian Linggarjati tersebut yaitu memilih cara damai untuk menyelesaikan konflik untuk menghindari jatuhnya korban dan menarik simpati dunia internasional. Perdamaian dengan gencatan senjata juga dapat memberi peluang bagi pasukan militer Indonesia untuk melakukan berbagai hal diantaranya adalah konsolidasi.

Meski sudah disepakati namun kemudian terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini oleh pihak Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H. J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, terjadi Agresi

---

<sup>39</sup> Departemen Luar Negeri. 1971. *Dua Puluh Tahun Departemen LuarNegeri 1945-1970*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Karyawan Deplu.

Militer Belanda I yaitu serangan dari tentara Belanda ke wilayah Indonesia.

Akibatnya konflik Indonesia-Belanda kembali memanas. Pada akhirnya konflik ini kemudian kembali diselesaikan lewat jalur perundingan yaitu Perjanjian Renville. Meski begitu banyak hasil perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia.

- **Perjanjian Renville**

Perundingan Renville dilaksanakan untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak Indonesia dan Belanda. Keduanya terlibat perseteruan dikarenakan serangan Belanda lewat peristiwa Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947. Belanda juga dianggap telah melanggar isi perjanjian Linggarjati yang telah disetujui sebelumnya.

Hal ini menimbulkan reaksi keras dari pihak luar. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Pada 6 Agustus 1947, gubernur Jendral Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata sehingga Agresi Militer I oleh Belanda pun dihentikan.

Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan resolusi untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara. Tiga negara tersebut terdiri dari Belgia (yang dipilih oleh Belanda), Australia (yang dipilih oleh Indonesia) dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak sebagai pihak penengah. Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamkan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Wilayah Republik Indonesia hanya tinggal sepertiga pulau Jawa dan pulau Sumatra saja. Blokade yang dilakukan pihak Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan dan pakaian menuju ke wilayah Republik Indonesia.

Untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda,

pada akhirnya diadakanlah Perundingan Renville untuk menyelesaikan konflik kedua negara tersebut. Lokasi perundingan dilakukan di tempat netral yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Waktu pelaksanaan perjanjian ini dilakukan sejak tanggal 8 Desember 1947. Adapun penandatanganan perjanjian Renville dilakukan tanggal 17 Desember 1948. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian Renville, baik dari pihak Indonesia, pihak Belanda maupun dari pihak PBB sebagai mediator perundingan.

#### Delegasi Republik Indonesia

- Ketua : Amir Syarifudin Harahap
- Anggota lain : Ali Sastroamijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Coa Tik Len, Dr. Johannes Leimena, Nasrun

#### Delegasi Belanda

- Ketua : R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo
- Anggota lain : Dr. P. J. Koest, Mr. Dr. Chr. Soumokil, Mr. van Vredenburg

#### Penengah/Mediator dari PBB

- Ketua : Frank Porter Graham
- Anggota : Richard Kirby, Paul van Zeeland

Ada beberapa poin hasil perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Berikut merupakan 8 poin hasil dan isi perundingan Renville.

1. Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda antara lain hanya Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera.
2. Disetujuinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
3. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS)
4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat
5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia-Belanda
6. Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk
7. Akan diadakan pemilihan umum dalam kurun 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dalam pembentukan konstituante Republik Indonesia Serikat
8. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Dampak perjanjian Renville lebih banyak merugikan pihak Indonesia. Misalnya wilayah Indonesia yang semakin berkurang dan banyak dikuasai oleh pihak Belanda. Selain itu pasukan Indonesia pun harus ditarik mundur ke wilayah sendiri. Belum lagi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Berikut beberapa dampak perjanjian Renville yang merugikan Indonesia.

1. Indonesia harus menarik mundur pasukannya di luar wilayah kekuasaan yang telah disepakati

---

<sup>40</sup> Ibid hal 195.

2. Semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayahnya telah dikuasai pihak Belanda
3. Lengsernya kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara terhadap pihak Belanda
4. Belanda melakukan blokade ekonomi pada Indonesia
5. Untuk memecah belah republik Indonesia, Belanda membuat beberapa negara boneka seperti negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur dan negara Jawa Timur

- **Perjanjian Roem Royen**

Perjanjian Roem Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Kali ini akan disampaikan fakta dan info mengenai latar belakang perjanjian Roem Royen serta sejarah, isi, dampak serta hasil perundingan Roem Royen selengkapnya.<sup>41</sup>

Perundingan Roem Royen awalnya dilatarbelakangi oleh terjadinya serangan dari Belanda kepada Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda melakukan serangan ke Yogyakarta serta serangan Agresi Militer Belanda II. Hal ini ditambah dengan adanya penahanan pemimpin Indonesia mulai mengundang kecaman dari dunia internasional terutama dari Amerika Serikat dan Dewan PBB.

Tekanan dari luar negeri yang kemudian membuat perlunya dilakukan perundingan Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu kemudian dilakukan perundingan Roem Royen yang menjadi jalan menuju Konferensi Meja Bundar (KMB) yang

---

<sup>41</sup> Ibid hal 205.

akan diadakan di Den Haag, Belanda. Tanggal perjanjian Roem Royen diadakan mulai dari 14 April sampai 7 Mei 1948 dan bertempat di Jakarta.

Dalam perjanjian Roem Royen, pihak Indonesia diwakili oleh Mohammad Roem beberapa anggota seperti Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary. Sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Dr. J. Herman van Royen dengan anggotanya seperti Blom, Jacob, dr. Van, dr. Gede, Dr. P. J. Koets, Van Hoogstratendan dan Dr. Gieben. Sementara pihak penengah adalah UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang diketuai oleh Merle Cochran dari Amerika Serikat. Kemudian perundingan Indonesia diperkuat dengan hadirnya Drs. Moh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Perundingan baru selesai pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini mulai ditandatangani dan nama perjanjian ini kemudian diputuskan untuk diambil dari nama kedua pemimpin delegasi, yaitu Mohammad Roem dari pihak Indonesia dan Herman van Royen dari pihak Belanda.

Hasil perundingan Roem Royen ini antara lain adalah :

1. Angkatan bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan semua aktivitas gerilya
2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB)
3. Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta
4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik
5. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagian dari Negara Indonesia Serikat
6. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat

7. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak
8. Belanda memberikan semua hak, kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia.<sup>42</sup>

Terdapat banyak dampak perjanjian Roem Royen pada keadaan di Indonesia. Isi perjanjian Roem Royen termasuk pembebasan tahanan politik sehingga Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibukota sementara dari Indonesia. Terjadi juga penyerahan mandat dari Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) kembali kepada Ir. Soekarno.

Yang paling mencolok adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Roem Royen pun berujung dengan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda yang menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda.

- **Konferensi Meja Bundar**

Konferensi Meja Bundar atau Perjanjian KMB merupakan merupakan sebuah pertemuan (konferensi) yang bertempat di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di kepulauan Indonesia. Konferensi ini berakhir dengan setujunya Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid hal 211.

<sup>43</sup> Opcit. Abdul Haris Nasution. Hal 72.



1. Perjanjian ini dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda. Khususnya mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat.
2. Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa Irian Barat.

Pada Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, Indonesia diwakili oleh:

1. Drs. Hatta (ketua)
2. Nir. Moh. Roem
3. Prof Dr. Mr. Supomo
4. Dr. J. Leitnena
5. Mr. Ali Sastroamicijoyo
6. Ir. Djuanda
7. Dr. Sukiman
8. Mr. Suyono Hadinoto
9. Dr. Sumitro Djojohadikusumo
10. Mr. Abdul Karim Pringgodigdo
11. Kolonel T.B. Simatupang
12. Mr. Muwardi

Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen dan UNCI diwakili Chritchley.

### **Isi dari Konferensi Meja Bundar**

1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka.

2. Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan.
3. Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda untuk bekerja sama dengan status sukarela dan sederajat.
4. Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
5. Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang dari tahun 1942.<sup>44</sup>

Sementara itu, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan pengesahan dan tanda tangan bersama piagam persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik Indonesia dan BFO. Di samping itu, hasil keputusan Konferensi Meja Bundar disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya, KNIP melakukan sidang dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil dari KMB.

Pembahasan hasil keputusan KMB oleh KNIP dilakukan dengan cara pemungutan suara dari para peserta, hasil akhir yang dicapainya adalah 226 suara setuju, 62 suara menolak, dan 31 suara meninggalkan ruang sidang. Dengan demikian, KNIP resmi menerima hasil KMB. Lalu pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan calon tunggal Ir. Soekarno yang akhirnya terpilih sebagai presiden. Kemudian Ir. Soekarno dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Kabinet RIS di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta.

Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai perdana menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949. Setelahnya

---

<sup>44</sup> M. Zein, Hasan, . 1980. *Diplomasi Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Bulan Bintang. Hal 78..

pada tanggal 23 Desember 1949 perwakilan RIS berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, pada kedua negara, Indonesia dan negeri Belanda dilaksanakan upacara penandatanganan akta penyerahan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan Indonesia yang dilakukan di negeri Belanda bertempat di ruangan takhta Amsterdam. Ratu Juliana, Menteri Seberang Lautan A.M.J.A. Sasseu, Perdana Menteri Dr. Willem Drees dan Drs. Moh. Hatta adalah tokoh yang terlibat dalam melakukan penandatanganan akta penyerahan kedaulatan. Pada saat yang bersamaan di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink menandatangani naskah penyerahan kedaulatan dalam suatu upacara di Istana Merdeka.<sup>45</sup>

Penyerahan kedaulatan itu berarti Belanda telah mengakui berdirinya Republik Indonesia Serikat dan mengakui kekuasaan Indonesia di seluruh bekas wilayah jajahan Hindia – Belanda secara formal kecuali Irian Barat. Irian barat diserahkan oleh Belanda setahun kemudian. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia.

Barulah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan *de facto* Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda Ben Bot mengungkapkan "penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan" yang

---

<sup>45</sup> Ibid. hal 79.

dialami rakyat Indonesia selama empat tahun Revolusi Nasional, meski ia tidak secara resmi menyampaikan permohonan maaf.

Reaksi Indonesia kepada posisi Belanda umumnya positif; Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayuda mengatakan bahwa, setelah pengakuan ini, "akan lebih mudah untuk maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara". Terkait utang Hindia Belanda, Indonesia membayar sebanyak kira-kira 4 miliar gulden dalam kurun waktu 1950-1956 namun kemudian memutuskan untuk tidak membayar sisanya. .

### **C. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Parlementer 1949-1959.**

Salah satu hasil dari KMB adalah terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Pembentukan negara federal yang diprakasai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata tidak mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, Perdana Menteri Kabinet RIS Mohammad Hatta, kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Maka, dimulailah usaha-usaha untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah susah payah diperjuangkan. Masa revolusi fisik atau masa perjuangan harus segera ditinggalkan.<sup>46</sup>

Gangguan keamanan yang selama ini banyak menyita perhatian, waktu, dan dana negara harus segera digantikan dengan langkah-langkah konkret. Hal ini agar perbaikan berbagai bidang, seperti sistem politik dan pemerintahan, perekonomian, pertahanan, dan keamanan negara.

---

<sup>46</sup> Ibid. hal 80.

Setelah berakhirnya pemerintahan RIS pada 1950, pemerintahan Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara.

Pada kurun waktu 1950 sampai 1959, kembali terjadi silih berganti kabinet. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. Disamping itu, terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Pada tahun 1950, Perdana Menteri Kabinet RIS, Mohammad Hatta, kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Salah satunya adalah Presiden Soekarno membubarkan parlemen sekaligus menyatakan kembali UUD 1945. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga MPRS dalam demokrasi terpimpin yang menerapkan sistem politik keseimbangan. Pada masa ini Soekarno merencanakan konsep pentingnya persatuan antara kaum nasionalis, agama dan komunis.

Pada tahun 1955, Indonesia baru melaksanakan pemilihan umum nasional yang pertama. Pada bulan September, rakyat memilih wakil untuk DPR, dan pada bulan Desember memilih kembali memilih wakil-wakil yang lebih banyak lagi yang akan bekerja di sebuah institusi yang dikenal dengan Konstituante. Konstituante, setelah dipilih pada tahun 1955, mulai bersidang pada bulan November 1956 di Bandung, ibukota Jawa Barat. Perdebatan, permusyawaratan, dan penulisan draf-draf undang-undang dasar berlangsung selama dua setengah tahun.<sup>47</sup>

Perdebatan isu dasar negara (terutama antara golongan yang mendukung Islam sebagai dasar negara dan golongan yang mendukung Pancasila) terjadi sangat sengit. Walaupun

---

<sup>47</sup> Ibid. hal 81.

para pimpinan Konstituante merasa sudah lebih dari 90% materi undang-undang dasar telah disepakati, dan walaupun ada beberapa tokoh partai politik Islam yang merasa siap berkompromi, Konstituante tidak sempat menyelesaikan tugasnya.

Konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Pada 1950, UUDS (Undang-Undang Sementara) diberlakukan di bawah pemerintahan Soekarno. ini berdampak pada penerapan model demokrasi parlementer murni (Demokrasi Liberal). Tetapi, Demokrasi Liberal yang didukung oleh banyak partai seperti, MASYUMI dan PNI) justru mengarah kepada munculnya ketidakstabilan politik. Pada 1959, munculnya Demokrasi Terpimpin dengan kabinet yang semuanya dipimpin oleh Ir. Soekarno.<sup>48</sup>

Sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan<sup>49</sup> n konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.

---

<sup>48</sup> Ibid. hal 83.

Kebijakan luar negeri pada masa demokrasi parlementer tahun 1949-1959 dapat kita lihat dari :

- Perjalanan kebijakan Luar Negeri Masa Pemerintahan Sistem Perdana Menteri.

Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi perdebatan dalam Konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan.

a. Kabinet Natsir (Masyumi) (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Program kerja kabinet Natsir:

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
2. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat
5. Menyempurnakan organisasi angkatan perang
6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat.

Hasil dari pertemuan ini adalah Berlangsungnya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendala atau masalah yang dihadapi:

1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan)
2. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6.5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.<sup>50</sup>

Dalam program Kabinet Natsir, kemudian diterapkan Program Benteng yang didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng resmi berjalan selama tiga tahun (1950-1953) dengan tiga kabinet berbeda (Natsir, Sukiman, dan Wilopo).

b. Kabinet Sukiman-Suwirjo (Masyumi) (26 April 1951 - 3 April 1952).

Kabinet ini merupakan kabinet kedua setelah penghapusan RIS (Republik Indonesia Serikat). Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet ini telah didemosioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Masyumi adalah organisasi yang dibentuk Jepang dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat islam di Indonesia. Tujuan partai ini adalah untuk menegaskan kedaulatan negara dan

---

<sup>50</sup> Opcit, Dua puluh tahun Deparlu, , hal. 220



agama islam.

Program kerja kabinet Sukiman:

1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani
3. Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan
4. Mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
5. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan
6. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuuat menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
7. Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman namun selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Adapun beberapa kendala atau masalah yang dihadapi, diantaranya:

1. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebadjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cockran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) . Dimana di dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan Amerika.
2. adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
3. masalah Irian Barat belum juga teratasi
4. hubungan Sukirman dengan militer kurang baik, ditunjukkan dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi.

Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Achmad Soebardjo dan Duta Besar AS Merle Cochran. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada ikatan Mutual Security Act (MSA).

Di dalam MSA, terdapat pembatasan terhadap

kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok Barat. Di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.<sup>51</sup>

#### c. Kabinet Wilopo (PNI) (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

Program kerja kabinet Wilopo:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum
2. Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia
3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah
2. Penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan
3. Kejadian Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatra Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para petani karena

---

<sup>51</sup> Ibid hal 231.

bertahun tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat Kabinet Sukiman. Saat itu juga Mr. Iskaq Cokroadisuryo selaku menteri dalam negeri memberikan persetujuan agar tanah Deli dikembalikan. Tanah tersebut berhasil dikembalikan saat masa Kabinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut, banyak terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapatkan sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya kabinet wilopo. Akibatnya Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Sukarno membubarkan parlemen.<sup>52</sup>

d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Koalisi PNI dan NU) (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)

Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang disebut juga Ali-Wongsonegoro:

1. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah

---

<sup>52</sup> Ibid hal. 232

2. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum
3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
5. Pelaksanaan politik bebas - aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB
6. Penyelesaian pertikaian politik

Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihindangi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya.

Selain berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, pada masa ini juga terjadi persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat antara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.

Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 18-25 April 1955. Konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid. hal 245

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

Program kerja Kabinet Burhanuddin:

1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
2. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat.

Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Moh. Hatta, jadi setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR diumumkan maka pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10.00 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum.

Kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet Domissioner selama 20 hari yaitu sampai terbentuknya kabinet baru yakni Kabinet Ali – Rum – Idham yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 26 Maret 1956. Setelah itu Eks Perdana Menteri ataupun Menteri lagi sampai kini dalam kabinet mana pun juga dan dimana pun juga.

Prestasi dan Keberhasilan antara lain:

- Mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga dengan menjaga agar

tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi.

- Berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR.
- Berhasil mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat.

Kelemahan Kabinet ini merupakan kabinet koalisi. Sebenarnya kabinet ini masih berjalan baik, hanya presiden kurang merestui kabinet ini, karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah drs. Muh. Hatta. Kekuatan Kabinet adalah: Perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga, menjaga agar jangan terjadi inflasi dan sebagainya. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi. Berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama tahun 1955.

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.<sup>54</sup>

f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Koalisi PNI, Masyumi, dan NU) (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957)

Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini disebut rencana pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut :

1. Menyelesaikan pembatasan hasil KMB

---

<sup>54</sup> Ibid.

2. Menyelesaikan masalah Irian Barat
3. Pembentukan provinsi Irian Barat
4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
5. Pembentukan daerah - daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota- anggota DPRD
6. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai
7. Menyehatkan keseimbangan keuangan negara
8. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional

Program pokoknya adalah :

1. Pembatalan KMB
2. Pemulihan keamanan dan ketertiban
3. Melaksanakan keputusan KAA

Hasil Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah: Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Juanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden. Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan dekritnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin.

g. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

Program kerja Kabinet Djuanda atau juga disebut Kabinet Karya memiliki 5 program yang disebut Pancakarya yaitu:



1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5. Mempercepat pembangunan

Selanjutnya Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kata dekrit berasal dari bahasa latin *decemere* yang berarti mengakhiri atau memutuskan. Kata dekrit, kemudian digunakan untuk menunjukkan adanya perintah dari kepala negara atau kepala pemerintahan untuk mengakhiri atau memutuskan sesuatu yang terkait dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah dekret yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin.<sup>55</sup>

Isinya ialah:

1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
2. Pembubaran Konstituante
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Ada beberapa alasan mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden, yaitu sebagai berikut :

1. Kegagalan konstituante untuk membuat UUD baru meskipun sudah berkali-kali melakukan sidang. Padahal, UUD sangat dibutuhkan sebagai pijakan hukum yang penting dalam melaksanakan pemerintahan.
2. Situasi politik dan ketidakstabilan keamanan dalam negara semakin memburuk.

---

<sup>55</sup> Ibid hal 257.

3. Konflik antarpartai yang terus-menerus terjadi sangat mengganggu stabilitas nasional.
4. Para politisi partai yang saling berbeda pendapat sering bersikap menghalalkan segala cara agar tujuan kelompok / partai tercapai.
5. UUD sementara 1950 dengan penerapan Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
6. Terjadi sejumlah pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia yang semakin mengarah kepada gerakan separatis.

Sisi positif dari adanya dekrit ini adalah :

1. Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 telah memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara.
  2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan.
  3. Merintis pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara (MPRS dan DPAS) yang selama masa Demokrasi Liberal tertunda pembentukannya.
- Peran serta Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia Afrika pertama diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika. Selain sebagai tuan rumah, Indonesia termaksud salah satu negara pemrakarsa Konferensi Asia Afrika. Keempat negara perakarsa lainnya adalah India, Pakistan, Sri Lanka, dan Birma (sekarang Myanmar).<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Roeslan Abdulgani, 2011. THE BANDUNG CONNECTION, Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955. Penerbit Gunung Agung., hal 31.

Peran Indoensia dalam Koferensi Asia Afrika sebagai berikut,

1. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II yang berlangsung tanggal 28-29 Desember 1954 di Bogor (Jawa Barat). Konferensi ini sebagai pendahuluan dari KAA.
2. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA yang berlangsung pada tanggal 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung (Jawa Barat). Dalam konferensi ini beberapa tokoh Indonesia menduduki peranan penting, diantaranya adalah :
  - Ketua Konferensi : Mr. Ali Sastroamidjoyo
  - Sekretaris Jenderal Konferensi : Ruslan Abdulgani
  - Ketua Komite Kebudayaan : Mr. Muh. Yamin
  - Ketua Komite Ekonomi : Prof. Ir. Roseno

#### **D. Politik Luar Negeri Indonesia masa periode Demokrasi Terpimpin 1959-1965.**

- . Peran serta Republik Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Keikutsertaan Indonesia dalam GNB disebabkan kesesuaian prinsip GNB dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia berkeyakinan bahwa perdamaian hanya tercipta apabila tidak mendukung pakta militer atau aliansi militer. Hal ini berarti GNB dianggap paling tepat. Berikut ini peran Indonesia dalam GNB. Indonesia berperan sebagai pelopor berdirinya GNB. Sejak dalam gagasan pembentukan GNB, Indonesia sudah berperan penting.

Bersama Jawaharlal Nehru yang juga pelopor KAA, Presiden Soekarno menggagas pembentukan GNB. Akhirnya

bersama empat pemimpin negara India, Ghana, Yugoslavia, dan Mesir, Indonesia mendeklarasikan berdirinya GNB. Indonesia juga aktif dalam persiapan penyelenggaraan KTT GNB di Beograd.

- **Pembebasan Irian Barat.**

Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Irian Barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Irian Barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Irian Barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.

Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, tetapi tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.

Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jenderal A. H. Nasution pergi ke Moskow, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang.

Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Irian Barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal.<sup>57</sup>

Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov (yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian). Dari jenis pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface jenis AS-1 Kennel.

Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat. Untuk mencapai keunggulan udara, persiapan-persiapan pertama yang dilakukan AURI adalah memperbaiki pangkalan-pangkalan udara yang rusak akibat perang, yang

---

<sup>57</sup> Op.cit. AH Nasution, hal 81.

akan dipergunakan untuk operasi - operasi infiltrasi maupun menghadapi operasi terbuka di daratan Irian Barat.

Dalam perjuangan diplomasi Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Prancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Irian Barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun.

Dalam tekanan bidang ekonomi, pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti:

1. Perusahaan Perkebunan
2. Nederlandsche Handel-Maatschappij
3. Perusahaan Listrik
4. Perusahaan Perminyakan
5. Rumah Sakit (CBZ) menjadi RSCM

Dan kebijakan-kebijakan lain seperti:

1. Memindahkan pasar pelelangan tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat)
2. Aksi mogok buruh perusahaan Belanda di Indonesia
3. Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di wilayah Indonesia
4. Melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda

Dukungan politik dari beberapa negara misalnya, India, Pakistan, Australia, elandia baru, Thailand, Inggris jerman

barat dan juga Perancis. Belanda pun juga mengantisipasi serangan dari Indonesia, sekitar April 1961 dibentuk Dewan Papua oleh Belanda yang memiliki tugas untuk penyelenggaraan penentuan nasib rakyat Irian Barat sendiri. Dengan melakukan beberapa langkah berikut :

1. Menjadikan papua negara boneka, yang memiliki bendera serta lagu kebangsaan sendiri.
2. Mendatangkan kapal induk Karel Doorman yang merupakan kapal perang Belanda untuk berjaga di perairan Irian.
3. Menambah pasukan demi memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Karena hal tersebut konflik bersenjata menjadi sangat sulit untuk di elakkan lagi. Menanggapi hal tersebut, pada 19 desember 1961 di adakan rapat umum di Yogyakarta. Dalam Rapat tersebut presiden Soekarno pun merencanakan sebuah Tri Komando Rakyat atau sering disingkat Trikora. Berikut diantaranya isi Trikora.

1. Gagalakan upaya pembentukan negara Papua
2. Mengibarkan Bender pusaka Merah putih di tanah Irian Barat
3. Bersiap untuk mobilisasi umum demi pertahanan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air.<sup>58</sup>

Menindak lanjuti iri dari rancangan operasi Trikora tersebut, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI, kemudian membentuk sebuah komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada saat itu presiden Soekarno menunjuk Mayor Jendral Suharto menjadi kepala komando Mandala yang resmi dibentuk pada 1 Januari 1962. Komando

---

<sup>58</sup> Ibid. hal 84.

Mandala bermarkas di Makassar dan memiliki tugas untuk melaksanakan Trikora demi membebaskan Irian Barat. Berikut langkah-langkah yang diambil diantaranya:

1. Merencanakan operasi militer,
2. Mempersiapkan operasi militer,
3. melaksanakan operasi militer,
4. Mengobservasi situasi dan juga kondisi militer di wilayah Irian Barat.

Pada Maret hingga Agustus 1962, persiapan dimulai dengan melakukan pendaratan pasukan yang terdiri dari anggota ABRI juga sukarelawan dari laut dan udara. Hal tersebut merupakan bagian dari persiapan melaksanakan operasi militer di wilayah Irian Barat, Komando Mandala telah melakukan tahapan-tahapan perjuangan. Berikut operasi dalam upaya mendukung pembebasan Irian Barat.

1. Operasi Banteng di Kaimana dan Fak-fak
2. Operasi Serigala di Teminabuan dan juga di Sorong
3. Operasi Naga di Merauke
4. Operasi Jatayu di Sorong, Merauke dan juga Kaimana

Dalam tahap persiapan serta infiltrasi militer tersebut, terjadi sebuah insiden pertempuran di Laut Aru pada 15 Januari 1962 yang dilakukan oleh pihak Belanda. Saat kapal perang milik Angkatan Laut Republik Indonesia berjenis *motor torpedo boat* (MTB) Macan Tutul sedang berpatroli di wilayah laut Aru diserang secara terus menerus dan menyebabkan kapal tersebut terbakar dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno. Gerakan tersebut pun tetap dilancarkan hingga pasukan Indonesia berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Irian Barat.

Sesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi



Pembebasan Irian Barat No.1 kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut:

- Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.
- Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau ada unsur kekuasaan/ pemerintah daerah Republik Indonesia.

Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut.

- Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.
- Tahap Eksploitasi (awal 1963),yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.
- Tahap Konsolidasi (awal 1964),yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.<sup>59</sup>

Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan

---

<sup>59</sup> Ibid. hal 86.

menerjungkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjungkan di daerah pedalaman Irian Barat. Penerjungan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, tetapi operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjungan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, tetapi karena keterbatasan kemampuannya, penerjungan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.

Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Pattimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk melakukan penerjungan. Saat persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjungkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenalan teman, dan lokasi titik kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut.

Akhir dari konflik Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.

Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah:

- Belanda akan menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.
- Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.
- Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.
- UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.
- Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Irian Barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui antara lain:
  1. musyawarah dengan perwakilan penduduk Irian Barat
  2. penetapan tanggal penentuan pendapat
  3. perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk
    - tetap bergabung dengan Indonesia; atau
    - memisahkan diri dari Indonesia
  4. hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional.
- Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.

Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Ibu kota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Irian Barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia

membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pengeboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.<sup>60</sup>

Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia. Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, tetapi mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi. Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, tetapi keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya. Setelah Irian Barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:

1. Irian Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda

---

<sup>60</sup> Ibid. hal 88.

2. Belanda berjanji menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar
3. penggabungan Irian Barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda
4. penggabungan Irian Barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.

- **Konfrontasi Indonesia dan Malaysia**

Gagasan pembentukan Federasi Malaysia yang menyatakan Malaya, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah (Kalimantan Utara) pertama kali dilontarkan oleh Perdana Menteri Federasi Malaya Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Maksud dari penggabungan ini adalah untuk mempererat kerjasama antara negara-negara tersebut di bidang politik dan ekonomi. Rencana itu didukung oleh Inggris, karena dengan terbentuknya Federasi Malaysia, Inggris dapat mempertahankan kepentingannya di wilayah itu, antara lain pangkalan militernya di Singapura dan mengamankan modalnya di Kalimantan Utara.<sup>61</sup>

Pada Agustus 1961, Komisaris Jenderal Inggris Lord Selkirk berkunjung ke Jakarta guna memberitahu secara resmi rencana pembentukan Federasi Malaysia. Sikap para pemimpin Indonesia pada umumnya seragam, tidak menolak atau menentang rencana itu. Satu-satunya yang menolak rencana tersebut adalah PKI. Alasannya, pembentukan Federasi Malaysia adalah bentuk neokolonialisme dan sebagai usaha untuk menekan gerakan rakyat di daerah untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai tindak lanjut dari ide pembentukan Federasi Malaysia, pada 23 November 1961, pemerintah

---

<sup>61</sup> Efantino dan Arifin SN. 2009. *Ganyang Malaysia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.Gonggong.. hal 16.

Malaya dan Inggris mengadakan perjanjian yang dikenal dengan nama *Malaysia Accord*. Dalam perjanjian itu disebutkan:

1. Federasi Malayasia akan terdiri dari Negara Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei.
2. Akan dibentuk panitia untuk meninjau pandangan rakyat negara-negara di Kalimantan Utara dan pandangan Sultan Brunei.
3. Perjanjian pertahanan antara Inggris dan Federasi Malaya akan berlaku secara otomatis sejak terbentuknya Federasi Malaysia.
4. Pemerintah Malaysia memberi hak kepada Inggris untuk meneruskan pangkalan militernya di Singapura guna menjaga keamanan negara Federasi Malaysia, negara-negara *commonwealth* pada umumnya dan menjaga keamanan di Asia Tenggara.<sup>62</sup>

Kendati demikian, rencana pembentukan Federasi Malaysia tidak didukung oleh seluruh rakyat. Di Malaya banyak partai yang menolak, terutama partai sayap kiri seperti Malayan Communist Party. Di Serawak, United People's Party juga menolak, bahkan sempat mengirim surat ke PBB. Di Singapura, Barisan Sosialis dan United People's Party tidak mendukung masuknya Singapura ke dalam Federasi Malaysia.

Oposisi hebat muncul di Brunei, Partai Rakyat pimpinan Azahari Muhammad yang memenangkan pemilihan umum tahun 1962, menolak pembentukan Federasi Malaysia. Ia menginginkan pemerintahan sendiri dan kemerdekaan bagi seluruh Kalimantan Utara. Mereka juga mengharapkan bantuan Indonesia. Penolakan itu bahkan sempat memunculkan pemberontakan terhadap Inggris. Sultan Brunei sendiri menolak gagasan penggabungan itu, karena masalah-masalah

---

<sup>62</sup> Ibid. hal 21.

keuanganIbid. Hal 23.n yang belum terselesaikan.<sup>63</sup>

Penolakan sultan mengakibatkan Brunei tetap menjadi wilayah jajahan Inggris dan baru merdeka pada tahun 1984.Sementara itu, pada 13 Februari 1963, Soekarno mengambil keputusan untuk menolak pembentukan Federasi Malaysia. Perang kata-kata antara Jakarta dan Kuala Lumpur berlangsung sejak bulan April 1963, ketika Soekarno untuk pertama kalinya mengecam pembentukan Federasi Malaysia pada Konferensi Wartawan Asia-Afrika.

Soekarno mengecam pembentukan Federasi Malaysia di Konferensi Wartawan Asia-Afrika 1963.Pada 9 Juli 1963, di London, Perdana Menteri Malya Tunku Abdul rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Penandatanganan itu menambah tegang situasi antara kedua negara.Mekipun penandangan dokumen pembentukan Federasi Malaysia telah dilakukan, konferensi antara tiga kepala negara (Filipina, Indonesia, dan Malaysia) tetap berlangsung pada 30 Juli-5 Agustus 1953. Konferensi yang berlangsung dalam ketegangan itu menghasilkan tiga dokumen yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama.

Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan sepakat meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan dalam Federasi Malaysia. Pasal 10 dari Persetujuan Manila menyatakan Indonesia menyambut baik pembentukan Federasi Malayisa jika didukung oleh rakyat di Kalimantan Utara dan dukungan itu adalah hasil penyelidikan oleh pihak yang bebas dan tidak memihak.<sup>64</sup>

Pasal 11 Persetujuan Manila antara lain menyatakan kesanggupan Malaya untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Inggris dan pemerintah Kalimantan Utara serta

---

<sup>63</sup> Ibid. hal 22.

<sup>64</sup>

meminta Sekjen PBB untuk menyelidiki kehendak rakyat Kalimantan Utara. Berdasarkan perjanjian itu Sekjen PBB menunjuk sembilan anggota Sekretariat PBB menjadi anggota Tim PBB untuk masalah Malaysia yang dipimpin oleh Laurence V. Michelmore.

Akan tetapi, Perjanjian Manila dilanggar setelah keluarnya pengumuman dari Kuala Lumpur dan London bahwa Malaysia tetap akan diproklamasikan pada 16 September 1963. Pemerintah Inggris dan Perdana Menteri Maya telah bertekad tetap akan membentuk negara Federasi Malaysia apapun hasil dari penyelidikan PBB. Soebandrio (Menteri Luar Negeri Indonesia), Salvador Ponce Lopez (Menteri Luar Negeri Filipina) sepakat menentang pembentukan Federasi Malaysia.

Indonesia dan Filipina dengan keras menentang hal itu. Namun, proklamasi Federasi Malaysia tetap dilaksanakan pada 16 September 1963, sebelum tim PBB menyampaikan laporan penyelidikannya. Pemerintah RI menilai tindakan Malaysia merupakan pelanggaran terhadap PBB dan pernyataan bersama Tiga Kepala pemerintahan itu. Soekarno sendiri memandang tindakan yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman sebagai *act of bad faith*. Esok harinya pada 17 September 1963, pemerintah Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur.

Situasi semakin panas setelah rakyat di Jakarta mengadakan demonstrasi terhadap Kedutaan Besar Malaya dan Inggris di Jakarta. Keesokan harinya, demonstrasi balasan diadakan di depan Kedubes Indonesia di Kuala Lumpur. Demonstran di Malaysia mengutuk aksi yang terjadi di Jakarta. Pada 21 September 1963, Pemerintah RI juga memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah. Bahkan salah satu program Kabinet Kerja (13 November 1963-27 Agustus 1964) adalah pengganggangan Malaysia.

Penolakan Indonesia semakin keras, setelah melancarkan konfrontasi dengan mengirim sukarelawan untuk



membantu rakyat Kalimantan Utara melawan Inggris. Usaha-usaha untuk memecahkan permasalahan sebenarnya sempat dilakukan. Di antaranya pertemuan Menteri Luar Negeri ketiga negara di Bangkok pada 5-10 Februari 1964 dan 3-6 Maret 1964. Sayangnya pertemuan itu tidak menghasilkan sesuatu yang positif karena perbedaan pemikiran pemimpin negara-negara tersebut.

Di tengah situasi genting, pada 3 Mei 1964, Soekarno menyerukan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang berisi:

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.<sup>65</sup>

Sejak dikumandangkannya Dwikora, konfrontasi bersenjata antara kedua belah pihak pun secara resmi dimulai. Gerilyawan Indonesia berusaha masuk ke daerah Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara dan melancarkan operasi-operasi militer. Pihak Indonesia menyatakan bahwa Dwikora bukan untuk melawan rakyat Malaysia melainkan untuk mengganyang negara boneka Malaysia. Pernyataan tersebut sebagai respon dari gugatan Malaysia yang disampaikan di PBB bahwa Indonesia melanggar wilayah kedaulatannya.

Ketegangan politik dan militer di Asia Tenggara menarik perhatian negara-negara besar dunia. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengirimkan Jaksa Agung Robert Kennedy untuk menemui ketiga kepala negara dan mengajak untuk mengambil langkah perundingan. Lakhah Kennedy untuk melakukan mediasi juga diikuti Perdana Menteri Jepang Ikeda dan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman.

Untuk mengusahakan mediasi, diadakan pertemuan

---

<sup>65</sup> Ibid. hal. 24.

tingkat menteri luar negeri ketiga negara di Tokyo pada 5 Juni 1964. Pertemuan itu mencapai puncaknya pada 20 Juni 1964. Sempat terjadi kesepakatan antara ketiga negara dalam membentuk suatu komisi konsiliasi yang beranggotakan wakil-wakil negara Malaysia, Filipina, dan Indonesia (Maphilindo) ditambah seorang wakil dari negara Asia lainnya sebagai ketua.

Usaha rekonsiliasi ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan, justru kondisi semakin panas setelah tersiar kabar bahwa ada usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Soekarno menanggapi hal itu dalam pidatonya pada tanggal 31 Desember 1964 “Oleh Karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang.”

Pada 31 Desember 1964, wakil tetap Indonesia di PBB menyampaikan isi pidato presiden kepada Sekretaris Jenderal PBB dan mengharapakan agar anggota PBB mengusahakan Indonesia untuk tetap tinggal dalam PBB. Akan tetapi Indonesia tidak mencapai hasil yang diinginkannya. Satu minggu setelah pidato Presiden Soekarno, 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Merespon hal itu, Presiden Soekarno dalam pidato tanggal 7 Januari 1965 mengatakan, Sekarang karena ternyata Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan, saya menyatakan, Indonesia keluar dari PBB.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Indonesia bukan hanya tidak hadir dalam sidang dan pertemuan, melainkan benar-benar keluar dari PBB, tidak lagi menjadi anggota. Ditambahkan pula bahwa keluarnya Indonesia dari badang-badan khususnya, yaitu UNESCO, UNICEF, dan FAO.

Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB diberitahukan secara resmi dengan surat oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio pada 20 Januari 1965 yang menyebutkan

bahwa keluarnya Indonesia dari organisasi dunia itu terhitung mulai tanggal 1 Januari 1965. Sekretaris PBB U Thant, dalam surat jawabannya tertanggal 26 Januari 1965 menyatakan penyesalannya atas keputusan itu dan mengharapkan supaya Indonesia pada suatu hari akan kembali melakukan kerjasama dalam PBB. Sebagai wujud keseriusannya, presiden Soekarno menolak bantuan ekonomi Amerika Serikat bagi Indonesia pada 25 Maret 1965.

Di samping surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Soekarno juga menulis surat kepada beberapa kepala negara untuk menjelaskan kondisi dan alasan Indonesia keluar dari badan dunia itu. Setelah Indonesia keluar dari PBB, untuk meningkatkan konfrontasi, pada 28 Februari 1965 dibentuk Komando Siaga (Koga) yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan pasukan ABRI dan sukarelawan di perbatasan.

Setelah peristiwa G-30 S PKI, konfrontasi tidak mengendur bahkan ditingkatkan dengan dibentuknya Komando Ganyang Malaysia (Kogam) pada 23 Januari 1965. Pada sidang Kogam kedua, Maret 1966, ditetapkan kebijakan untuk meningkatkan kegiatan mengganyang Malaysia.

Pada masa Orde Baru, politik konfrontasi diakhiri, diganti dengan politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan. Setelah keluar Surat Perintah 11 Maret 1966, Mayor Jenderal Soeharto sebagai pengemban surat perintah, tidak menginginkan konfrontasi dilanjutkan, karena menurutnya tidak bermanfaat.

Isyarat untuk damai semakin jelas setelah diselenggarakan perundingan di Bangkok pada 30 April-1 Juni 1966 antara Menlu Indonesia Adam Malik dan Menlu Filipina Narciso Ramos. Mereka sepakat untuk menggunakan Perjanjian Manila tahun 1963 sebagai landasan untuk menyelesaikan konfrontasi. Perundingan untuk menyelesaikan konfrontasi diselenggarakan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966. Delegasi RI dan delegasi Malaysia sepakat bahwa

masalah Sabah dan Serawak tidak menjadi syarat normalisasi hubungan kedua negara. Delegasi RI setuju untuk tidak membahas masalah Sabah serta Serawak dan lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian konfrontasi dan pemulihan hubungan. Kedua delegasi sepakat untuk kembali pada Perjanjian Persahabatan RI-Malaya tahun 1957 dan Perjanjian Manila tahun 1963.

Setelah perundingan Bangkok, diadakan pertemuan-pertemuan tidak resmi untuk mencari kesepakatan. Salah satu pertemuan itu adalah perundingan antara Ghazali Syafei dan Mayjen Soeharto di Jakarta pada 10 Juni 1966. Pertemuan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang beberapa hal dari hasil persetujuan Bangkok. Perundingan tersebut juga bertujuan untuk menyiapkan pertemuan kedua antara Menteri Luar Negeri Aadam Malik dan Tun Abdul Razak.

Pada 18 Juli 1966, delegasi Indonesia kembali bertemu Perdana Menteri Malaysia. Dalam perundingan tersebut disepakati masalah Sabah dan Serawak. Indonesia mengakui Sabah dan Serawak sebagai bagian dari Malaysia dan mengakui Malaysia jika pemilu telah dilaksanakan di wilayah tersebut. Pemulihan hubungan semakin mendekati kenyataan setelah Kogam menyetujui hasil-hasil perundingan Bangkok tanggal 30 juli 1966. Sementara itu, pemerintah Filipina memberikan pengakuan diplomatik penuh kepada Malaysia pada 3 Juni 1966.

Normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia dituangkan dalam Piagam *Agreement to Normalise Relations between Malaysia and the Republic of Indonesia*. Piagam itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Gedung Departemen Luar Negeri RI.

Dengan penandatanganan persetujuan itu itu, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia berakhir. Dalam persetujuan tersebut kedua belah pihak setuju untuk memberi kesempatan kepada rakyat Sabah dan Serawak untuk menegaskan kembali

statusnya melalui pemilihan umum. Kedua negara juga sepakat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan permusuhan sejak ditandatangani persetujuan.

Keesokan harinya, 12 Agustus 1966, Menlu Adam Malik mengunjungi Malaysia menandai berakhirnya konfrontasi antara kedua negara. Kemudian sejak tanggal 31 Agustus 1966, kedua pemerintahan membuka kembali hubungan diplomatik. Akan tetapi penandatanganan persetujuan tidak otomatis menghilangkan suasana konfrontasi di Kalimantan Utara. Sampai bulan September 1966 di sana masih terjadi kontak senjata antara pasukan Inggris dan gerilyawan Indonesia. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sesudah penandatanganan piagam, hubungan antara Indonesia dan Malaysia semakin erat sehubungan dengan dibentuknya Association of South East Asia Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967.

Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Lama masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini Indonesia terkenal mendapat sorotan tajam oleh dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di kancah internasional tetapi ide-ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi panutan beberapa negara pada saat itu. Masa orde lama merupakan titik awal bagi Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negerinya.

Dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Hatta dan beliau juga yang mengemukakan tentang gagasan pokok non-Blok. Gerakan non-Blok merupakan ide untuk tidak memihak antara blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang diwakili oleh USSR. Perang ideologi antara kedua negara tersebut merebah ke negara-negara lain termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara pencetus non-Blok dan menjadi negara yang paling aktif dalam menyuarakan anti memihak antara kedua blok tersebut. Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar negerinya independen (bebas) dan aktif yang hingga kini kita

kenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia merupakan salah satu negara yang berani keluar dari PBB dalam menyatakan keseriusan sikapnya.

Namun nyatanya pada masa orde lama Indonesia tidak menerapkan sepenuhnya politik bebas aktif yang dicetuskannya. Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu cenderung berporos ke Timur dan dekat dengan negara-negara komunis seperti Cina dan USSR dibandingkan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Presiden Soekarno juga menetapkan politik luar marcusuar dimaana dibuat poros Jakarta-Peking-Phyongyang. Hal ini menyulut kontrofersi dimata dunia internasional, karena Indonesia yang awalnya menyatakan sikap sebagai negara non-Blok menjadi berpindah haluan. Hal ini membuat tidak berjalan dengan efektifnya politik luar negeri bebas aktif saat itu.

## **BAB IV**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA PRESIDEN SOEHARTO**

#### **A. Profil Presiden Soeharto.**

Pada 8 Juni 1921, Soeharto dilahirkan oleh ibunya, bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun bersalin bernama Mbah Kromodiryo yang juga adik kakek Sukirah, Mbah Kertoirono. Dalam otobiografinya *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya* yang disusun G. Dwipayana, Sukirah digambarkan oleh Soeharto sebagai ibu muda yang sedang sulit memikirkan masalah-masalah rumah tangga. Namun, banyak catatan di buku-buku sejarah Soeharto lain yang banyak menyebutkan Sukirah sedang mengalami problem mental yang sangat sulit. Sebelum Soeharto (yang lahir 8 Juni 1921) berumur 40 hari, Sukirah harus menghadapi talak cerai suaminya, Kertosudiro.<sup>66</sup>

Kertosudiro, seorang mantri *ulu-ulu* (pengatur irigasi) miskin yang kelak sebagai ayah Soeharto, tidak memainkan peran banyak dalam kehidupan Soeharto. Bahkan, banyak pengamat Soeharto, seperti R.E. Elson, beberapa biografer dan orang dekatnya, termasuk Mantan Menteri Penerangan yang dekat dengan Soeharto, Mashuri, meyakini bahwa Kertosudiro bukanlah ayah kandung Soeharto. Pada tahun 1974, pernah muncul pemberitaan yang menghebohkan dari majalah gosip bernama 'POP' dengan liputan yang menurunkan kisah lama yang beredar bahwa Soeharto adalah anak dari Padmodipuro, seorang bangsawan dari trah Hamengkubowono II. Soeharto

---

<sup>66</sup> Op.cit, Setyohadi,Tuk, Hal 71.

kecil yang berumur 6 tahun dibuang ke desa dan diasuh oleh Kertosudiro.

Hal ini kemudian dibantah keras oleh Soeharto. Dengan separuh murka, Soeharto mengadakan konferensi pers di Bina Graha bahwa liputan mengenai asal usul dirinya yang anak bangsawan bisa saja merupakan tunggangan untuk melakukan subversif. Soeharto dengan caranya sendiri ingin mengesankan bahwa dia adalah anak desa. Ketidakjelasan asal usul Soeharto secara genealogi sampai sekarang masih belum terpecahkan. Namun, dari semua itu, bayi Soeharto berada di dunia dengan kondisi keluarga yang kurang menguntungkan. Sukirah yang tertekan dan senang bertapa pernah ditemukan hampir mati di suatu tempat karena memaksa dirinya berpuasa *ngebleng* (tidak makan dan minum selama 40 hari) di suatu tempat yang tersembunyi, dan hilangnya sempat pernah membuat panik penduduk desa Kemusuk sehingga para penduduk mencarinya. Sadar dengan kondisi Sukirah yang kurang baik, keluarga Sukirah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengurusan bayi Soeharto kepada kakak perempuan Kertosudiro. Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai tujuh anak, termasuk putra kedua, Probosutedjo.

Soeharto menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah, anak KRMT Soemoharyomo. Soemoharyomo adalah seorang Wedana di Solo. Perkawinan Letnan Kolonel (Letkol) Soeharto dengan Siti Hartinah (yang kemudian dikenal dengan Tien Soeharto) dilangsungkan pada 26 Desember 1947 di Solo. Ketika itu, usia Soeharto 26 tahun, sedangkan Siti Hartinah berusia 24 tahun. Pasangan ini dikarunia enam putra-putri, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Harijadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).<sup>67</sup>

Masa kecil dan pendidikan Soeharto tidak seperti anak

---

<sup>67</sup> Ibid. hal 73



desa lainnya yang harus bekerja di sawah. Dalam usia yang sangat muda, ia disekolahkan oleh Kertosudiro.[12] Tidak ada berita-berita mengenai masa Soeharto di Sekolah Rakyat (setingkat SD). Kesan Soeharto pada masa SD itu hanya pada ingatannya tentang kerbau-kerbaunya. Dunia Soeharto hanya berkuat pada penggembalaan kerbau, jauh dari cerita-cerita anak yang didapat dari buku-buku yang kerap dibaca anak-anak SD. Hal ini berbeda misalnya dengan cerita Soekarno sewaktu dia masih di SD yang banyak berkisah tentang masa sekolahnya dan apa yang dibacanya, begitu juga dengan Hatta dan Sjahrir yang sejak kecil sudah akrab dengan Karl May atau cerita dari novel-novel Charles Dickens.

Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia delapan tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di Sekolah Dasar (SD) di Desa Puluhan, Godean. Lalu, pindah ke SD Pedes (Yogyakarta) lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono, pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawirowihardjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawirowihardjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya.

Kegemaran bertani tumbuh selama Soeharto menetap di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian. Sepulang sekolah, Soeharto belajar mengaji di langgar bersama teman-temannya, bahkan dilakukan sampai semalam suntuk. Ia juga aktif di kepanduan Hizbul Wathan dan mulai mengenal para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari sebuah koran yang sampai ke desa. Setamat Sekolah Rendah (SR) empat tahun, Soeharto disekolahkan oleh

orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Hardjowijono. Hardjowijono adalah teman ayahnya yang merupakan pensiunan pegawai kereta api. Hardjowijono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri waktu itu.<sup>68</sup>

Karena sering diajak, Soeharto sering membantu Kiai Darjatmo membuat resep obat tradisional untuk mengobati orang sakit. Soeharto kembali ke kampung asalnya, Kemusuk, untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu dilakukannya karena di sekolah itu siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki (sepatu).

Setamat SMP, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya yang lain tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana ke mari, tetapi gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana, ia diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah Bank Desa (Volk-bank). Tidak lama kemudian, dia minta berhenti.

Suatu hari pada tahun 1942, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Ia mendaftarkan diri dan diterima menjadi tentara. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemusuk. Justru di sinilah, karier militernya dimulai.

Ketika penjajahan Jepang dimulai, Soeharto bergabung di PETA. Setelah berakhirnya perang mempertahankan kemerdekaan, Soeharto tetap menjadi pemimpin di Brigade Garuda Mataram memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan Andi Azis di Sulawesi. Dia juga ikut serta di

---

<sup>68</sup> Ibid, hal. 76.

serangan umum. Di usia 32 tahun, Soeharto diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro di Semarang. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel.

Ketika peristiwa PKI, Mayor Jenderal Soeharto segera berusaha untuk menangani Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas anaknya. Pada tanggal 3 Oktober 1965, Mayjen Soeharto diangkat menjadi Kopkamtib dimana jabatan ini memiliki kewenangan besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku Peristiwa G-30-S/PKI.<sup>69</sup>

Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, beberapa pasukan Tjakrabirawa yang berada di bawah komando Letnan Kolonel Untung Syamsuri membunuh enam orang jenderal. Keputusan yang diambil Soeharto untuk menertibkan negara adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya rencana ini sempat ditentang Presiden Soekarno meskipun bertujuan untuk menertibkan keadaan Indonesia di waktu itu. Tindakan pembersihan pada orang-orang yang menganut komunis dengan cara melakukan penghukuman mati pada orang-orang yang terduga anggota Partai Komunis di Indonesia yang kira-kira mencapai lima ratus ribu orang. Setelah kejadian Gerakan 30 September 1965, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bersalah dan melakukan operasi untuk menumpasnya. Menurut dokumentasi sejarah operasi ini memakan korban sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa.

Soeharto segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya segera setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965. Pada tanggal 11 Maret 1966, dia menerima Surat Perintah Sebelas Maret atau yang biasa kita kenal dengan Supersemar dari Presiden Soekarno. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Menpangad Letjen

---

<sup>69</sup> Op.cit, AH Nasution, hal 83.

Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena kondisi politik tanah air yang kacau dan parah setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS dilaksanakan pada bulan Maret 1967. Sidang menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden berdasarkan pada tanggal 22 Februari 1967 hingga terpilihnya presiden yang sah oleh MPR hasil pemilihan umum.<sup>70</sup>

Soeharto menjadi presiden ke II sesuai hasil Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968. Soeharto juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan selain sebagai presiden. Berkuasanya Soeharto ini dikenal istilah Orde Baru. Setelah menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR pada 23 Maret 1973 untuk jabatan yang kedua kali. Kali ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menjadi wakil presiden.

Pada tanggal 22 Maret 1978, Soeharto dilantik lagi menjadi presiden untuk periode ketiga kalinya. Kini Adam Malik yang menjabat sebagai wakil presiden. Tidak cukup dua kali, sidang Umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih lagi Soeharto sebagai presiden. Bukan Adam Malik, kini Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR resmi mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada 1 Januari 1984, Presiden Soeharto ia resmi menjadi anggota Golkar.

Banyak pengamat politik baik dalam luar dan dalam negeri yang berpendapat bahwa Soeharto membersihkan semua unsur parlemen dari tangan komunis. Contoh tindakannya seperti meningkatkan sensor dan menyingkirkan serikat buruh. Untuk hubungan luar negeri, Soeharto juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok lalu mulai mengakrabkan diri dengan negara barat dan PBB. Soeharto terlalu dominan untuk menentukan semua keputusan

---

<sup>70</sup> Ibid. hal 85.

politik.

Pada 1997, 20 sampai 30 persen dari anggaran pengembangan Indonesia telah disalahgunakan dalam waktu yang lama. Krisis finansial yang terjadi di benua Asia pada tahun yang sama juga tidak membawa hal bagus untuk pemerintahan Soeharto. Waktu dia dipaksa meminta pinjaman, hal ini juga termasuk perlunya pemeriksaan mendetail dan menyeluruh dari IMF. Setelah beberapa kerusuhan, demonstrasi, tekanan politik dan militer dan puncaknya pada peristiwa pendudukan gedung DPR/MPR RI. Di peristiwa Mei 1998 inilah Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 untuk menghindari ketidakstabilan dan perpecahan di Indonesia.

Dalam pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 tahun, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan contohnya seperti pelanggaran HAM dan korupsi. Dua hal ini adalah faktor kenapa era Soeharto berakhir. Tapi, Direktur IMF waktu itu mengakui bahwa prosedur yang dilakukan IMF di Indonesia hanyalah katalisator jatuhnya Pemerintahan Soeharto. Presiden Soeharto lalu menyerahkan jabatan presiden kepada seorang teknokrat jenius bernama Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melakukan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie secara resmi menjabat sebagai presiden ke-3 RI.

Tak berselang terlalu lama, Wiranto yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI membacakan pernyataan sikap untuk menstabilkan kondisi negara. ABRI mendukung permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta mendukung Wakil Presiden Bapak BJ Habibie sebagai Presiden RI. Kedua, ABRI menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia untuk menerima keinginan Presiden Soeharto tersebut yang sudah sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, yakni Pasal 8 UUD 1945. Ketiga, ABRI akan tetap berperan untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Keempat, ABRI akan tetap

menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden. Kelima, ABRI menghimbau agar bersikap tenang untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan aksi kekerasan yang akibatnya akan merugikan masyarakat sendiri.

Pada tanggal 27 Januari 2008 di pukul 13.10, Soeharto menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Pada pukul 14.35, jenazah Soeharto diberangkatkan dari RSPP ke kediamannya di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta. Kemudian dari Jalan Cendana, jenazah Soeharto diberangkatkan ke Bandara Halim Perdanakusuma pada pukul 07.30. Selanjutnya jenazah Soeharto akan diterbangkan dari Bandara ke Solo pada pukul 10.00 WIB untuk kemudian dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo pada hari Senin. Jenazah sampai di Astana Giri Bangun di siang hari sebelum pukul 12.00 WIB. Jenazah lalu diturunkan ke kuburan pada pukul 12.15 WIB. Almarhum sudah berada di liang lahat siang itu pada pukul 12.17 WIB. Semua prosesi pemakaman presiden kedua tersebut dipimpin oleh inspektur upacara Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai presiden.

Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia. Dia lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008 di usia 86 tahun. Dia menggantikan Soekarno. Di masyarakat internasional, khususnya di dunia barat, Soeharto sering dipanggil dengan julukan “The Smiling General” atau dalam bahasa Indonesia yang berarti Sang Jenderal yang Tersenyum karena raut mukanya yang terbiasa tersenyum. Meski raut mukanya sering tersenyum, ia juga sering disebut dengan diktator.

Sebelum dia menjadi presiden, Soeharto merupakan pemimpin militer pada era masa penjajahan Belanda di Indonesia dan Jepang. Pangkat terakhirnya adalah Mayor Jenderal. Setelah PKI berhasil ditumpas, Soeharto lalu mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Dan dia resmi

menjadi presiden pada tahun 1968. Berturut-turut dia dipilih lagi menjadi presiden oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatan Soeharto berakhir setelah dia mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh banyak mahasiswa. Soeharto tercatat sebagai orang terlama yang menjabat sebagai presiden Indonesia. Setelah Soeharto lengser, dia digantikan oleh B.J. Habibie. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun. Pada masa pemerintahannya sebagai presiden, Soeharto memiliki banyak kontroversi akan cara kepemimpinannya yang bersifat kediktatoran.

### **B. Arah Kebijakan Luar negeri Presiden Soeharto.**

Dalam bidang politik luar negeri, penyelewengan terhadap politik bebas-aktif telah terjadi dengan dicetuskannya Manifesto Politik Republik Indonesia. Untuk menghindari terulangnya kembali pengalaman pahit masa lampau itu, tugas dan kewajiban politik luar negeri Orde Baru adalah mengkoreksi semua penyelewengan pada masa Demokrasi Terpimpin. Berdasarkan kenyataan itu, MPRS (kemudian MPR) sebagai lembaga kenegaraan tertinggi telah menegaskan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Landasan politik luar negeri adalah sebagai berikut.

- Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan kembali Landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
- Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966

- Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.<sup>72</sup>
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN.<sup>73</sup>

Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, Politik Luar Negeri Indonesia secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Sesuai dengan kepentingan Nasional, politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak pada salah satu blok ideologi yang ada. Politik bebas dan aktif bukanlah politik yang netral, melainkan suatu politik luar negeri yang tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer. Tujuannya ialah mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperealisme dalam segala bentuk manifestasinya.

Sejak tahun 1967, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif telah diterapkan secara konkret dalam menanggapi masalah-masalah Internasional yang timbul, seperti masalah Vietnam, Timur Tengah, dan lain-lain. Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dituntut oleh realitas yang ada di dunia luar.<sup>74</sup> Sikap pemerintah Indonesia telah memperoleh pengertian positif dari dunia luar.<sup>75</sup> Pengertian kepercayaan luar negeri terhadap kebijakan Kabinet Ampera, telah digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional.

Sesuai dengan strategi nasional dalam subbidang luar negeri, pemerintah berusaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan luar negeri yang terputus atau beku akibat politik konfrontasi. Selama pemerintah Demokrasi Terpimpin,

---

<sup>72</sup>Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1968

<sup>73</sup>Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973

<sup>74</sup>Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, 1989, hal. 165

<sup>75</sup>Departemen Penerangan, *Pidato Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna 12 Desember 1967*, hal. 11



kebijakan politik luar negeri lebih condong berhubungan dengan negara-negara sosialis atau negara negara yang termasuk golongan *Nefos*. Akan tetapi, dengan lahirnya Orde Baru (1966), kebijakan yang membatasi ruang gerak Indonesia di forum Internasional itu dievaluasi, sesuai dengan tuntutan dan tujuan UUD 1945.

Karena politik Konfrontasi dengan Malaysia, Singapura dan Inggris tidak sesuai dengan dasar politik bebas dan aktif, politik konfrontasi pun diakhiri, dan kemudian diganti dengan politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai yang saling menguntungkan. Dalam hal ini pemerintah berpegang teguh pada ketetapan dan Nota politik MPRS tahun 1966 dan 1968 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pancasila.

Konfrontasi dengan Malaysia berakhir setelah tercapainya Persetujuan Bangkok, pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1966 antara Tun Abdul Razak dan Adam Malik pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta ditandatangani persetujuan untuk menormalisasi hubungan bilateral Indonesia – Malaysia. Sejak 31 Agustus 1967, kedua pemerintah telah membuka hubungan diplomatik pada tingkat kedutaan besar.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni 1966, Republik Indonesia dengan resmi mengakui Republik Singapura. Pengakuan itu selanjutnya disusul dengan pelaksanaan hubungan diplomatik yang ditandatangani pada tanggal 7 September 1967 oleh kedua Menteri Luar Negeri. Sebaliknya, hubungan dengan RRC dan Kuba akibat peristiwa G30S/PKI masih mengalami ketegangan . Hubungan diplomatik RI – RRC kemudian pada tanggal 30 Oktober 1967 dibekukan, dan KBRI di Peking ditutup untuk waktu yang ditentukan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Bantarto, Bandoro, 1994, *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*, Jakarta: CSIS, hal 34.

Berakhirnya politik konfrontasi juga berarti putusnya poros Jakarta – Phnompenh – Hanoi – Peking – Pyongyang (Beijing). Oleh karena itu, hubungan dengan Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya diarahkan untuk mengusahakan terciptanya pengertian baik dengan negara-negara tersebut.

Mengingat kepentingan nasional semakin mendesak, Indonesia merasa perlu secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan badan-badan Internasional. Panitia musyawarah DPR GR mengadakan rapat pada tanggal 13 Juni 1966 untuk membahas resolusi anggota DPR GR Komisi C (Hankam – Luar Negeri). Resolusi tersebut mendesak kepada pemerintah supaya Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB sebelum persidangan umum badan dunia itu dimulai pada tahun 1966. Sebagai dasar pertimbangan disebutkan bahwa selama menjadi anggota badan dunia itu sejak 1950 – 1964, Indonesia telah Memperoleh banyak manfaatnya. Setelah itu meninggalkan PBB sejak 1 Januari 1965, Indonesia kembali aktif di PBB pada 28 September 1966.<sup>77</sup> Tindakan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai negara, seperti Aljazair, Jepang, Filipina, Pakistan, Mesir, dan Thailand.

## **1. Kerjasama Regional ASEAN**

Menjelang berakhirnya konfrontasi pada tahun 1966, pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara makin merasakan perlunya membentuk suatu kerja sama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan social ekonomi di kawasan Asia tenggara. Pada tanggal 5-8 agustus 1967 di Bangkok dilangsungkan pertemuan menteri luar negeri dari 5 negara yakni Indonesia (Adam Malik, menteri utama urusan politik/menteri luar negeri RI), Malaysia (Tun Abdul Razak, wakil perdana menteri pertahanan dan menteri pembangunan nasional Malaysia), Singapura (S. Rajaratman, menteri luar

---

<sup>77</sup>H. Roeslan Abdulgani, 25 *Tahun Indonesia-PBB*, 1971, hal. 14

negeri singapura), Fillipina (Narciso Ramos, menteri luar negeri Filipina) Thailand (Thanat Khoman, menteri luar negeri Thailand). Sebagai hasil pertemuan pada tanggal 8 agustus 1967 itu ditanda tangani suatu deklarasi yang diberi nama *Bangkok Declaration* yang merupakan perseujuan kebulatan tekad kelima negara itu untuk membentuk sebuah organisasi kerjasama regional yang disebut ASEAN.

Bergabungnya Indonesia dengan ASEAN tidak berarti telah menyeleweng dari kebijakan politik bebas aktif ASEAN bukan merupakan suatu pakta militer seperti SEATO. Dengan berdirinya ASEAN di harapkan negara-negara anggotanya dapat membentuk suatu pandangan politik yang sama atau setidaknya-tidaknya paralel dalam menanggapi persoalan-persoalan di dalam maupun diluar negeri ,tanpa mengikatkan diri dalam suatu pakta militer. Hal ini tidak berarti kerja sama di bidang politik atau militer di antara negara ASEAN tersisihkan atau tidak dianggap penting.

Meskipun ASEAN bukan blok politik ,atau suatu persekutuan militer atau pengelompokan keamanan, organisasi regional itu tidak menghalangi suatu bentuk kerja sama bilateral diantara anggotanya, sekalipun dalam rangka *military corporation* contohnya Malaysia dan Thailand bekerja sama dalam usaha penumpasan gerombolan komunis disepanjang perbatasan kedua negara.<sup>78</sup>

Sebagai organisasi Regional yang baru tumbuh, ASEAN tidak luput dari berbagai cobaan berat yang berasal dari masalah intraregional antara lain masalah Sabah antara Malaysia dan Filipina. Sengketa Sabah sangat serius dan mengkhawatirkan yang berakhir dengan putusnya hubungan diplomatik Malaysia dan Filipina. Guna tetap memelihara

---

<sup>78</sup> Pradana, Hafid Adim. 2016. “Persepsi Soeharto dan Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Cina pada Awal Orde Baru” dalam *Indonesian Prespective* Vol. 1 No. 1. Hal. 3.

keutuhan ASEAN, Indonesia berusaha keras untuk menengahi sehingga masalah sengketa politik yang sensitif itu dapat diatasi.

Dalam perkembangannya, ASEAN banyak bergiat dalam bidang politik ,akan tetapi yang paling menonjol adalah produk Deklarasi Kuala Lumpur 27 November 1971, yang berisi pernyataan kelima menteri luar negeri ASEAN mengenai Asia tenggara sebagai ZONE OF PEACE, FREEDOM, AND NEUTRALITY (ZOPFAN), bebas dari segala bentuk campur tangan pihak luar.

Usaha memperkuat ASEAN pada mulanya berjalan lamban karena kerja sama regional itu merupakan soal yang baru. Sikap sinisme dan keraguan terhadap ASEAN tidak hanya dari negara-negara luar, tetap juga dari kalangan interagional sendiri kiranya masih di perlukan waktu cukup lama untuk memadukan kepentingan nasional anggota nya dengan kepentingan regional keseluruhan.<sup>79</sup> Periode orientasi ini berlangsung dari 1967-1969.

Dalam proses perkembangannya, tahun 1969-1974 merupakan tahap konsolidasi bagi ASEAN. Rasa solidaritas yang timbul antar anggota dan jatuh bangunnya organisasi yang memiliki timbal balik terhadap maju mundurnya anggota. ASEAN telah mendapatkan pengakuan dari negara luar sebagai suatu kekuatan organisasi regional Asia Tenggara, yang menjadi suatu kekuatan ekonomi yang mendapat tempat di wilayah pasifik, MEE, Jepang, dll.

Dalam bidang sosial budaya telah mencapai kemajuan yang cukup besar yaitu dengan dibentuk suatu Panitia Tetap Sosial Budaya pada tahun 1972. Proses konsolidasi di bidang ekonomi, sosial-budaya telah memberikan pengaruh positif terhadap timbulnya dialog dan kerja sama multilateral yang terarah di luar ASEAN. Misalnya dalam bidang diplomatic di PBB ketika menghadapi keanggotaan RRC pada badan dunia

---

<sup>79</sup>Departemen Luar Negeri, 10 Tahun Politik Luar Negri Orde Baru, hlm.4

itu. Begitu juga kerja sama politik di antara negara ASEAN sendiri yang telah mencapai kata sepakat, dan menghasilkan Deklarasi Kualar Lumpur 1971, yang berisi:

- Kawasan rantau Asia Tenggara hendaklah menjadi sebuah zona yang aman dan selamat.
- Mengadakan hubungan baik dengan semua kuasa termasuk Kuasa-kuasa Besar tanpa mengira ideologi politik mereka.
- ASEAN hendaklah mengamalkan dasar berkecuali.

Pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN ke tujuh di Jakarta, 9 Mei 1974, Presiden Soeharto mengatakan ASEAN tidak mengabdikan kepada kepentingan kekuatan asing, dan juga tidak menjalankan politik untuk memusuhi kekuatan asing. ASEAN sebuah organisasi yang regional asli yang mengemban kepentingan regional.<sup>80</sup>

Dalam KTT Pertama di Bali pada bulan Februari 1976, telah berhasil menetapkan pembentukan Sekretariat Tetap ASEAN. Sekretariat ASEAN telah ditetapkan di Jakarta dan yang menjabat sebagai sekretaris jendral pertama adalah Letjen H.R. Dharsono (Sekjen Nasional ASEAN Indonesia) yang resmi ditetapkan pada sidang tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada tanggal 7 Juni 1976 untuk jabatan 2 tahun. Akan tetapi karena persoalan politik yang terjadi di Indonesia H.R. Dharsono ditarik kembali lalu digantikan oleh Umarjandi Njotowijono.

Struktur aparat pelaksana deklarasi ASEAN, diantaranya:

---

<sup>80</sup>Adam Malik, *Mengabdikan Republik*, jilid II, 1979, hlm. 86-87.

- Sidang tahunan para menteri-menteri luar negeri (ASEAN Ministerial Meeting) yang diadakan di negara anggota secara bergilir.
- *Standing committee* diketahui menteri luar negeri tuan rumah tugasnya melanjutkan pekerjaan ASEAN dalam jangka waktu diantara sidang sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN
- *Permanent committee* dan panitia-panitia *ad-hoc*, beranggotakan para tenaga ahli serta pejabat pemerintah negara-negara ASEAN.
- Sekertaris nasional ASEAN masing-masing negara anggota ditugasi menyelenggarakan pekerjaan ASEAN atas nama negara-negara yang bersangkutan.

81

Untuk memberi landasan yang lebih kuat lagi terhadap ketahanan nasional dan regional maka KTT Asean pertama berakhir dengan sukses serta menghasilkan 4 dokumen yang merupakan tonggak sejarah bagi ASEAN:

- Deklarasi Kesepakatan ASEAN ( Declaration of ASEAN Concord).
- Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara ( Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia).
- Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat ASEAN (Agreement on the Establishment of the Asean Secretariat).
- Komunike Pers Bersama (Join Press Communique).<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970*, hlm.328

Dengan lahirnya keempat dokumen tersebut, benar-benar tercermin keinginan negara-negara anggota ASEAN mengenai kawasan Asia Tenggara sebagai daerah damai, bebas dan netral. KTT Asean di Bali 1977, telah memperkuat deklarasi Kuala Lumpur 1971 dan menetapkan prinsip-prinsip program kerja dalam usaha bersama untuk menciptakan stabilitas politik, serta mempererat kerjasama ekonomi, sosial dan budaya. Pembentukan Asean pada Agustus 1967, menandakan pula bahwa pemerintahan orde baru telah menetapkan proses rehabilitasi internasional dalam rel yang tepat.<sup>83</sup>

## **2. Masuk Dan Keluarnya Timor Timur/Timorleste Dari Indonesia**

Sejarah Timor Timur berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan pulau Timor pada awal abad ke-16 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945, namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II Portugal kembali menguasainya.

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang

---

<sup>82</sup>*Join Communique The First ASEAN Heads of Government Meeting in Bali, 23-24 February 2016* dalam [https://asean.org/?static\\_post=joint-communique-the-first-asean-heads-of-government-meeting-bali-23-24-february-1976](https://asean.org/?static_post=joint-communique-the-first-asean-heads-of-government-meeting-bali-23-24-february-1976) diakses pada 15 Juni 2019.

<sup>83</sup>Michael leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, 1989, hlm.168-169,186

bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro.

Selain itu, pergantian Gubernur ini membawa perubahan situasi politik cukup besar di negeri itu. Sejak kehadiran Lemos Pires dengan stafnya, ketiga partai yang ada, yaitu UDT, Apodeti, dan Fretilin telah melakukan persaingan yang seru. Tindakan Pires cenderung menguntungkan partai UDT, tetapi stafnya yang sebagian besar anggota PCP dan MRPP cenderung menguntungkan Fretilin. Mereka ingin menciptakan masa depan Timor Timur menguntungkan bagi gerakan Komunis internasional.<sup>84</sup>

Setelah itu FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor Leste Independente yang dalam bahasa Indonesia berarti *sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur*) menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi vakumnya pemerintahan di Timor Leste antara bulan September sampai November, FRETILIN melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya wanita dan anak-anak karena para suami mereka adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia).

Berdasarkan itulah, kelompok pro-integrasi kemudian mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang menganut Komunis. Tiga Kuburan Masal sebagai bukti pembantaian FRETILIN terhadap pendukung integrasi terdapat di Kabupaten Aileu (bagian tengah Timor Leste), masing-masing terletak di daerah Saboria, Manutane dan Aisirimoun.

---

<sup>84</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia Volume 4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 63.



Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN memaksa ribuan rakyat untuk mengungsi ke daerah pegunungan untuk dijadikan tameng hidup atau perisai hidup (human shields) untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena penyakit dan kelaparan. Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan.

Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Leste yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal purnawirawan Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste sekarang.

Penyelesaian politik di Timor Timur tidak mungkin ditangani sendiri oleh Portugal tanpa mengikut sertakan kekuatan lain untuk membantunya. Oleh karena itu, Portugal bersedia menerima berbagai formula politik yang tidak bertentangan dengan kehendak rakyat Timor Timur dan kepentingan negara-negara di sekitarnya. Pada tanggal 25 November 1975 ditandatangani sebuah dokumen berupa *Memorandum of Understanding*, sebagai hasil pertemuan antara Indonesia dan Portugal di Roma.<sup>85</sup> Hasil pertemuan tersebut mengandung tiga arti penting yaitu:

---

<sup>85</sup> Heike Krieger, "East Timor and The International Community: Basic Documents", dalam *Cambridge International Documents Series*, Vol. 10 , 1997, New York: Cambridge University Press, hlm. 40.

- Pertama kalinya RI mendapat pengertian secara resmi dari pemerintah Portugal.
- Portugal mengakui semua pihak yang ada di Timor Timur.
- Akan dilanjutkan kontak-kontak tetap antara RI-Portugal.<sup>86</sup>

Pada 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang diadakan PBB, sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum anti-kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timor barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah dan listrik hancur. Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka.

Dan pada 20 Mei 2002 Timor Timur diakui dunia sebagai Negara merdeka dengan nama Timor Leste/ Republica Democratica de Timor Leste dan mendapat sokongan dana yang luar biasa dari PBB. Dan sejak merdeka, pemerintah Timor Leste berusaha memutus segala hubungan dengan Indonesia seakan Indonesia penjajah dan tidak pernah membantu mereka. Dengan kata lain Timor Timur tidak tahu berterimakasih atas apa yang pernah dilakukan Indonesia terhadapnya. Lepasnya Timor Timur menjadi catatan kelam bagi Indonesia karena dipertahankan dengan penuh pengorbanan, dana, dan nyawa. Diperkirakan lebih dari 5.000

---

<sup>86</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, *Op. cit.* hlm 632.

pahlawan gugur dalam Perang Seroja demi mempertahankan provinsi ini.

Permasalahan lepasnya Timor Timur dari Indonesia sempat menjadi kesempatan lawan politik Presiden Habibie (yang saat itu menggantikan Presiden Soeharto) untuk menjatuhkan Presiden Habibie. Lepasnya Timor Timur juga dianggap sebagai ketidakmampuan Pak Habibie dalam mempertahankan Provinsi Timor Timur yang saat itu menjadi bagian dari Indonesia. Namun, semua sudah jelas bahwa dari sejarahnya kita mengetahui lepasnya Timor Timur tidak lain adalah keinginan masyarakatnya sendiri ditambah desakan dunia internasional.

### **3. Persepsi Suharto dan Kebijakan Pemutusan Hubungan Diplomatik Indonesia-Cina**

Pergantian rezim kepemimpinan suatu negara senantiasa berpengaruh pada perubahan kebijakan luar negeri di negara tersebut. Begitu pula yang terjadi dengan Indonesia pasca jatuhnya Soekarno, yang digantikan oleh Soeharto. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran awal yang disampaikan oleh Suharto dalam pidatonya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 1966 yang memuat dua hal utama yaitu stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional.<sup>87</sup>

Guna mewujudkan pemikirannya tersebut, di dalam negeri Suharto mengambil keputusan membubarkan PKI (Wuryandari, 2008:157-158). Hal ini berdampak pada

---

<sup>87</sup> Op.cit. Bandoro, Bantarto, hal 40.

memburuknya hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Komunis, sehingga dalam konteks luar negeri, Suharto mengambil langkah perubahan kebijakan luar negeri dengan membangun hubungan baik dengan pihak – pihak Barat, serta menerapkan ‘good neighbourhood policy’ melalui Association South East Asia Nations (ASEAN).

Keberpihakan Indonesia terhadap Barat tidak bisa dilepaskan dari mendesakannya kebutuhan ekonomi pada saat itu sehingga Soeharto berupaya mencari bantuan luar negeri ke negara-negara Barat. Dari kondisi-kondisi seperti itu, dapat dilihat bahwa segera setelah Soeharto berkuasa Indonesia mulai meninggalkan politik luar negeri yang cenderung ke kiri-kirian. Hal ini tampak dari adanya dugaan akan keterlibatan Cina dalam upaya kudeta yang (dituduhkan) dilakukan oleh PKI yang berujung pada putusnya hubungan diplomatik dengan Cina pada Oktober 1967 (Smith, 2003:2). Meskipun demikian, peran Cina dalam kudeta tersebut dinilai masih tetap kabur.

Ada dua pandangan mengapa peran Cina dalam upaya kudeta tersebut masih kabur. Pertama, Cina menyetujui kudeta dan memasok persenjataan “diluar sepengetahuan dan kontrol otoritas militer Indonesia”. Para pejabat Cina di Beijing mengetahui kudeta enam jam setelah peristiwa tersebut berlangsung dan memberikan daftar jenderal Indonesia yang seharusnya dibunuh. Kelompok medis Cina yang didatangkan dari Beijing memberikan informasi kepada D.N. Aidit -pimpinan PKI - mengenai gawatnya kondisi kesehatan Soekarno sehingga mendorong PKI melakukan kudeta yang gagal.<sup>88</sup>

Laporan CIA kemudian mengungkapkan bahwa tidak ada bukti kuat keberadaan Cina di balik kudeta tersebut. Tetapi laporan itu menyebutkan bahwa “karena ketika Aidit berkunjung ke Cina dan awal persiapan PKI untuk kudeta

---

<sup>88</sup> Ibid. hal 56.

hamper bersamaan dengan kembalinya Ia dari Cina, suatu kasus yang dibuat berdasarkan bukti tidak langsung menunjukkan bahwa Cina telah memberikan inspirasi terjadinya kudeta di Indonesia” (Suryadinata,1998:130).

Kedua, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Beijing tidak menyetujui kudeta karena dua alasan. Pertama, situasi sebelum kudeta sangat menguntungkan Beijing, dan sukar untuk dipahami mengapa Beijing akan merencanakan kudeta yang akan memperburuk situasi. Adanya sejumlah kecil senjata buatan Cina setelah kudeta juga memberikan kesan bahwa Cina tidak terlibat. Kedua, adalah tidak mungkin bahwa partai komunis yang besar seperti PKI akan mendengar perintah dari Beijing.

Ketiadaan bukti empiris yang menunjukkan keterlibatan Cina dalam kudeta tahun 1965 secara langsung menunjukkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina merupakan suatu keanehan. Hal ini tentunya menjadi suatu pertanyaan besar mengapa negara yang tidak terlibat kudeta 1965 dimusuhi bahkan diputuskan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Guna menjawab pertanyaan tersebut, melihat bahwa persepsi Soeharto menjadi determinan yang dapat menjelaskan kasus putusnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina. Secara teoritis, persepsi pemimpin negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara yang dipimpinnya.<sup>89</sup>

Dalam kasus tersebut, Soeharto selaku pemimpin negara dan pengambil kebijakan luar negeri memiliki peran yang sangat besar. Persepsi Soeharto dibentuk oleh sistem keyakinan yang dianutnya. Sistem keyakinan yang dianut Soeharto tidak bisa dilepaskan dari latar belakang Soeharto yang dikenal sangat menjunjung tinggi adat budaya Jawa(Wuryandari, 2008:118-119). Dengan latar belakang seperti itu maka wajar jika kemudian Soeharto mempercayai

---

<sup>89</sup> Ibid. hal 57.

bahwa seorang penguasa mesti mengikuti adat Jawa. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang personal Soeharto yang lahir dari keluarga Jawa. Soeharto memandang bahwa Jawa adalah pusat dunia. Pandangan ini berakar dari adanya sejarah panjang peradaban Jawa yang dalam perjalanannya pernah menguasai seluruh nusantara dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

Dalam sejarahnya pula, Jawa pernah terlibat konflik dengan Kekaisaran Cina. Konflik historis Jawa-Cina yang paling terkenal ialah invasi Kubilai Khan pada abad ke-14. Meskipun pasukan dari Cina tersebut dapat diusir keluar, namun semenjak adanya invasi tersebut masyarakat Jawa memiliki pandangan bahwa Cina adalah suatu negara agresif yang senantiasa menjadi ancaman. Sistem keyakinan yang dimiliki oleh Soeharto yang kental dengan adat budaya Jawa mempengaruhi persepsi Suharto dalam memandang Cina sebagai ancaman. Yang membentuk persepsi Suharto dalam hal ini berkaitan erat dengan peristiwa kudeta gagal 1965.<sup>90</sup>

Peristiwa tersebut merupakan informasi atau input yang diterima oleh Suharto. Berdasarkan input yang Ia terima, melalui sistem keyakinannya yang kental dengan pengaruh budaya Jawa, Suharto memandang bahwa peristiwa tersebut merupakan upaya kudeta oleh pihak komunis yang turut melibatkan Cina. Hal ini terlihat dari pernyataan Suharto dalam pidatonya di Hari Nasional pada 1967, dimana pada saat itu ia menyatakan bahwa keterlibatan Cina dalam kudeta tahun 1965 dan dukungan terhadap PKI yang terus berlanjut telah mengakibatkan hubungan yang tidak normal antara kedua negara.

Persepsi Suharto yang memandang Cina sebagai ancaman semakin diperkuat oleh fakta bahwa Cina pada saat itu berada dalam kekuasaan Mao Zedong yang berambisi menyebarkan ide komunisme ke seluruh dunia. Dalam

---

<sup>90</sup> Ibid. hal 58.

melakukan upayanya tersebut, Mao memberikan dukungan kepada setiap partai komunis di seluruh dunia untuk merebut kekuasaan di negara tempat mereka berada. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Mao yang mengacu pada apa yang pernah dilakukan oleh Yoseph Stalin (Mannsbach & Rafferty, 2012: 223). Dugaan Soeharto terkait keterlibatan Cina dalam peristiwa kudeta 1965 tentunya tidak hanya didasarkan atas adanya fakta historis tentang invasi Cina di masa lalu, tetapi juga diperkuat oleh fakta berupa dinamika politik yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Soekarno. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa persaingan sengit terjadi antara militer dan PKI pada masa kepemimpinan Sukarno.

Kebijakan Soekarno mengirim Omar Dhani ke Cina dalam rangka mendapatkan bantuan berupa senjata-senjata ringan bagi Angkatan Kelima tidak disetujui oleh militer – khususnya Angkatan Darat – pada saat itu karena dinilai melemahkan peranan militer. Peristiwa 1965, oleh karena itu, menimbulkan kesan yang dalam bagi pihak militer, terutama Suharto mengenai keterlibatan Cina dalam peristiwa tersebut. Penilaian akan keterlibatan Cina tidak dapat dilepaskan dari adanya fakta akan adanya upaya PKI untuk membentuk Angkatan Kelima, dengan meminta bantuan terhadap Cina atas persetujuan Soekarno. Fakta tersebut membuat Suharto menilai bahwa Indonesia seharusnya menghindari interaksi dengan Cina demi kebaikan di masa depan. Ini tampak dari pernyataan Suharto dalam pidato kenegaraan pada 1967, dimana pada saat itu ia mengatakan bahwa: keterlibatan Cina dalam kudeta tahun 1965 dan dukungan terhadap PKI yang terus berlanjut telah mengakibatkan hubungan tidak normal antara dua Negara (Suryadinata, 1998:132).<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Hafid Adim Pradana, “Persepsi Soeharto dan Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Cina pada Awal Orde Baru”, dalam *Indonesian Perspective*, Vol. 1 No. 1 (2016), hlm. 23-42.

Selain itu, pada masa pemerintahan Soeharto, terdapat peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia sebagai akibat dari pemerintahan sebelumnya, dimana juga telah banyak peristiwa yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Agresi Indonesia terhadap Malaysia telah menciptakan ketidakstabilan di wilayah Asia Tenggara. Pandangan Indonesia sebagai negara yang tidak memihak kepada salah satu Blok pun sirna. Hal ini dapat dilihat dari kedekatan Indonesia dengan Rusia dan China pada awal 1960-an. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari penolakan Barat dalam mendukung Indonesia memperoleh kembali Irian Barat. Dengan demikian, prioritas kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto adalah memperbaiki citra buruk Indonesia yang telah dilakukan selama Pemerintahan Soekarno, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Dengan demikian, berikut adalah rangkuman beberapa kejadian yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Pemerintahan Soeharto :

- Ditandatangani Supersemar oleh Presiden Soekarno yang memberikan legitimasi kekuasaan Soeharto dalam mengambilalih pemerintahan pada 11 Maret 1966.
- Penghentian hubungan diplomatik Indonesia dengan China pada Oktober 1967.
- Perbaikan hubungan diplomasi dengan negara-negara Barat dan ditinggalkannya ideologi politik luar negeri Soekarno.
- Indonesia masuk kembali menjadi negara anggota PBB dan memperbaharui keanggotaannya pada IMF dan World Bank pada 1966.
- Pengakuan Indonesia atas kedaulatan Singapura, yang telah terpisah dari Malaysia, pada tanggal 6 Juni 1966.



- Perjanjian normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani Adam Malik dan Tun Abdul Rajak di Jakarta pada 11 Agustus 1966.
- Penandatanganan pembentukan Deklarasi ASEAN di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Kerja sama ini menandai era kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara dalam segala bidang, khususnya dalam bidang ekonomi.

Pada masa Orde Baru merupakan masa dimana Indonesia memasuki masa demokrasi Pancasila. Segala kebijakan harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sehingga tidak terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa Orde Baru dimana masa kepemimpinan presiden Soeharto Indonesia mengalami kemajuan dalam sektor pembangunan dalam negeri, penguatan pertanian dan menjadi negara swasembada pangan.

Dalam pengambilan keputusan luar negeri presiden Soeharto tetap menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dimana peran Indonesia dalam dunia Internasional terlihat dan juga Independen (bebas) dalam menentukan sikap. Pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara efektif. Peranan Indonesia pada masa Orde Baru terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat dunia.

Politik Luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde Baru dapat membawa Indonesia baik di mata dunia. Namun beberapa pihak menilai bahwa pada masa presiden Soeharto yang jelas anti komunisme hubungan dengan negara-negara komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara Barat .

## **BAB V**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA PRESIDEN BJ HABIBIE**

#### **A. Profil Presiden BJ Habibie.**

BJ Habibiie Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 – meninggal di Jakarta, 11 September 2019 pada umur 83 tahun adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Try Sutrisno. B. J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998.<sup>92</sup>

B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari (sebagai wakil presiden) dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan (sebagai presiden), B. J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Dari sekian banyak presiden Indonesia, B. J. Habibie merupakan satu-satunya Presiden yang berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan Ayahnya yang berasal dari Kabila, Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta.<sup>93</sup>

Saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menginisiasi dibangunnya Monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Djalaluddin, di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai

---

<sup>92</sup>Op.cit Marwati Djoened Poesponegoro, hal 71.

<sup>93</sup> Op.cit. Setyohadi.Tuk, hal 67.

nama universitas negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan.

B.J. Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Alwi Abdul Jalil Habibie (Ayah dari B.J. Habibie) memiliki marga "Habibie", salah satu marga asli dalam struktur sosial *Pohala'a* (Kerajaan dan Kekeluargaan) di Gorontalo. Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardojo (Ibu dari B.J. Habibie) merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Jogjakarta, dan ayahnya yang bernama Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah.<sup>94</sup>

Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dari silsilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota majelis peradilan agama serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Sewaktu kecil, Habibie pernah berkunjung ke Gorontalo untuk mengikuti proses khitanan dan upacara adat yang dilakukan sesuai syariat islam dan adat istiadat Gorontalo.<sup>95</sup>

Kisah cinta antara Habibie dan Ainun bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Namun, keduanya baru saling memperhatikan ketika sama-sama bersekolah di SMA Kristen

---

<sup>94</sup> Ibid. hal 73.

<sup>95</sup> Salam, S., 1986. *BJ Habibie, Mutiara dari Timur*. Intermedia. Hal 12.

Dago Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman, sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangka Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Setelah berdiskusi dengan Habibie, Ainun pun akhirnya memilih opsi yang kedua. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.

B. J. Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1954. Pada 1955–1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat *summa cum laude*.<sup>96</sup>

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman]. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B. J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan "Visi Indonesia". Menurut Habibie,

---

<sup>96</sup> Ibid. hal 13.

lompatan-lompatan Indonesia dalam "Visi Indonesia" bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT. IPTN, PINDAD, dan PT. PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara Industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, dimana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 (menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.

Riwayat Pekerjaan Habibie antara lain:

- Direktur Utama PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad)
- Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Ketua Dewan Pembina Industri Strategis (BPIS)
- Ketua Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS)
- Ketua Dewan Riset Nasional (1999)
- Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
- Anggota Dewan Komisaris Pertamina
- Asisten Riset Ilmu Pengetahuan Institut Kontruksi Ringan Rheinsich Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat (1960–1965)
- Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Analisa Struktur, Hamburg, Jerman Barat (1966–1969)

- Kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Komersil/Pesawat Militer Messerschmidt Boelkow Blohm (MBB) Gmbh, Hamburg, Jerman Barat (1969–1973)
- Wakil Presiden/Direktur Teknologi Messerschmidt Boelkow Blohm (MBB), Hamburg, Jerman Barat (1974–1978)
- Penasihat Direktur Utama (Dirut) Pertamina (1974–1978)
- Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), Bandung (1976)
- Direktur Utama PT Pelayaran Armada Laut (PAL), Surabaya (1978)
- Profesor Kehormatan/Guru Besar dalam bidang Konstruksi Pesawat Terbang Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1997).<sup>97</sup>

Riwayat Karir Pemerintahan antara lain:

- Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan III (1978–1983)
- Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan IV (1983–1988)
- Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan V (1988–1993)
- Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan VI (1993–1998)
- Ketua Tim Keputusan Presiden (Keppres) 35
- Wakil Presiden RI (1998)
- Presiden RI (1998–1999)<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Poesponegoro, Marwati Djoeneddan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 39.

<sup>98</sup> Ibid. hal 40.

Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasikan hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kukuh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Melalui penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya".

Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "sebelum presiden memangku jabatan

maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR".<sup>99</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik adalah:

- Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
- Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)
- Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
- Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu :
  1. UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
  2. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
  3. UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR
- Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yaitu :
  1. Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentang Referendum
  2. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai asas tunggal

---

<sup>99</sup> Op.cit. Salam, S, hal 42



3. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan
4. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.<sup>100</sup>

12 Ketetapan MPR antara lain :

1. Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
2. Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
4. Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah
5. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
6. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

---

<sup>100</sup> Noer, G.S., 2015. *Rudy: Kisah Masa Muda Sang Visioner*. Jakarta: Bentang Pustaka hal. 47.

7. Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
8. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
9. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
10. Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
11. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
12. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).<sup>101</sup>

Kebijakan di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
- Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
- Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00

---

<sup>101</sup> Ibid. hal 48.

- Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
- Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
- Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
- Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>102</sup>

Akhir Jabatan Presiden Habibie Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai Presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya. Upaya ini akhirnya berhasil saat Sidang Umum 1999, ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Hidayat L.M., 2007. *Reformasi administrasi: Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri*. Gramedia Pustaka Utama. Hal 78.

<sup>103</sup> Makmur, Makka. 2008, *The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan*, Jakarta : PUSTAKA IMAN. Hal 65.

Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi, ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia.

Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B. J. Habibie adalah mengurus industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT. Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80 dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibie.

Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. [40] Sebelum Dimakamkan, pada malam hari Jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie-Ainun di Jalan Patra Kuningan XIII Blok L15/7 No.5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara.

## **B. Kebijakan Luar Negeri Pada Masa Presiden B.J. Habibie.**

Setelah Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei

1998, maka pada pagi itu juga, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik dihadapan pimpinan Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di Istana Negara. Dengan berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, maka sejak saat itu Kabinet Pembangunan VII dinyatakan demisioner (tidak aktif).<sup>104</sup>

Selanjutnya tanggal 22 Mei 1998 pukul 10.30 WIB, kesempatan pertama Habibie untuk meningkatkan legitimasinya yaitu dengan mengumumkan susunan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122 / M Tahun 1998) di Istana Merdeka. Dengan Keputusan Presiden tersebut di atas, Presiden Habibie memberhentikan dengan hormat para Menteri Negara pada Kabinet Pembangunan VII.

Kabinet Reformasi Pembangunan ini terdiri dari 36 Menteri yaitu 4 Menteri Negara dengan tugas sebagai Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara yang memimpin Departemen, 12 Menteri Negara yang bertugas menangani bidang tertentu. Sebanyak 20 Menteri diantaranya adalah muka lama dari Kabinet Pembangunan VII, dan hanya 16 Menteri baru, yaitu Syarwan Hamid, Yunus Yosfiah, Bambang Subianto, Soleh Solahuddin, Muslimin Nasution, Marzuki Usman, Adi Sasono, Fahmi Idris, Malik Fajar, Boediono, Zuhaili, A.M. Syaefuddin, Ida Bagus Oka, Hamzah Haz, Hasan Basri Durin, dan Panangian Siregar.

Kabinet ini mencerminkan suatu sinergi dari semua unsur-unsur kekuatan bangsa yang terdiri dari berbagai unsur kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Hal yang berbeda dari sebelumnya, jabatan Gubernur Bank Indonesia tidak lagi dimasukkan di dalam susunan Kabinet. Karena Bank Indonesia, kata Presiden harus mempunyai kedudukan yang

---

<sup>104</sup> Op.cit. Salam. S, hal 41.

khusus dalam perekonomian, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak manapun berdasarkan Undang-Undang.

Pada tanggal 23 Mei 1998 pagi, Presiden Habibie melantik menteri-menteri Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden Habibie mengatakan bahwa Kabinet Reformasi Pembangunan disusun untuk melaksanakan tugas pokok reformasi total terhadap kehidupan ekonomi, politik dan hukum. Kabinet dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan mengambil kebijakan dan langkah-langkah pro aktif untuk mengembalikan roda pembangunan yang dalam beberapa bidang telah mengalami hambatan yang merugikan rakyat. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.<sup>105</sup>

Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis.

Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentisme sektoral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa.[37] Untuk mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, ia mengangkat

---

<sup>105</sup> Op.cit. Makmur Makka, hal. 71.

pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan.

## **1. Pada bidang politik.**

Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie setelah terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan. Kebijakan politik yang diambil yaitu: dengan dibebaskannya para tahanan politik pada masa Orde Baru, peningkatan kebebasan pers, pembentukan parpol dan percepatan Pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999, penyelesaian masalah Tomor-Timur, pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya, pemberian gelar Pahlawan Reformasi bagi korban Trisakti.

- **Pembebasan Tahanan Politik.**

Secara umum tindakan pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Diantara yang dibebaskan tahanan politik kaum separatis dan tokoh-tokoh tua mantan PKI, yang telah ditahan lebih dari 30 tahun. Amnesti diberikan kepada Mohammad Sanusi dan orang-orang lain yang ditahan setelah Insiden Tanjung Priok.

Selain tokoh itu tokoh aktivis petisi 50 (kelompok yang sebagian besar terdiri dari mantan jendral yang menuduh Soeharto melanggar prinsip Pancasila dan Dwi Fungsi ABRI).

Dr Sri Bintang Pamungkas, ketua Partai PUDI dan Dr Mochatar Pakpahan ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan K. H Abdurrahman Wahid merupakan segelintir dari tokoh-tokoh yang dibebaskan Habibie. Selain itu Habibie mencabut Undang-Undang Subversi dan menyatakan mendukung budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Orde Baru.

- Kebebasan Pers.

Dalam hal ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, sehingga semasa pemerintahan Habibie ini, banyak sekali bermunculan media massa. Demikian pula kebebasan pers ini dilengkapi pula oleh kebebasan berasosiasi organisasi pers sehingga organisasi alternatif seperti AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) dapat melakukan kegiatannya. Sejauh ini tidak ada pembredelan-pembredelan terhadap media tidak seperti pada masa Orde Baru. Pers Indonesia dalam era pasca-Soeharto memang memperoleh kebebasan yang amat lebar, pemberitaan yang menyangkut sisi positif dan negatif kebijakan pemerintah sudah tidak lagi hal yang dianggap tabu, yang seringkali sulit ditemukan batasannya.

Bahkan seorang pengamat Indonesia dari Ohio State University, William Liddle mengaku sempat shock menyaksikan isi berita televisi baik swasta maupun pemerintah dan membaca isi koran di Jakarta, yang kesemuanya seolah-olah menampilkan kebebasan dalam penyampaian berita, dimana hal seperti ini tidak pernah dijumpai sebelumnya pada saat kekuasaan Orde Baru. Cara Habibie memberikan kebebasan pada Pers adalah dengan mencabut SIUPP.

- Pembentukan Parpol dan Percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999.



Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan dibidang politik lainnya diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Itulah sebabnya setahun setelah reformasi Pemilihan Umum dilaksanakan bahkan menjelang Pemilu 1999, Partai Politik yang terdaftar mencapai 141 dan setelah diverifikasi oleh Tim 11 Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 98 partai, namun yang memenuhi syarat mengikuti Pemilu hanya 48 Parpol saja. Selanjutnya tanggal 7 Juni 1999, diselenggarakan Pemilihan Umum Multipartai. Dalam pemilihan ini, yang hasilnya disahkan pada tanggal 3 Agustus 1999, 10 Partai Politik terbesar pemenang Pemilu di DPR

- . Penyelesaian Masalah Timor Timur.

Sejak terjadinya insident Santa Cruz, dunia Internasional memberikan tekanan berat kepada Indonesia dalam masalah hak asasi manusia di Tim-Tim. Bagi Habibie Timor-Timur adalah kerikil dalam sepatu yang merepotkan pemerintahannya, sehingga Habibie mengambil sikap pro aktif dengan menawarkan dua pilihan bagi penyelesaian Timor-Timur yaitu di satu pihak memberikan setatus khusus dengan otonomi luas dan dilain pihak memisahkan diri dari RI. Otonomi luas berarti diberikan kewenangan atas berbagai bidang seperti : politik ekonomi budaya dan lain-lain kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan serta moneter dan fiskal. Sedangkan memisahkan diri berarti secara demokratis dan konstitusional serta secara terhorman dan damai lepas dari NKRI.

Sebulan menjabat sebagai Presiden habibie telah membebaskan tahanan politik Timor-Timur, seperti Xanana Gusmao dan Ramos Horta. Sementara itu di Dili pada tanggal 21 April 1999, kelompok pro kemerdekaan dan pro intergrasi menandatangani kesepakatan damai yang disaksikan oleh

Panglima TNI Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto dan Uskup Baucau Mgr. Basilio do Nascimento. Tanggal 5 Mei 1999 di New York Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama disaksikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur untuk mengetahui sikap rakyat Timor-Timur dalam memilih kedua opsi di atas.

Tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berlangsung aman. Namun keesokan harinya suasana tidak menentu, kerusuhan dimana-mana. Suasana semakin bertambah buruk setelah hasil penentuan pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999 yang menyebutkan bahwa sekitar 78,5 % rakyat Timor-Timur memilih merdeka. Pada awalnya Presiden Habibie berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Timur lebih memilih opsi pertama, namun kenyataannya keyakinan itu salah, dimana sejarah mencatat bahwa sebagian besar rakyat Timor-Timur memilih lepas dari NKRI.

Lepasnya Timor-Timur dari NKRI berdampak pada daerah lain yang juga ingin melepaskan diri dari NKRI seperti tuntutan dari GAM di Aceh dan OPM di Irian Jaya, selain itu Pemerintah RI harus menanggung gelombang pengungsi Timor-Timur yang pro Indonesia di daerah perbatasan yaitu di Atambua. Masalah Timor-Timur tidaklah sesederhana seperti yang diperkirakan Habibie karena adanya bentrokan senjata antara kelompok pro dan kontra kemerdekaan di mana kelompok kontra ini masuk ke dalam kelompok militan yang melakukan teror pembunuhan dan pembakaran pada warga sipil. Tiga pastor yang tewas adalah pastor Hilario, Fransisco, dan dewanto. Situasi yang tidak aman di Tim-Tim memaksa ribuan penduduk mengungsi ke Timor Barat, ketidak mampuan Indonesia mencegah teror, menciptakan keamanan mendorong Indonesia harus menerima pasukan internasional.

- Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya.

Mengenai masalah KKN, terutama yang melibatkan Mantan Presiden Soeharto pemerintah dinilai tidak serius menanganinya dimana proses untuk mengadili Soeharto berjalan sangat lambat. Bahkan, pemerintah dianggap gagal dalam melaksanakan Tap MPR No. XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terutama mengenai pengusutan kekayaan Mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya. Padahal mengenai hal ini, Presiden Habibie - dengan Instruksi Presiden No. 30 / 1998 tanggal 2 Desember 1998 – telah mengintruksikan Jaksa Agung Baru, Andi Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa Mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN.

Namun hasilnya tidak memuaskan karena pada tanggal 11 Oktober 1999, pejabat Jaksa Agung Ismudjoko mengeluarkan SP3, yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap Soeharto yang berkaitan dengan masalah dana yayasan dihentikan. Alasannya, Kejaksaan tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan, kecuali menemukan bukti-bukti baru. Sedangkan dengan kasus lainnya tidak ada kejelasan.

Bersumber dari masalah di atas, yaitu pemerintah dinilai gagal dalam melaksanakan agenda Reformasi untuk memeriksa harta Soeharto dan mengadilinya. Hal ini berdampak pada aksi demonstrasi saat Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 Nopember 1998, dan aksi ini mengakibatkan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat. Parahnya pada saat penutupan Sidang Istimewa MPR, Jumat (13/11/1998) malam. Rangkaian penembakan membabi-butakan berlangsung sejak pukul 15.45 WIB sampai tengah malam. Darah berceceran di kawasan Semanggi, yang jaraknya hanya satu kilometer dari tempat wakil rakyat bersidang. Sampai sabtu dini hari, tercatat

lima mahasiswa tewas dan 253 mahasiswa luka-luka. Karena banyaknya korban akibat bentrokan di kawasan Semanggi maka bentrokan ini diberi nama "Semanggi Berdarah" atau "Tragedi Semanggi".

- Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi bagi Korban Trisakti.

Pemberian gelar Pahlawan Reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugerahkan oleh pemerintahan Habibie, dimana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan mahasiswa sebagai pelopor gerakan Reformasi.

## **2. Pada Bidang Ekonomi.**

Di dalam pemulihan ekonomi, secara signifikan pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Namun langkah dalam kebijakan ekonomi belum sepenuhnya menggembirakan karena dianggap tidak mempunyai kebijakan yang kongkrit dan sistematis seperti sektor riil belum pulih. Di sisi lain, banyaknya kasus penyelewengan dana negara dan bantuan luar negeri membuat Indonesia kehilangan momentum pemulihan ekonomi.

Pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Kemudian di awal tahun selanjutnya kembali pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi. Namun hasil yang

menggembirakan dolar AS sempat menyentuh di angka tujuh ribu turun dari lima belas ribu.<sup>106</sup>

Untuk masalah distribusi sembako utamanya minyak goreng dan beras, dianggap kebijakan yang gagal. Hal ini nampak dari tetap meningkatnya harga beras walaupun telah dilakukan operasi pasar, ditemui juga penyelundupan beras keluar negeri dan penimbunan beras.

### **3. Pada Bidang Manajemen Internal ABRI**

Pada masa transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, banyak perubahan-perubahan penting terjadi dalam tubuh ABRI, terutama dalam tataran konsep dan organisatornya. Pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi keputusan politik dan akademis reformasi internal TNI, antara lain :

- Prediksi tantangan TNI ke depan di abad XXI begitu besar, kompleks dan multidimensional, atas dasar itu TNI harus segera menyesuaikan diri.
- TNI senantiasa harus mau dan mampu mendengar serta merespon aspirasi rakyat.
- TNI mengakui secara jujur, jernih dan objektif, sebagai komponen bangsa yang lainnya, bahwa di masa lalu ada kekurangan dan distorsi sebagai konsekuensi logis dari format politik Orba.

ABRI telah melakukan kebijakan-kebijakan sebagai langkah perubahan politik internal, yang berlaku tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut antara lain: pemisahan POLRI dari ABRI, Perubahan Stat Sosial Politik menjadi Staf Teritorial, Likuidasi Staf Karyawan, Pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II, pemutusan hubungan organisatoris dengan

---

<sup>106</sup> Adi, Sudirman,. 2017. *Sejarah Lengkap Indonesia*. Jogjakarta: DIVA Press.Sjamsudin, Helius.hal 91.

partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada, komitmen dan netralitas ABRI dalam Pemilu dan perubahan Staf Sospol menjadi komsos serta pembubaran Bakorstanas dan Bakorstanasda.

Perubahan di atas dipandang positif oleh berbagai kalangan sebagai upaya reaktif ABRI terhadap tuntutan dan gugatan dari masyarakat, khususnya tentang persoalan eksistensi peran Sospol ABRI yang diimplementasikan dari doktrin Dwi Fungsi ABRI.

Kadaan Sosial Di Masa Habibie terjadi kerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan sejak tahun 90-an semakin meluas dan brutal, konflik antar kelompok sering terkait dengan agama seperti di Purworejo Juni 1998 kaum muslim menyerang lima gereja, di Jember adanya perusakan terhadap toko-toko milik cina, di Cilacap muncul kerusuhan anti cina, adanya teror ninja bertopeng melanda Jawa Timur dari Malang sampai Banyuwangi. Isu santet menghantui masyarakat kemudian di daerah-daerah yang ingin melepaskan diri seperti Aceh, begitu juga dengan Papua semakin keras keinginan membebaskan diri. Juli 1998 OPM mengibarkan bendera bintang kejora sehingga mendapatkan perlawanan fisik dari TNI.

Masa Pemerintahan B.J. Habibie dimulai dari mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, maka Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan kedudukannya sebagai presiden. Pelimpahan ini memunculkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan B.J. Habibie sangat lemah, karena keberadaan Habibie dianggap sebagai suatu paket warisan pemerintahan Soeharto. Bahkan beberapa kelompok menuntut pembentukan pemerintahan transisi. Hal lain yang melemahkan legitimasi Habibie dalam memimpin pemerintahan ialah ia tidak dipilih secara luber dan jurdil sebagai presiden dan merupakan satu paket pemilihan pola musyawarah mufakat dengan Soeharto.

Selain itu, beberapa tokoh memberi komentar pemerintahan Habibie sebagai "pemerintahan transisi" (Nurcholis Majid). "Belum lepas dari bayang-bayang Soeharto" (Amien Rais), "Melakukan reformasi hanya pada kulitnya saja" dan "perpanjangan rezim mantan Presiden Soeharto" (Megawati). Komentar-komentar tersebut makin melemahkan legitimasi Habibie sebagai presiden.

Meskipun terdapat berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan Habibie. Dimana sejak Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk, seperti penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR, penyelenggaraan pemilu dan reformasi di bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi.

Di tengah-tengah upaya pemerintahan Habibie memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR mengenai masalah Timor-Timur. Pemerintah dianggap tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR/MPR sebelum menawarkan opsi kedua kepada masyarakat Timor-Timur. Dalam jajak pendapat terdapat dua opsi yang ditawarkan di Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie, yaitu: otonomi luas bagi Timor-Timur dan kemerdekaan bagi Timor-Timur.

Akhirnya tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berlangsung aman dan dimenangkan oleh kelompok Pro Kemerdekaan yang berarti Timor-Timur lepas dari wilayah NKRI. Masalah itu tidak berhenti dengan lepasnya Timor-Timur, setelah itu muncul tuntutan dari dunia Internasional mengenai masalah pelanggaran HAM yang meminta pertanggungjawaban militer Indonesia sebagai penanggungjawab keamanan pasca jajak pendapat. Hal ini mencoreng Indonesia di Dunia Internasional.

Selain kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur tersebut, terjadi kasus yang sama seperti di Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Irian Jaya lewat Organisasi Papua Merdeka (OPM), dengan kelompok separatisnya yang menuntut kemerdekaan dari wilayah Republik Indonesia.

Pada tanggal 1-21 Oktober 1999, MPR mengadakan Sidang Umum. Dalam suasana Sidang Umum MPR yang digelar dibawah pimpinan Ketua MPR Amien Rais, tanggal 14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang dan terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden sebagai Mandataris MPR lewat Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa. Pada umumnya, masalah-masalah yang dipersoalkan oleh Fraksi-fraksi tersebut adalah masalah Timor-Timur, KKN termasuk pengusutan kekayaan Soeharto, dan masalah HAM. Sementara itu, di luar Gedung DPR/MPR yang sedang bersidang, mahasiswa dan rakyat yang anti Habibie bentrok dengan aparat keamanan. Mereka menolak pertanggungjawaban Habibie, karena Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rezim Orba.<sup>107</sup>

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, "dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak". Pada hari yang sama Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Habibie juga ikhlas terhadap penolakan pertanggungjawabannya oleh MPR. Menyusul penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie dan pengunduran Habibie dalam bursa calon presiden, memunculkan dua calon kuat sebagai presiden, yaitu Megawati dan Abdurrahman Wahid semakin solid, setelah calon Presiden Yusril Ihza Mahendra dari Fraksi Partai Bulan Bintang mengundurkan diri melalui voting, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat.

Gus Dur dilantik dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 untuk masa bakti 1999-2004. Tanggal 21

---

<sup>107</sup> Ibid.hal 93.



Oktober 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid. Terpilihnya Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1999-2004 menjadi akhir pemerintahan Presiden Habibie dengan TAP MPR No. III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI B.J. Habibie.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> LM, Hidayat., 2007. *Reformasi administrasi: Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri*. Gramedia Pustaka Utama. Hal 48.

## BAB VI

### POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

#### A. Profile Presiden Gus Dur.

Dr.(H.C.) K. H. **Abdurrahman Wahid** atau yang akrab disapa **Gus Dur** (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun) adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR.<sup>109</sup>

Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua *Tanfidziyah* (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, tetapi kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah, sama dengan 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti

---

<sup>109</sup> Op.cit. Setyohadi.Tuk, hal 77.

"Sang Penakluk". Kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti "*abang*" atau "*mas*".<sup>110</sup>

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.<sup>111</sup>

Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak. Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis, Louis-Charles Damais diidentifikasi sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.

Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah

---

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Ibid., hal 68.

organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda.

Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952.<sup>112</sup>

Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada KH. Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun).<sup>113</sup>

Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti *Horizon* dan *Majalah Budaya Jaya*.

Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar Studi Islam di Universitas Al

---

<sup>112</sup> Ibid. Hal 69.

<sup>113</sup> Op.cit, Adi, Sudirman, hal 102.

Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial. Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya.

Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa; ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas. Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jenderal Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan.<sup>114</sup>

Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut. Setelah

---

<sup>114</sup> Ibid. hal 103.

menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.

Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah *Prisma* dan Gusdur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Gusdur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah.<sup>115</sup>

Gusdur merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Gusdur memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.

Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah dan surat kabar. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia

---

<sup>115</sup> Greg Barton, 2006, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, (Yogyakarta: LkiS, 2006. Hal 17.

mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Gusdur tinggal bersama keluarganya. Meskipun memiliki karier yang sukses pada saat itu, Gusdur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974 Gusdur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik. Satu tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.<sup>116</sup>

Pada tahun 1977, Gusdur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dan Universitas ingin agar Gusdur mengajar subjek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi. Namun kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas. Latar belakang keluarga Wahid segera berarti. Ia diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasihat Agama NU.

Namun, Wahid akhirnya bergabung dengan Dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syamsuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Wahid menyebut bahwa Pemerintah

---

<sup>116</sup> Ibid. hal.18.

mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya. Namun, Wahid selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jenderal Benny Moerdani.<sup>117</sup>

Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasihat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (yang termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan kepemimpinan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan.

Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusional. Dengan himbauan Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tim Tujuh dapat menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya.

Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU

---

<sup>117</sup> Ibid. hal. 23.



dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.

Reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi.

Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggi NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada Panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas.<sup>118</sup>

Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gus Dur indoktrinasi Pancasila. Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid menunjukkan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Wahid mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia. Hal ini merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerintah, tetapi saat itu Suharto masih mendapat dukungan politik dari NU.

---

<sup>118</sup> Ibid. hal 24.

Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekuler. Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim. Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapakan mengubah salam Muslim "assalamualaikum" menjadi salam sekuler "selamat pagi".

Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati Muslim Intelektual. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung.

Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat. Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992.

Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus

berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.<sup>119</sup>

Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini,

Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasihati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.

Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November

---

<sup>119</sup> Ahmad, Munawar. 2010, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS, 2010. Hal 86.

1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur. Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>120</sup>

Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, tetapi ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan.

Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga partai politik: Golkar, PPP dan PDI.

---

<sup>120</sup> Ibid. hal 88.

Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut.<sup>121</sup>

Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.

Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.

Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato

---

<sup>121</sup> Ibid. hal 91.

pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.<sup>122</sup>

Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP. Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.

Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok. Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena

---

<sup>122</sup> Ibid hal 93.

Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat.

Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut.<sup>123</sup>

Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong.

Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya. Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan

---

<sup>123</sup> Ibid. hal 99.

terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.

Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.

Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatanganan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu ini diangkat dalam pidato Ribhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.<sup>124</sup>

Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra,

---

<sup>124</sup> Ibid. hal 102.



yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.<sup>125</sup>

Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, tetapi mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI. Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan bahwa \$4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate.

Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang \$2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakili sebagian tugas. Anggota MPR

---

<sup>125</sup> Opcit. Greg Barton, 2006, *Biografi Gus Dur*The, hal 89.

setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukkan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur.<sup>126</sup>

Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.

Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu

---

<sup>126</sup> Ibid. hal 93.

mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.

Pada pertemuan dengan rektor-rector universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR di mana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa *walk out* dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.<sup>127</sup>

Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan dengan mengganti kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan dianggap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya

---

<sup>127</sup> Ibid. hal 94.

Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus. Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam *reshuffle* kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli.<sup>128</sup>

TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, tetapi akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.

Sebelum Sidang Khusus MPR, anggota PKB setuju untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Matori Abdul Djali, ketua PKB, bersikeras hadir karena ia adalah Wakil Ketua MPR. Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum akhirnya mencabut keanggotaan Matori pada bulan November. Pada tanggal 14 Januari 2002, Matori mengadakan Munas Khusus yang dihadiri oleh pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan

---

<sup>128</sup> Ibid. hal 95.

mengadakan Munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari, sehari setelah Munas Matori selesai Musyawarah Nasional memilih kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasihat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batutulis.

Pada April 2004, PKB berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 10.6% suara. Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004, di mana rakyat akan memilih secara langsung, PKB memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga Komisi Pemilihan Umum menolak memasukkannya sebagai calon. Gus Dur lalu mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan dari Wiranto. Pada 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Untuk pemilihan kedua antara pasangan Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-Muzadi, Gus Dur menyatakan golput.<sup>129</sup>

Pada Agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Try Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM.

Wahid menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari. Yenny juga aktif berpolitik di Partai Kebangkitan Bangsa dan saat ini adalah direktur The Wahid Institute. Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya

---

<sup>129</sup> Ibid. hal 98.

harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut, yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani hemodialisis (cuci darah) rutin. Menurut Salahuddin Wahid adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang se usai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.<sup>130</sup>

Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori *Community Leadership*. Wahid dinobatkan sebagai "Bapak Tionghoa" oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004. Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Wahid mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM.

Gus Dur memperoleh penghargaan dari *Mebal Valor* yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era orde baru. Wahid juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi *Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study*. Pada 21 Juli 2010, meskipun telah meninggal, ia memperoleh *Lifetime Achievement Award* dalam Liputan 6 Awards 2010. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Sinta Nuriyah, istri Gus Dur.

---

<sup>130</sup> Ibid. hal 99.

Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006. Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dan Gadis dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan Butet Kertaradjasa, pemimpin redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni, dan Ketua Komisi Nasional Perempuan Chandra Kirana. Mereka berhasil menyisihkan 23 kandidat lain.<sup>131</sup>

Penghargaan Tasrif Award bagi Gus Dur menuai protes dari para wartawan yang hadir dalam acara jumpa pers itu. Seorang wartawan mengatakan bahwa hanya karena upaya Gus Dur menentang RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi, ia menerima penghargaan tersebut. Sementara wartawan lain seperti Ati Nurbaiti, mantan Ketua Umum AJI Indonesia dan wartawan The Jakarta Post membantah dan mempertanyakan hubungan perjuangan Wahid menentang RUU APP dengan kebebasan pers.

Riwayat pendidikan Gus Dur dimulai dari menjelang kelulusannya di Sekolah Dasar, Gus Dur memenangkan lomba karya tulis (mengarang) se-wilayah kota Jakarta dan menerima hadiah dari pemerintah. Pengalaman ini menjelaskan bahwa Gus Dur telah mampu menuangkan gagasan/ide-idenya dalam sebuah tulisan. Karenanya wajar jika pada masa kemudian tulisan-tulisan Gus Dur menghiasai berbagai media massa.

Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sambil mondok di pesantren Krapyak. Sekolah ini meskipun dikelola oleh Gereja Katolik Roma, akan tetapi sepenuhnya menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini

---

<sup>131</sup> Op.cit. Ahmad, Munawar, hal 101.

pula pertama kali Gus Dur belajar Bahasa Inggris. Karena merasa terkekang hidup dalam dunia pesantren, akhirnya ia minta pindah ke kota dan tinggal di rumah Haji Junaidi, seorang pimpinan lokal Muhammadiyah dan orang yang berpengaruh di SMEP. Kegiatan rutinnnya, setelah shalat subuh mengaji pada K.H. Ma'sum Krapyak, siang hari sekolah di SMEP, dan pada malam hari ia ikut berdiskusi bersama dengan Haji Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya.

Ketika menjadi siswa sekolah lanjutan pertama tersebut, hobi membacanya semakin mendapatkan tempat. Gus Dur, misalnya, didorong oleh gurunya untuk menguasai Bahasa Inggris, sehingga dalam waktu satu-dua tahun Gus Dur menghabiskan beberapa buku dalam bahasa Inggris. Di antara buku-buku yang pernah dibacanya adalah karya Ernest Hemingway, John Steinbach, dan William Faulkner. Di samping itu, ia juga membaca sampai tuntas beberapa karya Johan Huizinga, Andre Malraux, Ortega Y. Gasset, dan beberapa karya penulis Rusia, seperti: Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky dan Mikhail Sholokov. Gus Dur juga melahap habis beberapa karya Wiill Durant yang berjudul 'The Story of Civilization'.<sup>132</sup>

Selain belajar dengan membaca buku-buku berbahasa Inggris, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sekaligus untuk menggali informasi, Gus Dur aktif mendengarkan siaran lewat radio Voice of America dan BBC London. Ketika mengetahui bahwa Gus Dur pandai dalam bahasa Inggris, Pak Sumatri-seorang guru SMEP yang juga anggota Partai Komunis-memberi buku karya Lenin 'What is To Be Done' . Pada saat yang sama, anak yang memasuki masuki masa remaja ini telah mengenal Das Kapital-nya Karl Marx, filsafat Plato,Thales, dan sebagainya. Dari paparan ini tergambar dengan jelas kekayaan informasi dan keluasan wawasan Gus Dur.

---

<sup>132</sup> Ibid. hal 103



Setamat dari SMEP Gus Dur melanjutkan belajarnya di Pesantren Tegarejo Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh K.H. Chudhari, sosok kyai yang humanis, saleh dan guru dicintai. Kyai Chudhari inilah yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktek-praktek ritual mistik. Di bawah bimbingan kyai ini pula, Gus Dur mulai mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat para wali di Jawa. Pada saat masuk ke pesantren ini, Gus Dur membawa seluruh koleksi buku-bukunya, yang membuat santri-santri lain terheran-heran.

Pada saat ini pula Gus Dur telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam berhumor dan berbicara. Dalam kaitan dengan yang terakhir ini ada sebuah kisah menarik yang patut diungkap dalam paparan ini adalah pada acara imtihan-pesta akbar yang diselenggarakan sebelum puasa pada saat perpisahan santri yang selesai menamatkan belajar-dengan menyediakan makanan dan minuman dan mendatangkan semua hiburan rakyat, seperti: Gamelan, tarian tradisional, kuda lumping, jathilan, dan sebagainya. Jelas, hiburan-hiburan seperti tersebut di atas sangat tabu bagi dunia pesantren pada umumnya. Akan tetapi itu ada dan terjadi di Pesantren Tegarejo.<sup>133</sup>

Setelah menghabiskan dua tahun di pesantren Tegarejo, Gus Dur pindah kembali ke Jombang, dan tinggal di Pesantren Tambak Beras. Saat itu usianya mendekati 20 tahun, sehingga di pesantren milik pamannya, K.H. Abdul Fatah, ia menjadi seorang ustadz, dan menjadi ketua keamanan. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat ke tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji, yang kemudian diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar. Pertama kali sampai di Mesir, ia merasa kecewa karena tidak dapat langsung masuk dalam Universitas al-Azhar, akan tetapi harus masuk Aliyah (semacam sekolah persiapan).

---

<sup>133</sup> Ibid. hal 105.

Di sekolah ia merasa bosan, karena harus mengulang mata pelajaran yang telah ditempuhnya di Indonesia. Untuk menghilangkan kebosanan, Gus Dur sering mengunjungi perpustakaan dan pusat layanan informasi Amerika (USIS) dan toko-toko buku dimana ia dapat memperoleh buku-buku yang dikehendaki.

Terdapat kondisi yang menguntungkan saat Gus Dur berada di Mesir, di bawah pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasr, seorang nasionalis yang dinamis, Kairo menjadi era keemasan kaum intelektual. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mendapat perlindungan yang cukup. Pada tahun 1966 Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju.

Di Irak ia masuk dalam Departement of Religion di Universitas Bagdad samapi tahun 1970. Selama di Baghdad Gus Dur mempunyai pengalaman hidup yang berbeda dengan di Mesir. Di kota seribu satu malam ini Gus Dur mendapatkan rangsangan intelektual yang tidak didapatkan di Mesir. Pada waktu yang sama ia kembali bersentuhan dengan buku-buku besar karya sarjana orientalis Barat. Ia kembali menekuni hobinya secara intensif dengan membaca hampir semua buku yang ada di Universitas.<sup>134</sup>

Di luar dunia kampus, Gus Dur rajin mengunjungi makam-makam keramat para wali, termasuk makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani, pendiri jamaah tarekat Qadiriyyah. Ia juga menggeluti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi, seorang pendiri aliran tasawuf yang diikuti oleh jamaah NU. Di sinilah Gus Dur menemukan sumber spiritualitasnya. Kondisi politik yang terjadi di Irak, ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran politik Gus Dur pada saat itu. Kekagumannya pada kekuatan nasionalisme Arab, khususnya kepada Saddam Husain sebagai salah satu tokohnya, menjadi luntur ketika syekh yang dikenalnya, Azis Badri tewas terbunuh.

---

<sup>134</sup> Ibid. hal 112.

Selepas belajar di Baghdad Gus Dur bermaksud melanjutkan studinya ke Eropa. Akan tetapi persyaratan yang ketat, utamanya dalam bahasa-misalnya untuk masuk dalam kajian klasik di Kohln, harus menguasai bahasa Hebrew, Yunani atau Latin dengan baik di samping bahasa Jerman-tidak dapat dipenuhinya, akhirnya yang dilakukan adalah melakukan kunjungan dan menjadi pelajar keliling, dari satu universitas ke universitas lainnya. Pada akhirnya ia menetap di Belanda selama enam bulan dan mendirikan Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa. Untuk biaya hidup dirantau, dua kali sebulan ia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih kapal tanker. Gus Dur juga sempat pergi ke McGill University di Kanada untuk mempelajari kajian-lkajian keislaman secara mendalam. Namun, akhirnya ia kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita yang menarik sekitar perkembangan dunia pesantren. Perjalanan keliling studi Gus Dur berakhir pada tahun 1971, ketika ia kembali ke Jawa dan mulai memasuki kehidupan barunya, yang sekaligus sebagai perjalanan awal kariernya.<sup>135</sup>

Meski demikian, semangat belajar Gus Dur tidak surut. Buktinya pada tahun 1979 Gus Dur ditawarkan untuk belajar ke sebuah universitas di Australia guna mendapatkan gelar doktor. Akan tetapi maksud yang baik itu tidak dapat dipenuhi, sebab semua promotor tidak sanggup, dan menganggap bahwa Gus Dur tidak membutuhkan gelar tersebut. Memang dalam kenyataannya beberapa disertasi calon doktor dari Australia justru dikirimkan kepada Gus Dur untuk dikoreksi, dibimbing yang kemudian dipertahankan di hadapan sidang akademik.

Gus Dur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) dari berbagai lembaga pendidikan:

---

<sup>135</sup> Op.cit. hal Op.cit. Ahmad, Munawar, hal 103

- Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (2000)
- Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)
- Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Prancis (2000)
- Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000)
- Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda (2000)
- Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India (2000)
- Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang (2002)
- Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel (2003)
- Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003)
- Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003).<sup>136</sup>

## **B. Kebijakan Luar Negeri Masa Presiden Gus Dur.**

Abdurahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia ke-4 yang terpilih pada tanggal 20 Oktober 1999. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat liberal dalam berpikir, kaya akan ide, dan kental dengan suasana informal dan santai namun memiliki visi dan tujuan tertentu. Ia cenderung mengagregasikan aspirasi dari setiap kepentingan untuk kemudian diwujudkan dalam suatu kebijakan yang akomodatif bagi semua pihak. Indonesia pada

---

<sup>136</sup> Ibid. hal 105.

masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil ‘Gus Dur’ adalah perjalanan meninggalkan pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis.<sup>137</sup>

Hanya saja saat terpilihnya Gus Dur sebagai presiden, Indonesia sedang berada ditengah keadaan negara yang terombang-ambing dengan warisan segudang permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat dan menjadi ancaman yang cukup serius terhadap legitimasi seorang presiden yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Indonesia dihadapkan dengan tragedi kerusuhan Mei 1998, kemudian Negara Timur Leste yang memerdekakan diri, dan beberapa kasus-kasus lainnya, mengakibatkan Gus Dur harus mampu memulihkan citra positif dari Indonesia.

Gus Dur melakukan dominasinya dalam pelaksanaan politik luar negeri yaitu melakukan kunjungan atau tur keliling dunia. Tercatat bahwa Gus Dur pernah melakukan kunjungan ke 10 Negara Eropa–Asia hanya dalam waktu 17 hari saja. Hal ini menuai cukup banyak kritikan karena dianggap tindak pemborosan walaupun tujuannya memang untuk menghadirkan citra positif bagi bangsa Indonesia yang kemudian dapat terbentuknya lagi bantuan perekenomian dari negara-negara Eropa maupun Asia dan untuk membuka jalur investasi asing untuk Indonesia. Profil Gus Dur banyak dinilai kontroversial dan mengarahkan politik luar negeri Indonesia ke arah yang *high profile* kembali. Salah satu niatan Gus Dur yang paling kontroversial ialah rencananya untuk membuka hubungan dagang dengan dengan Israel. Rencana ini kemudian dibatalkan

---

<sup>137</sup> Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000). 2001. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal DPR RI.. hal.5.

karena banyaknya kecaman dan penolakan dari dalam negeri.<sup>138</sup>

Salah satu ciri khas lain dari politik luar negeri era Gus Dur adalah proses perumusan politik luar negerinya yang berpola “arus-balik”. Apabila presiden-presiden RI yang sebelumnya selalu merumuskan kebijakan luar negeri terlebih dahulu sebelum melakukan diplomasinya, maka Gus Dur justru menjaring terlebih dahulu opini dunia atas konsep kebijakan melalui diplomasi baru kemudian melakukan perumusan platform politik luar negerinya. Tipe berdiplomasi seperti ini sangat sesuai dengan karakter Gus Dur serta legitimasi, kapabilitas dan talenta personal berdiplomasinya yang memang memiliki karakter unik.

Gus Dur juga berambisi mewujudkan ”poros kekuatan” di Asia. Ia sempat memulai prakarsa tersebut dengan menggagas Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, Timor Timur, Papua Niugini, Australia, dan Selandia Baru yang sempat disuarakan ke sembilan negara ASEAN. Ia membujuk Singapura menyetujui pembentukan Forum Pasifik Barat dalam KTT ASEAN di Singapura, November 2000. Namun, Menteri Senior Lee Kuan Yew menolak permintaan itu karena orang Singapura melecehkan melayu dan menganggap jika Indonesia itu tidak ada. Menanggapi hal itu, Gus Dur marah dan membuat Singapura gempar atas kemarahannya tersebut. Ia juga menganggap bahwa Singapura ingin menang sendiri dan hanya mengambil keuntungan dari apa yang sedang dilakukan Indonesia pada saat itu. Sebelumnya, Gus Dur juga memprakarsai pembentukan poros ekonomi Indonesia, Singapura, China, Jepang, dan India. Sayangnya, sejumlah negara merasa khawatir dengan fenomena ”kebangkitan Asia” ala Doktrin Wahid ini.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Ibid. hal 6.

<sup>139</sup> Ibid. hal 43.

Melalui Menlu Alwi Shihab, Gus Dur memperkenalkan tiga elemen politik luar negeri. Pertama, menjaga jarak sama dengan semua negara, kedua hidup bertetangga dengan baik, dan ketiga "kebajikan universal".

Berikut sejumlah hambatan yang muncul pada era kepemimpinan Gus Dur:

1. Transisi demokrasi menyebabkan ketidakstabilan politik
2. Perekonomian masih belum bangkit dari krisis
3. Konflik horizontal dan vertical semakin bermunculan dan mengancam keamanan nasional
4. Kurangnya kepercayaan internasional terhadap citra Indonesia yang memburuk
5. Kurangnya dukungan dari dalam negeri terhadap kebijakan yang diambil Gus Dur
6. Transisi politik dan demokrasi menyebabkan kepercayaan terhadap pemerintah dari rakyat masih minim.<sup>140</sup>

Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur menetapkan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang disebut *Ecumenical Diplomacy* yaitu merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada dasarnya, tujuan politik luar negeri Indonesia pada era Gus Dur masih terfokus pada usaha stabilitas ekonomi dan keamanan melalui diplomasi yang direalisasikan melalui investasi swasta, diplomasi bantuan luar negeri, perdagangan bebas, otonomi regional, dan sistem politik demokratis.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Ibid hal. 52.

<sup>141</sup> Ikrar, Nusa Bhakti,. Reinterpretasi Politik Luar Negeri Indonesia dan Kemandirian Regional Asia Tenggara (*Studia Politika* 2). Jakarta:1998.

Keberhasilan Gus Dur di era pemerintahannya yang singkat ditunjukkan dengan meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata internasional yang diperlihatkan dengan mengalirnya bantuan internasional untuk membantu perekonomian dalam negeri. Tak hanya itu, keberhasilan pengelolaan masalah ancaman integrasi bangsa juga menjadi salah satu prestasi Gus Dur. Namun, keputusan Gus Dur yang dianggap menyimpang dan sosoknya yang konfrontatif serta emosional, membuatnya harus menyerah pada keputusan *impeachment* (keputusan untuk memberhentikan seorang presiden).

Semasa reformasi pemerintah Indonesia dianggap tidak memiliki seperangkat formula kebijakan luar negeri yang tepat dan tegas dalam menunjukan citra negara Indonesia. Pemerintah semasa reformasi dari kepemimpinan Gus Dur, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim bahwa pemerintahannya tetap menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Menelaah kembali semasa pemerintahan presiden Gus Dur, dimana Indonesia baru memasuki tahapan baru dalam pemerintahannya.<sup>142</sup>

Setelah menggulingkan rezim presiden Soeharto yang dianggap rezim yang diktator, Indonesia memasuki tahapan dimana Demokrasi lebih ditegakkan. Pemerintahan Gus Dur dianggap yang paling kontroversial, beliau ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel namun menuai begitu banyak tentangan dari dalam negeri. Politik luar negeri yang dijalankannya masih menggunakan formula lama yaitu politik luar negeri bebas aktif. Lalu beralih masa presiden Megawati, Indonesia dilanda begitu banyak tindak terorisme di dalam negeri. Sehingga fokus utama adalah memberantas tindak terorisme dalam negeri.

Dalam politik luar negerinya pun terfokus bagaimana meningkatkan keamanan nasional dan juga ikut berperan aktif

---

<sup>142</sup> Ibid.



dalam memberantas tindak terorisme di dunia internasional. Indonesia bekerjasama dengan negara-negara di dunia terutama negara Amerika Serikat dalam memerangi tindak terorisme.

Mengingat situasi internasional selalu berkembang, politik luar negeri suatu negara kerap mengalami perubahan. Indikator dari perubahan itu di antaranya dalam hal gaya pelaksanaan, dari *low profile* menjadi *high profile* atau mungkin sebaliknya; dalam hal titik berat, dari titik berat di bidang politik ke bidang ekonomi atau dari bidang ekonomi ke militer atau mungkin sebaliknya; atau dalam hal arah hubungan, dari yang berorientasi ke salah satu negara adikuasa ke Dunia Ketiga atau sebaliknya.

Bagaimana pun situasi internasional merupakan salah satu faktor yang harus diantisipasi dan diperhitungkan secara matang oleh setiap negara dalam rangka pembuatan kebijakan luar negerinya. Alasannya, karena situasi internasional tidak statis, melainkan selalu berkembang secara dinamis. Dari pemaparan secara umum di atas mengenai politik luar negeri masing-masing presiden, tampak perubahan-perubahan gaya pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang pada masa Sukarno (1945-1965), politik luar negeri Indonesia bersifat *high profile*, flomboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta konfrontasi, begitu juga dengan Suharto dan Gus Dur masih bergaya *High Profile*, namun hingga masa presiden-presiden berikutnya menjadi semakin *Low profile*.<sup>143</sup>

Sisi lain dari kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden adalah dominasinya dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dominasi itu ditunjukkan ”tur keliling dunia” yang menghabiskan 23 dari 40 hari pertama masa pemerintahannya, rekor baru yang fantastis dalam sejarah kepresidenan. Wajar Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung mengkritik Gus Dur jangjan terlalu sering melawat karena

---

<sup>143</sup> Opcit, Aanalisis Kebijakan.hal.7.

banyak persoalan domestik yang harus diselesaikan, seperti konflik Aceh. Namun Gus Dur menjawab, tujuan tur mengembalikan nama baik Indonesia, berharap investor menanamkan modal lagi, dan mencari dukungan internasional terhadap keutuhan Aceh sebagai bagian dari kita.

Dominasi Gus Dur bukan penyimpangan politik luar negeri. Bung Karno dan Pak Harto juga merupakan figur dominan dengan gaya berbeda. Bagi mereka bertiga, menteri luar negeri merupakan pembantu aktif yang menjalankan diplomasi dan wajib mengikuti panduan kepala negara. Ada beda sedikit: Pak Harto lebih bersikap pasif menyerahkan otoritas kepada para menlu, sedangkan Bung Karno dan Gus Dur jauh lebih aktif bukan cuma menentukan arah, tetapi juga nuansa-nuansanya.

Peranan kepala negara vital karena posisi politis dan geografis Indonesia yang amat strategis. Negara-negara Asia dan Afrika mengandalkan kepemimpinan Indonesia di Gerakan Nonblok, Asia Tenggara menempatkan kita sebagai saka guru ASEAN. Saat Perang Dingin berkecamuk, Indonesia menjadi rebutan Blok Barat dan Timur. Barat menjalankan kebijakan subversif agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis, China dan Uni Soviet ingin menjadikan kita sebagai satelit.

Pada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru tidak terlalu mempersoalkan dominasi kepala negara kecuali untuk isu-isu kontroversial. Keterlibatan aktor-aktor masyarakat terbatas karena tak begitu peduli dengan proses pengambilan keputusan politik luar negeri yang elitis. Namun, saat Gus Dur memimpin, asumsi itu berubah. Globalisasi memaksa rakyat dan parlemen giat mengikuti perkembangan internasional dan regional yang berpengaruh terhadap situasi domestik. di era pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-4 Republik Indonesia, mulai menapaki terminologi dari sebuah Demokratisasi yang baru.

George Kahin dalam bukunya *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence* (1976), menyebutkan

bahwa politik luar negeri Indonesia senantiasa sangat dipengaruhi oleh politik domestik. Hal ini terbukti ketika dimulainya masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa “Gus Dur” ini. Jika dilihat kembali beberapa karakteristik cara diplomasi yang dilakukan oleh presiden Soekarno hingga Habibie yang cenderung melakukan diplomasi yang multilateral, dalam pemerintahan Gus Dur ketika memimpin Republik Indonesia ini, lebih mengedepankan diplomasi secara Bilateral. Mengapa demikian?

Gus Dur selalu menampilkan moment-moment pertemuan antarnegara dengan sikap yang bisa dikatakan *fun*. Fun disini berarti bahwa ketika Gus Dur melakukan kunjungan kenegaraan, suasana yang bisa dibilang “formal” bisa dibuat menjadi terkesan lucu atau dapat mencairkan suasana yang memanas. Teori *fun* yang dilakukan untuk mencairkan suasana ini dapat memudahkan transaksi kepentingan dan bahkan mempermudah pertarungan strategis, dan juga bisa meningkatkan bargaining position terhadap posisi Indonesia yang saat itu sedang melemah.<sup>144</sup>

Memang benar, posisi Indonesia ketika dipimpin oleh presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 ini mengalami depresi yang teramat berat. Ketika Indonesia dihadapkan dengan tragedi kerusuhan Mei 1998, kemudian Negara Timur Leste yang memerdekakan diri, dan beberapa kasus-kasus lainnya, mengakibatkan bahwa Gus Dur harus mampu memulihkan citra positif dari Indonesia.

Hal ini dibuktikan, ketika Gus Dur melakukan lawatan

---

<sup>144</sup> Abdurrahman, Wahid, 2006, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute. Hal 57.

atau kunjungan ke Luar Negeri lebih sering, tercatat bahwa Gus Dur pernah melakukan kunjungan ke 10 Negara Eropa – Asia hanya dalam waktu 17 hari saja. Walaupun hal ini terkesan sebagai sebuah Tour presiden, namun lebih menekankan bahwa kunjungan kenegaraan ini digunakan untuk menghadirkan citra positif bagi bangsa Indonesia dan kemudian dapat terbentuknya lagi bantuan perekenomian dari negara-negara Eropa maupun Asia. Tak mudah menilai sukses tur keliling dunia Gus Dur karena usia pemerintahannya yang pendek.

Pernyataan politik luar negeri perdana Gus Dur mengumumkan rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Ada dua alasan: pertama, menggairahkan hubungan dengan lobi Yahudi. Indonesia paling tidak bisa minta tokoh Yahudi, George Soros, tak mengacaukan pasar uang/modal untuk menghindari krisis moneter. Kedua, meningkatkan posisi tawar Indonesia menghadapi Timur Tengah yang tak pernah membantu Indonesia mengatasi krisis moneter.<sup>145</sup>

Gus Dur memperkenalkan tiga elemen politik luar negeri. Pertama, menjaga jarak sama dengan semua negara, kedua hidup bertetangga baik, **dan** ketiga ”kebajikan universal”. Seperti Bung Karno, Gus Dur berambisi mewujudkan ”poros kekuatan” di Asia. Ia sempat memulai prakarsa tersebut dengan menggagas Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, Timor Timur, Papua Niugini, Australia, dan Selandia Baru yang sempat disuarakan ke sembilan negara ASEAN.

Masih segar dalam ingatan, Gus Dur membujuk Singapura menyetujui pembentukan Forum Pasifik Barat dalam KTT ASEAN di Singapura, November 2000. Menteri Senior Lee Kuan Yew menolak permintaan itu. Wajar jika Gus Dur langsung ngamuk, membuat Singapura gempar. ”Pada dasarnya orang Singapura melecehkan Melayu. Kita dianggap

---

<sup>145</sup> Ibid. 75.

tak ada. Lee Kuan Yew menganggap saya sebentar lagi turun (dari jabatan presiden). Singapura mau enaknya sendiri, cari untungnya saja,” kata Gus Dur.

Sebelum itu Gus Dur mengemukakan pembentukan poros (axis) Indonesia-China-India. Tak lama kemudian ia memprakarsai pula poros ekonomi Indonesia, Singapura, China, Jepang, dan India. Sayang, sejumlah negara Barat—dan beberapa sekutu mereka di kawasan ini—merasa khawatir dengan fenomena ”kebangkitan Asia” ala Doktrin Wahid ini. Gus Dur minta bantuan Mensesneg Bondan Gunawan dan sejumlah teman untuk merumuskan pembentukan organisasi Dewan Keamanan Nasional. Sebagai presiden, Gus Dur juga menampakkan ketegasannya seperti ia berkeinginan setiap sarapan sudah di-brief tentang perkembangan politik dan keamanan regional/internasional yang mutakhir dan apa yang harus dilakukan pemerintah.

Pada masa itu seharusnya kita bangga menjadi warga Merah-Putih karena keberanian dan tekad besar Gus Dur mengembalikan pamor Indonesia sebagai kekuatan menengah yang sedang tercabik oleh krisis moneter, konflik sosial, dan proses disintegrasi. Walaupun dengan keadaan fisiknya yang kurang baik, namun Ia seorang visioner, ilmuwan, praktisi, sekaligus presiden luar negeri yang mungkin sukar kita temukan lagi. Saya menyukai gaya kepemimpinan Gus Dur yang bisa dikatakan Talk Less Do More, ia tidak seperti SBY yang terlalu berlarut-larut tanpa ujung dalam memikirkan suatu masalah dan menyerahkan kepada menteri-menteri atau bawahannya, yang pada akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk korupsi sehingga permasalahan tersebut terbengkalai dan ujung-ujungnya SBY yang terkena kesan buruk.<sup>146</sup>

Gus Dur tampak lebih tegas dan tak banyak bicara, ketimbang menyerahkan penyelesaian masalah kepada bawahannya yang belum tentu akan sanggup mengerjakan, ia

---

<sup>146</sup> Opcit.. Ikrar Nusa Bhakti,

lebih suka langsung bertindak dengan caranya yang bisa dikatakan unik, walaupun caranya itu terkadang tidak dimengerti publik hingga menjadi kontroversi. Meskipun dari segi fisik dan kemampuan untuk melihat Gusdur terlihat sangat kurang memahami pemerintahan, namun dalam prakteknya ia sangat memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

## **BAB VII**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA PRESIDEN MEGAWATI**

#### **A. Profile Presiden Megawati.**

Megawati. Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" (lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947; umur 72 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua.<sup>147</sup>

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.

Megawati Soekarnoputri adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ibunda Megawati,

---

<sup>147</sup> Op.cit. Setyohadi.Tuk, hal 88.

Fatmawati, adalah seorang gadis kelahiran Bengkulu di mana Soekarno dahulu pernah diasingkan pada masa penjajahan Belanda. Ia dilahirkan pada masa Agresi Militer Belanda. Pada waktu Soekarno diasingkan ke pulau Bangka, Fatmawati melahirkan seorang bayi yang dinamai Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 23 Januari 1947 di kampung Ledok Ratmakan, tepi barat Kali Code. Setelah kemerdekaan Indonesia, Megawati lalu dibesarkan di Istana Merdeka.<sup>148</sup>

Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak sampai lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (juga tidak sampai lulus). Karier politik Megawati Soekarnoputri yang penuh lika-liku dan warna seakan searah dengan garis kisah kehidupan perjalanan bahtera rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan.

Suami pertamanya adalah Letnan Satu (Penerbang) Surindro Supjarso, seorang pilot pesawat AURI dan perwira pertama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Republik Indonesia. Surindro sosoknya tinggi jangkung, berwajah ganteng dengan model rambutnya berjambul, di kalangan rekan-rekannya ia kerap dipanggil dengan "Pacul". Surindro adalah sahabat karib Guntur Soekarnoputra, kakak Megawati. Konon kabarnya, Gunturlah yang menjodohkan Mega dengan Surindro. Mereka menikah pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 1968 bertempat di Jalan Sriwijaya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta. Setelah itu,

Megawati lalu mengikuti suaminya, Surindro, tinggal di Madiun, Jawa Timur. Di sana ia menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak pertamanya, Mohammad Rizki Pratama. Ketika Mega sedang mengandung anak keduanya (Mohammad Prananda Prabowo), Surindro mengalami kecelakaan pesawat yang merenggut nyawanya. Pesawat Skyvan T-701 yang dikendalikannya terempas di laut sekitar perairan pulau Biak,

---

<sup>148</sup> Ibid.



Irian Jaya, pada tanggal 22 Januari 1970. Surindro dan tujuh orang awak pesawatnya hilang tak diketahui rimbanya dan hanya tersisa serpihan puing-puing tubuh pesawat yang ditemukan tersebar berserakan di laut sekitar perairan tersebut. Mega dirundung duka yang mendalam, ia pun berkabung cukup lama.

Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1972, waktu itu usia Megawati masih baru menginjak awal dua puluhan dengan mempunyai dua orang anak yang masih balita, ia lalu kembali merajut kasih asmara dengan seorang pria yang konon adalah pengusaha asal Mesir, yang juga seorang Diplomat Mesir yang kala itu sedang bertugas di Jakarta, yang bernama Hassan Gamal Ahmad Hasan. Namun, pernikahan Mega yang kedua kali ini tak berlangsung lama, hanya bertahan tiga bulan, sebab pernikahan Megawati dengan Hassan (suami kedua Mega) menjadi sorotan Media Massa dengan alasan bahwa waktu itu Megawati masih terikat perkawinan yang sah dengan Surindro, suami pertamanya dan pada saat itu belum ada keputusan yang pasti dari pemerintah, dalam hal ini adalah Markas Besar (Mabes) TNI-AU, mengenai nasib suami pertamanya itu yang jenazahnya sampai sekarang tak berhasil ditemukan.<sup>149</sup>

Keluarga Bung Karno pun tak tinggal diam, mereka kemudian menyewa seorang pengacara, Sumadji namanya, guna membatalkan pernikahan Mega yang kedua yang kontroversial itu melalui penetapan keputusan oleh Pengadilan Tinggi Agama - Jakarta, akhirnya Hassan pun mengalah dan menyerah. Dari pernikahan dengan suami keduanya yang kandas ini, Megawati tidak dikaruniai anak. Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangga Megawati Soekarnoputri baru benar-benar terjalin dan dirasakan setelah ia menikah dengan Moh. Taufiq Kiemas, rekannya sesama aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dulu, yang juga

---

<sup>149</sup> Ibid. hal 90.

menjadi salah seorang penggerak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Suami ketiga Mega, Taufiq Kiemas, selain aktif di GMNI, ia juga bergabung dengan "*Inti Pembina Jiwa Revolusi*", yaitu suatu organisasi yang menegakkan ajaran "**Soekarno**". Taufiq Kiemas, yang oleh Guntur diberi julukan "*si Bule*", menikahi Mega pada akhir Maret 1973. Pesta pernikahan mereka ini berlangsung sederhana di "*Panti Perwira*", Jakarta Pusat. Dari pasangan ini, maka lahirlah Puan Maharani, yang merupakan anak ketiga dari Megawati Soekarnoputri dan adalah anak pertama Taufiq Kiemas satu-satunya. Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada diri Megawati Soekarnoputri. Karena sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, ia pun selalu aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).<sup>150</sup>

Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karier politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI. Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.

Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan.

---

<sup>150</sup> Ibid. hal 98.

Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.

Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun terpisah menjadi PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega. Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah "Mega Bintang". Mega sendiri memilih golput saat itu.<sup>151</sup> Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi. Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain, dan memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan presiden adalah 373 banding 313 suara.

Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman

---

<sup>151</sup> Ibid. hal 104.

Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.

Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannya, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.

Megawati dan PDI-P menunjuk Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Akhirnya melalui proses pemilu yang cukup panjang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 - 2019. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, 20 September 2014, Megawati ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.

Perjalanan karier Megawati antara lain:

- Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bandung); (1965)
- Anggota Fraksi PDI DPR RI Komisi IV (1987-1997)
- Ketua DPC PDI Jakarta Pusat
- Ketua Umum PDI versi Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya (1993-1996).
- PDI yang dipimpinnya berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999-sekarang.
- Wakil Presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
- Presiden Republik Indonesia ke-5 (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

Riwayat pendidikan Megawati antara lain:

- SD Perguruan Cikini Jakarta (1954-1959)
- SLTP Perguruan Cikini Jakarta (1960-1962)
- SLTA Perguruan Cikini Jakarta (1963-1965)
- Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung (1965-1967); tidak selesai
- Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta (1970-1972); tidak selesai

## **B. Kebijakan Luar Negeri Presiden Megawati.**

Di masa kepresidenannya yang hanya tiga tahun, Megawati menggariskan sejumlah kebijakan penting. Tak semua dipuji, ada juga kebijakannya yang membuatnya terus di-bully lawan politik. Setelah resmi melanjutkan era pemerintah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 23 Juli 2001, Megawati segera menyusun Kabinet Gotong Royong. Ada Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ada pula Jusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sementara bidang perekonomian dikoordinatori oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Kala itu, Yusril Ihza Mahendra menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ada Boediono sebagai Menteri Keuangan dan Rini Soemarno sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.<sup>152</sup>

Ada pula Kwik Kian Gie sebagai Kepala Bappenas dan Hatta Rajasa sebagai Menristek. Belakangan, sebagian orang pilihan Megawati ini justru berbalik darinya. SBY berduet dengan Jusuf Kalla dan mengalahkan Mega pada 2004. Kemudian pada 2009, SBY kembali mengalahkan Megawati

---

<sup>152</sup> <http://pembelajaranhistory.blogspot.com/2012/06masa-pemerintahan-megawati.html>

dengan menggandeng Boediono. Hatta Rajasa maju sebagai cawapres Prabowo pada 2014 berhadapan dengan kubu Megawati yang mengusung Jokowi.

Begitu pula Kwik Kian Gie yang pada 2019 ini mendukung Prabowo-Sandiaga. Privatisasi BUMN Di antara berbagai kebijakan Megawati, privatisasi BUMN boleh jadi yang paling kontroversial. Dikutip dari buku *Problem Demokrasi dan Good Governance di Era Reformasi* (2013), BUMN dijual dengan alasan untuk membayar utang negara. Megawati diwarisi utang negara yang membengkak imbas dari krisis moneter pada 1998/1999. Penjualan belasan BUMN yang nilainya mencapai Rp 18,5 triliun berhasil menurunkan utang. Salah satu privatisasi yang paling diperdebatkan ialah Indosat. Kala itu, Indosat dijual seharga Rp 4,6 triliun kepada Tamasek Holding Company, BUMN Singapura.

Lima tahun kemudian, Tamasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom dengan harga mencapai tiga kali lipat. Penjualan Indosat masih kerap diperbincangkan. Presiden

Pada 2011, Megawati pernah tak terima pernyataan bahwa privatisasi badan-badan usaha milik negara terjadi pada era kepemimpinannya. Megawati mengingatkan bahwa dia tak menjabat sebagai presiden secara utuh selama lima tahun. Mega menggantikan presiden ke-4 Abdurrahman Wahid sejak 2001. Secara berkelakar, Megawati menyebut dirinya sebagai "Presiden Setengah" karena tak memerintah sejak awal pemerintahan. Keputusan ini kerap membuatnya di-bully. "Penjual aset negara" adalah kalimat yang kerap dilontarkan lawan-lawan politiknya untuk menyerang kredibilitas Megawati.<sup>153</sup>

Kebijakan lain Megawati yang kerap dipermasalahkan ialah sistem kerja alih daya atau outsourcing. Dikutip dari buku *Rapor Capres* (2014), Megawati dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam lahirnya outsourcing.

---

<sup>153</sup> Ibid.

Kebijakan ini lahir lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disahkan di era Mega. Undang-undang itu sebenarnya sudah jelas mengatur keberadaan perusahaan penyedia tenaga kerja. Penyedia tenaga kerja yang berbentuk badan hukum wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan. Akan tetapi, sistem ini banyak diprotes buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Mereka tidak mendapat tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak. Sejak maraknya praktik outsourcing,

Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei selalu menyertakan penghapusan outsourcing sebagai salah satu tuntutan. Merespons derasnya kritik dari wong cilik kota ini, Mega menjanjikan akan menghapus sistem outsourcing. Janji ini diungkapkannya ketika maju sebagai capres untuk kedua kali pada 2009. Sayang, Megawati gagal menang piplres.

Pembentukan KPK di antara berbagai warisannya untuk Indonesia, pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah warisan yang layak dipuji. KPK berhasil memecah kebuntuan penanganan korupsi yang mengakar di negeri ini. Sepanjang sejarahnya, KPK dengan berani menangkap banyak pejabat penting di pemerintahan hingga DPR. Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dimulai sejak kejatuhan Soeharto. Presiden BJ Habibie membentuk berbagai komisi baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Ombudsman. Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di era Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk pula Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Baru di era Mega, tepatnya pada 2003 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Menanggapi masih maraknya korupsi dan ketidakberhasilan pemerintah mengatasi korupsi itu, Mega

mengatakan, "Masalah korupsi sepertinya saya itu heran, ini bukan seperti membalik tangan untuk diselesaikan oleh pemerintahan, yang praktis hanya punya waktu tiga tahun. "Bukan saya mengatakan hal ini untuk membela diri," seperti dilansir dari harian Kompas, 23 Desember 2003. Sebab, lanjut Mega, selama 30 tahun lalu, korupsi juga tidak bisa diatasi dengan baik. "Ini suatu hal yang sempat saya ungkap. Kami terus berupaya menyelesaikan hal-hal itu," kata dia. Lembaga-lembaga yang dibuat telah mencukupi. "Bahkan yang paling baru, KPK. Tetapi, ya, KPK masak terus langsung berjalan dan terus menyelesaikan segala soal," ujarnya. Mega menilai yang penting adalah adanya kemauan politik yang kuat untuk memberantas korupsi secara terus-menerus.

Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati mengalami ujian yang berat. Indonesia sejak semula, sejak awal kemerdekaan telah mencanangkan politik luar negeri yang bebas aktif dan non-blok, yang oleh Bung Hatta dikiaskan sebagai, perlunya mendayung di dua karang, tidak memihak blok Timur maupun blok Barat. Namun pemerintahan Megawati banyak dituding lebih "condong" ke arah Amerika Serikat. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia selalu diabdikan pada kepentingan nasional Indonesia, apapun bentuk kerjasamanya dan dengan negara manapun. Kepentingan nasional Indonesia yang menggerakkan segala hubungan kerjasama ataupun hubungan luar negeri Indonesia sebagai negara berdaulat.

Pada era kepemimpinan Presiden Megawati, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diabdikan pada kepentingan keamanannasional Indonesia. berat utama yang diemban pemerintahan Megawati adalah mengembalikan citra dimata negara-negara ASEAN lainnya bahwa Indonesia menetapkan ASEAN tetap menjadi corner stone politik luar negeri Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh Megawati dengan cara mengadakan lawatan ke negara-negara ASEAN sebagai prioritas sebelum mengunjungi negara-negara lain.



Langkah ini diambil selaras dengan skala prioritas kabinet gotong royong yang mengutamakan upaya memagari potensi konflik atau memelihara persatuan dan kesatuan. Hal lain terbukti dari berbagai kebijakan politik dan ekonomi Megawati di ASEAN. Kebijakan luar negeri Indonesia di ASEAN pada masa Megawati inilah yang ingin dikaji lebih dalam oleh penulis.<sup>154</sup> Peran Indonesia dalam kancah organisasi regional ASEAN mulai dipertanyakan, baik oleh kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Tidak seperti masa sebelum krisis ekonomi, peran regional Indonesia di forum ASEAN amat menonjol, bahkan sempat dijuluki *big brother* di kalangan negara anggota ASEAN lainnya. Namun, ketika krisis ekonomi melanda kawasan ini, kohesivitas dan integritas ASEAN dalam menghadapi dampak sosial dari krisis mulai diragukan. Negara-negara anggota ASEAN dipandang lebih sibuk mencari solusi penanggulangan krisis sendiri-sendiri mengingat kompleksitas dan tingkat krisis yang dialami masing-masing negara berbeda satu dengan lainnya, termasuk Indonesia yang dianggap paling parah dan paling lambat pemulihannya.

Hal ini secara tidak langsung menyulitkan Indonesia untuk mempertahankan peran regionalnya, apalagi Malaysia dan Thailand relatif telah berhasil keluar dari krisis. Apalagi jika diingat beberapa pernyataan kontroversial yang dilontarkan Presiden Abdurrahman Wahid berkaitan dengan keadaan dalam negeri anggota ASEAN lainnya atau misalnya ungkapan kekecewaan terhadap ASEAN dengan mengajukan gagasan pembentukan "Forum Pasifik Barat", dalam derajat tertentu sempat mengaburkan peran Indonesia itu.

Untuk itu, Indonesia perlu menegaskan kembali komitmennya bahwa ASEAN merupakan "soko guru" politik

---

<sup>154</sup> Andy Rachmianto, *Politik Pemerintahan Masa Megawati*. Di akses pada <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F14435/Politik%20Luar%20Negeri%20Pemerintahan.htm> 2 Agustus 2019

luar negeri sebagaimana diamanatkan GBHN dengan tetap menyandarkan diri pada politik luar negeri "bebas-aktif" sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Politik luar negeri perlu dilaksanakan melalui diplomasi yang konsisten dalam prinsip serta rasional dan luwes dalam pendekatan. Dengan kembali menempatkan ASEAN sebagai "fokus" kebijakan luar negeri, diharapkan Indonesia dapat meraih kembali peran regional di kawasan Asia Tenggara, yang nantinya akan menjadi modalitas dan "posisi tawar" bagi pengembangan peran yang lebih luas di kawasan lain maupun di tingkat global seperti yang telah dijalankan dua periode terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.

Dengan kata lain, Indonesia perlu tampil dengan "profil" politik luar negeri dan diplomasi yang lebih tegas dan konsisten serta tidak perlu keluar dengan berbagai pernyataan kontroversial yang dapat menyinggung martabat dan harga diri negara lain, khususnya di kalangan negara ASEAN. Hal ini penting mengingat ASEAN saat ini tengah menghadapi masalah sulit yang diwarnai berbagai sengketa bilateral maupun konflik internal di antara anggotanya.<sup>155</sup>

Kesalahpahaman saat Presiden Abdurrahman Wahid menghadiri KTT informal ASEAN di Singapura tahun lalu kiranya tidak perlu terulang guna mengembalikan citra Indonesia yang selama ini disegani anggota ASEAN lainnya.<sup>156</sup> Dalam kaitan ini, rencana Presiden Megawati untuk mengunjungi seluruh negara anggota ASEAN diharapkan dapat menjadi indikasi awal bagi Indonesia untuk memainkan kembali peran regionalnya di kawasan ini. Meski demikian, setelah kunjungan diharapkan Presiden Megawati tetap memusatkan perhatiannya kepada persoalan dalam negeri dan tidak perlu terlena untuk melakukan serangkaian muhibah ke luar negeri seperti pendahulunya. Sebaliknya,

---

<sup>155</sup> Ibid

<sup>156</sup> Ibid

pelaksanaan tugas diplomasi dapat sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Luar Negeri dan jajarannya dengan melibatkan berbagai aktor lain di luar pemerintah yang berkompeten dengan pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pada masa ini pemerintahnya dituntut untuk segera menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang mendesak seperti pemulihan ekonomi dan penegakan hukum, adapun beberapa kebijakan yang ditempuh guna perbaikan ekonomi pada masa ini seperti mengadakan pertemuan guna mengadakan penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar US\$ 5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke 3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116,35 triliun.<sup>157</sup>

Pada masa ini Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk, namun belum menunjukkan hasil apa-apa, padahal korupsi adalah masalah yang krusial karena menjadikan para investor berfikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Politik domestik pada masa ini masih saja tidak berbeda jauh dengan pemerintahan sebelumnya dimana Indonesia masih saja diwarnai dengan konflik sipil dan etnis tidak hanya itu wabah terorisme pun turut serta mewarnai nusantara, otomi daerah diberlakukan sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah-daerah di Indonesia, pada masa ini pulalah peletakan dasar demokrasi terbuka. Di bawah Presiden Megawati (dengan Hassan Wirayudha seorang diplomat karir sebagai Menlu).

Polugri RI tampak kembali bergeser ke kanan. Iniditandai dengan dijadikannya AS sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati. Setelah Gus Dur diturunkan dari jabatan Presiden RI dengan kurang hormat, Megawati yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden

---

<sup>157</sup> JH, Wijaya, . and Permatasari, I.A., 2018. *Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia*. Jakarta: Caktawala. Hal 207.

naikmenggantikan posisi Gus Dur sebagai Presiden RI yang kelima. Megawati mewarisi kondisi domestic Indonesia yang kacau dan kondisi hubungan luarnegeri Indonesia yang minim kepercayaan internasional. Megawati dalam memimpin banyak mengambil kebijakan yang berorientasi kanan yang ditandai dengan dijadikannya Amerika Serikat sebagai negara non-Asia pertama yangdikunjungi Megawati.

Selanjutnya, Megawati banyak melakukan kunjungan luar negeri sebagai bentuk kelanjutan usaha-usaha pendahulunya untuk mencari dukungan dan kerjasama luar negeri. Kebijakan luar negeri Megawati yang menarik adalah kerjasama dengan Rusia melalui pembelian pesawat Sukhoi. Kebijakan yang lain adalah pemutusan hubungan dengan International Monetary Fund (IMF).<sup>158</sup>

Dalam kedua hal tersebut, terbukti bahwa Megawati mereduksi kecenderungannya pada Barat dan berusaha bertindak netral. Meskipun demikian banyak yang menyebut era kepemimpinan Megawati seperti mendayung yang menabrak karang terus menerus. Hutang Indonesia pada saat itu masih belum bisa tertanggulangi dengan baik. Megawati menjalankan strategi politik luar negeri yang cenderung *low profile*.

Pada masa Megawati ini, terjadi peristiwa Bom Bali, ujian bagi politik luar negeri Indonesia. Semenjak peristiwa tersebut, isu terorisme menjadi perhatian Indonesia di forum internasional dan lagi-lagi mencoreng citra baik yang sedang dibangun Indonesia. Akan tetapi berkat kepiawaian Departemen Luar Negeri yang saat itu menjabat, maka permasalahan ini tidak berdampak sangat serius terhadap hubungan internasional Indonesia.

Sayangnya, di tengah-tengah usaha untuk membangun kembali diplomasi Indonesia, justru terjadi kegagalan diplomasi terkait sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan

---

<sup>158</sup> Ibid. hal 208.

Malaysia yang berakibat terhadap lepasnya kedua pulau out dari NKRI. Secara umum dapat dilihat bahwa kepentingan nasional Indonesia pada era Megawati masih seputar menjaga stabilitas ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Di sisi lain, perjuangan untuk memulihkan citra baik Indonesia di mata internasional masih terus dilakukan melalui diplomasi untuk bantuan dan dukungan asing, investasi sektor swasta, perdagangan bebas, dan promosi.

Pada masa tersebut, Megawati memusatkan perhatian politik luar negeri Indonesia pada wilayah regional terlebih dahulu. Pada periode pemerintahan Megawati, Indonesia sedang berada dalam tahap pembentukan sistem politik nasional yang lebih mapan dan pola pemerintahan mulai terlaksana secara desentralisasi. Dengan demikian, demokrasi yang diterapkan sedikit demi sedikit telah memunculkan petanda yang baik. Komitmen yang kuat dalam era Megawati untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri Indonesia di mata dunia membuahkan hasil dengan mulai aktifnya kembali hubungan diplomasi Indonesia dengan 193 social- 193 social lain. Selain itu, Megawati juga berhasil mengelola konflik yang terjadi baik secara horizontal maupun vertical sehingga tidak memarah lebih jauh. Perekonomian Indonesia juga sudah mengalami perbaikan secara infrastruktur dan kasus- kasus KKN mulai mengalami pengusutan. Secara keseluruhan, keberhasilan Megawati lebih terkait pada pengelolaan konflik domestic.<sup>159</sup>

Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diakannya pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Hambatan yang mewarnai kepemimpinan Megawati kurang lebih samadengan yang sebelum- sebelumnya, yaitu

---

<sup>159</sup> Ibid, hal 208.

instabilitas ekonomi, politik, keamanan dan kurangnya kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi Indonesia. Hanya saja pada era Megawati, terjadi konflik terorisme yang menambah daftar masalah keamanan yang perlu segera ditangani agar 194oci membantu perbaikan diplomasi dan hubungan luar negeri Indonesia.

Salah satu yang menjadi kebijakan POLUGRI Megawati yaitu membangun image positif di mata dunia internasional. Tentu untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah yang di bayangkan. Maka perlu adanya penguatan kerjasama antara POLRI dan TNI sebagai keamanan negara. Di tengah konflik internal yang kerap kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan baik itu pemerintah daerah atau pemerintahan pusat. Konflik internal ini sering di tenggarai oleh konflik etnis. Pada masa kepemimpinan megawati banyak kerusuhan terjadi di bagian timur, seperti, papua barat, 194ocial utara, poso, palu, sedangkan di dekat pulau sumatera tepatnya Aceh terdapat GAM yang seringkali mendapat sorotan masyarakat internasional. Hal ini tak lantas membuat pemerintah harus berdiam diri, situasi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin bangsa. Dengan demikian POLUGRI yang utama pada kepemimpinan megawati sangat dirasa sulit untuk di capai. Kebijakan-kebijakan Pada Masa Pemerintahan Megawati antara lain:

1. Memilih dan Menetapkan ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan.

2. Membangun Tatanan Politik yang Baru Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.

3. Menjaga Keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.

4. Melanjutkan Amandemen UUD 1945 Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

5. Meluruskan Otonomi Daerah Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah.<sup>160</sup>

Pada era kepemimpinan Megawati, politik luar negeri Indonesia kembali lebih menekankan kepada sentralitas ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia dengan tetap menyandarkan diri pada politik luar negeri “bebas-aktif” sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.<sup>161</sup> Yang tercantum dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang arah kebijakan, yaitu: “meningkatkan kerjasama dalam segala bidang, dengan 195social yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan”. Fokus yang diinginkan oleh Megawati terhadap ASEAN ditunjukkan dengan peran aktif Indonesia saat menjabat sebagai ketua ASEAN untuk periode 2003-2004, kemudian disusul dengan usulan mengenai pembentukan ASEAN Security Community yang disepakati pada bulan Oktober 2003.

Setelah peristiwa runtuhnya WTC, terjadi ledakan Bom Bali pada Oktober 2002. Hal tersebut menjadikan ancaman besar bagi seluruh umat Islam di dunia terutama di Indonesia. Untuk itu, Megawati yang saat itu menjabat sebagai presiden membuat kebijakan yang akan melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme. Kemudian dibentuklah Undang-Undang No. 16 tahun 2003 tentang pemberlakuan Perpu No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu juga dikeluarkan Inpres No.5 tahun 2002 yang memberikan otoritas kepada Badan Intelijen Negara

---

<sup>160</sup> Op.cit. JH Wijaya, hal 231.

<sup>161</sup> Athiqah Nur Alami. *Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri*. 165

untuk mengkoordinasikan kegiatan Intelijen dalam menangani kasus terorisme di Indonesia.

Dalam penyusunan drafnya, tim melakukan studi banding ke beberapa negara, diantaranya adalah Singapura, Kanada, Malaysia, Australia, India dan Amerika. Hasil yang didapatkan yaitu masukan dari negara Kanada, Amerika dan Australia melalui diskusi intensif yang berlangsung di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi ke berbagai kota besar di Indonesia. Tujuannya untuk memperoleh masukan dari masyarakat luas sekaligus untuk menumbuhkan pemahaman yang sama yang sama di kalangan masyarakat akan pentingnya dan perlunya mempunyai undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Upaya yang dilakukan oleh tim yaitu konsultasi terhadap pakar pidana internasional untuk menghindari adanya kontroversi pada kalangan masyarakat dilakukan hal sebagai berikut:

1. Menghapus “Pembentukan Badan anti Terorisme” dengan pertimbangan agar masyarakat tidak trauma dengan kehadiran Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban di masa lampau.
2. Memasukkan perlindungan tersangka dan korban tindak terorisme dengan tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan kepolisian dalam melakukan tindakan pro Justicia.
3. Memasukkan penilaian terhadap laporan intelijen dari imigrasi, kejaksaan, kepolisian, bea cukai, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis yang dilaksanakan melalui proses hearing dibawah ketua pengadilan negeri yang ditunjuk.
4. Mengeluarkan motivasi politik dari tindak pidana terorisme sehingga setiap gerakan atau aksi demonstrasi untuk melaksanakan hak-hak politik, ekonomi, dalam



mewujudkan tanpa perlu adanya rasa takut dianggap sebagai teroris.<sup>162</sup>

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah masa dimana Indonesia sedang mengalami masa pemulihan setelah krisis moneter yang melanda Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Disini Megawati melakukan berbagai cara untuk terus memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia. Megawati banyak melakukan kunjungan luar negeri sebagai bentuk kelanjutan usaha-usaha pendahulunya untuk mencari dukungan dan kerjasama luar negeri.

Selain masalah dalam bidang ekonomi dalam masa kepemimpinannya ditambah dengan masalah terjadinya bom Bali yang menyebabkan Indonesia menjadi perhatian di forum Internasional dan juga membuat citra yang sedang dibangun Indonesia menjadi hancur lagi. Maka dari itu Megawati terus membangun image positif di mata dunia internasional. Dan untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah yang di bayangkan, namun ia bisa mewujudkan beberapa keberhasilan didalam masa pemerintahannya.

Diharapkan Presiden Megawati dapat menunjuk figur Menteri Luar Negeri yang sepenuhnya memfokuskan diri pada tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri. Hal ini penting mengingat sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri yang berperan sebagai konsultan dan koordinator bagi penyelenggaraan segenap aspek hubungan luar negeri.

Lebih dari itu, pemerintah Megawati juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam

---

<sup>162</sup> Ibid. hal 232.

penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan UUD 1945. Seperti diketahui, selama ini Komisi I DPR telah menjalankan peran cukup signifikan dan tegas dalam mempengaruhi dan mengontrol pelaksanaan aktivitas diplomasi Indonesia. Karena itu, pemerintahan baru perlu mengupayakan sebuah "mekanisme kerja" yang lebih solid dengan Komisi I DPR sehingga diharapkan dapat memunculkan *a concerted and united foreign policy* sebagai hasil kerja bersama lembaga eksekutif dan legislatif yang lebih konstruktif dan bertanggung jawab atas dasar prinsip *check and balance*. Andaikata memungkinkan, dapat diterapkan *bipartisanship foreign policy* yang berlandaskan kolaborasi antara dua partai utama di DPR serta antara Presiden dan para pemimpin oposisi.<sup>163</sup>

Terlepas dari pentingnya politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu platform pemerintahan baru dalam membantu upaya pemulihan ekonomi dan stabilitas keamanan di dalam negeri, kiranya tetap perlu diingat, Presiden Megawati akan lebih dihargai di mata rakyat bila memprioritaskan diri mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat di mana nasib ratusan ribu atau mungkin jutaan pengungsi dalam kondisi amat memprihatinkan.

Dengan kata lain, anggaran Presiden ke luar negeri dihemat dan dialokasikan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat di daerah-daerah itu, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Dan yang lebih penting, untuk membuktikan kepada

---

<sup>163</sup> Andy Rachmianto, *Politik Pemerintahan Masa Megawati*. <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F14435/Politik%20Luar%20Negeri%20Pemerintahan.htm> 2 Agustus 2019.

rakyat bahwa pemerintah Megawati memiliki *sense of urgency* dan *sense of crisis* yang belum berhasil dibangun pemerintahan sebelumnya.

Kebijakan luar negeri Megawati yang menarik adalah kerjasama dengan Rusia melalui pembelian pesawat Sukhoi. Kebijakan yang lain adalah pemutusan hubungan dengan International Monetary Fund (IMF). Dalam kedua hal tersebut, terbukti bahwa Megawati mereduksi kecenderungannya pada Barat dan berusaha bertindak netral. Meskipun demikian banyak yang menyebut era kepemimpinan Megawati seperti mendayung yang menabrak karang terus menerus. Hutang Indonesia pada saat itu masih belum bisa tertanggulangi dengan baik. Megawati menjalankan strategi politik luar negeri yang cenderung low profile.

## **BAB VIII**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

#### **A. Profil Susilo Bambang Yudhoyono**

Jenderal TNI (HOR.) (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., GCB., AC.lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 70 tahun adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia adalah Presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.<sup>164</sup>

Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orangtuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewati sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999, dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun

---

<sup>164</sup> Op.cit. Setyohadi.Tuk, hal 91.

pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amendemen UUD 1945.

Ia lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan trah Hamengkubuwana II. Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan putri ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1978) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1980).

Pendidikan SBY antara lain:

- Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
- American Language Course, Lackland, Texas Amerika Serikat, 1976
- Airbone and Ranger Course, Fort Benning, Amerika Serikat, 1976
- Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, Amerika Serikat, 1982-1983
- On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, Amerika Serikat, 1983
- Jungle Warfare School, Panama, 1983
- Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984
- Kursus Komando Batalyon, 1985
- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, 1988-1989

- Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat
- Master of Art (M.A.) dari Management Webster University, Missouri, Amerika Serikat
- Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), 2004
- Guru Besar Ilmu Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), 2014<sup>165</sup>

Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Periode 1974-1976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Kariernya berlanjut pada periode 1976-1977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981, Paban Muda Sops SUAD (1981-1982. Periode 1982-1984, ia belajar di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.<sup>166</sup>

Tahun 1983, ia belajar di *On the job training in 82-nd Airbone Division* (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).

---

<sup>165</sup> Ibid, hal. 92.

<sup>166</sup> Ibid, hal 93.

Periode 1988-1989, ia belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke *US Command and General Staff College* (Fort Leavenworth) Kansas Amerika Serikat pada tahun 1991. Periode (1989-1993), ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korpri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994, Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (1995-1996). Lulusan Master of Art (M.A.) dari Management Webster University Missouri ini juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri.

Karier politik SBY dimulai dari tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 26 Oktober 1999, ia dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.<sup>167</sup>

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak

---

<sup>167</sup> Ahmad Yani Basuki, *Diplomasi & politil luar negeri dari Pemikiran dan Pidato Presiden SBY*, Staf khusus Presiden RI, Jakarta, 2013, hlm. 286.

sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai puncak karier politik. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 % suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Bali tanggal 30 Maret 2013, Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum.<sup>168</sup>

Selanjutnya pada Kongres IV Partai Demokrat yang

---

<sup>168</sup> Ibid. hal 287.



diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya tanggal 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015-2020.

Karier SBY di militer antara lain:

- Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
- Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
- Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
- Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
- Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
- Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
- Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
- Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
- Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
- Dosen Seskoad (1989-1992)
- Korpri Pangab (1993)
- Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
- Asops Kodam Jaya (1994-1995)
- Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
- Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
- Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
- Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda
- Asospol Kassospol ABRI/wakil Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Umum MPR 1998)
- Kassospol ABRI/ Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
- Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
- Menteri Pertambangan dan Energi (sejak 26 Oktober 1999)

- Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan(Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
- Menteri Koordinator Politik Dan Keamanan(Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri) mengundurkan diri 11 Maret 2004.
- Presiden Republik Indonesia (2004-2014).<sup>169</sup>

Jenderal TNI (Purnawirawan) Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada periode 1979-1980 dan 1986-1988 ini meraih gelar doktor (Ph.D.) dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 3 Oktober 2004. Pada 15 Desember 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari Universitas Thammasat di Bangkok, Thailand.[10] Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu adalah ilmu. Penghargaan yang diperoleh SBY antara lain:

- Tri Sakti Wiratama (prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual), 1973
- Adhi Makayasa (lulusan terbaik Akabri 1973)
- Satya Lencana Seroja, 1976
- Honor Graduate IOAC, Amerika Serikat, 1983
- Satya Lencana Dwija Sista, 1985
- Lulusan terbaik Seskoad Susreg XXVI, 1989
- Dosen Terbaik Seskoad, 1989
- Satya Lencana Santi Dharma, 1996
- Satya Lencana United Nations Peacekeeping Force (UNPF), 1996

---

<sup>169</sup> Ibid. hal. 300.

- Satya Lencana United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja, and Western Sirmium (UNTAES), 1996
- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, 1998
- Bintang Yudha Dharma Nararya, 1998
- Wing Penerbang TNI-AU, 1998
- Wing Kapal Selam TNI-AL, 1998
- Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, 1999
- Bintang Yudha Dharma Pratama, 1999
- Bintang Dharma, 1999
- Bintang Maha Putera Utama, 1999
- Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik, 2003
- Bintang Asia (*Star of Asia*) oleh *BusinessWeek*, 2005
- Bintang Kehormatan Darjah Kerabat Laila Utama oleh Sultan Brunei, 2006
- Yang Dipertuan Maharajo Pamuncak Sari Alam oleh Masyarakat Tanjung Alam dan Pewaris Kerajaan Pagaruyung, 2006
- Seri Indra Setia Amanah Wangsa Negara oleh Lembaga Adat Melayu se-Provinsi Riau, 2007
- Darjah Utama Seri Mahkota oleh Yang DiPertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin, 2008
- Gelar Adat Melayu Jambi oleh Lembaga Adat Melayu Jambi
- 100 tokoh Berpengaruh Dunia 2009 kategori Pemimpin & Revolusioner Majalah TIME, 2009
- Patuan Sorimulia Raja oleh Lembaga Batak Puak Angkola, 2011.
- *Knight Grand Cross in the Order of the Bath* oleh Ratu Elizabeth II, 2012.
- Bapak Demokrasi Indonesia oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, 2012.
- Warga Kehormatan Kota Quito oleh Wali kota Quito, 2012.

- Guru Besar (Profesor) dalam bidang ilmu Ketahanan Nasional oleh Universitas Pertahanan Indonesia.
- Apresiasi atas berbagai upaya penting atas pemberantasan korupsi, dari Forum for Budget Transparency (FITRA), 2014
- Order of Sikatuna with the Rank of Raja dengan kategori Grand Collar dari Pemerintah Filipina, 2014.
- Order of Temasek (First Class), dari Pemerintah Singapura, 2014.
- Global Statesmanship Award dari World Economic Forum (WEF), 2014.
- Penghargaan Jas Merah dari The Sukarno Center, 2014.
- Semeton Tamiu Utama Desa Pakraman Tampaksiring, 2014.
- Anakaji To Appamaneng Ri Luwu dari Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, 2014.
- Tominaa Ne Sando Tato, Gelar Adat Tana Toraja, 2014.<sup>170</sup>

Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah dicalonkan untuk menjadi penerima Penghargaan Perdamaian Nobel 2006 bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Martti Ahtisaari atas inisiatif mereka untuk perdamaian di Aceh. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima gelar Doktor *Honoris Causa* sebanyak 12 kali, yaitu:

1. Doktor *Honoris Causa* Bidang Hukum dari Universitas Webster, Inggris. (2005)
2. Doktor *Honoris Causa* Bidang Politik dari Universitas Thammasat, Thailand. (2005)
3. Doktor *Honoris Causa* Bidang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dari Universitas Andalas, Indonesia. (2006)

---

<sup>170</sup> Ibid. hal 303.

4. Doktor *Honoris Causa* Bidang Pemerintahan dan Media dari Universitas Keio, Jepang. (2006)
5. Doktor *Honoris Causa* Bidang Ekonomi dari Universitas Tsinghua, Republik Rakyat Tiongkok. (2012)
6. Doktor *Honoris Causa* Bidang Perdamaian dari Universitas Utara Malaysia. (2012)
7. Doktor *Honoris Causa* Bidang Kepemimpinan dan Pelayanan Publik dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. (2005)
8. Doktor *Honoris Causa* Bidang Hukum Perdamaian dari Universitas Syiah Kuala, Aceh. (2013)
9. Doktor *Honoris Causa* dari Universitas Ritsumeikan, Jepang. (2014)
10. Doktor *Honoris Causa* Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Universitas Soka, Jepang. (2014)
11. Doktor *Honoris Causa* dari Universitas Western Australia, Perth (2015)
12. Doktor *Honoris Causa* Bidang Pembangunan Berkelanjutan dari Institut Teknologi Bandung (2016).<sup>171</sup>

MPR pada periode 1999–2004 mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenangkannya dengan 60,9 % suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat, dan tampil sebagai Presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Pada saat pelantikannya pertama kali sebagai presiden,

---

<sup>171</sup> Ibid. hal 304.

Yudhoyono mengumumkan kabinet barunya, yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri, itu termasuk anggota Partai Demokrat, Golkar dan PPP, PBB, PKB, PAN, PKP, dan PKS. Kalangan profesional juga disebutkan dalam kabinet, sebagian besar dari mereka mengambil pelayanan di bidang ekonomi. The militer juga disertakan, dengan 5 mantan anggota yang ditunjuk untuk kabinet. Sebagai Yudhoyono berjanji selama pemilu, empat dari yang ditunjuk kabinet adalah perempuan.

Yudhoyono Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada bulan Oktober 2009 setelah ia terpilih kembali sebagai presiden awal tahun. Wakil presiden dalam kabinet kedua Yudhoyono adalah Dr Boediono. Boediono menggantikan Jusuf Kalla yang adalah wakil presiden Yudhoyono di kabinet pertama. Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan lebih dari 60% (60,08%) suara di putaran pertama, yang memungkinkan dia untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa run-off. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 23 Juli 2009, oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarnoputri PDI-P Partai 26,79%, Jusuf Kalla Partai Golkar 12,41%.<sup>172</sup>

Pada bulan Juli 2005, Yudhoyono meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam program ini, pemerintah memberikan dana kepada kepala sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan sekolah. BOS dapat memberikan bantuan keuangan yang signifikan ke sekolah maka sekolah diharapkan dapat menurunkan biaya atau, jika mereka mampu, untuk menghapus biaya sama sekali. Pada bulan Juni 2006, Yudhoyono meluncurkan Buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku.

Pada bulan Januari 2005, Yudhoyono meluncurkan

---

<sup>172</sup> Ibid. hal 306.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Askeskin adalah program yang ditujukan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka akses ke pelayanan kesehatan. Perbandingan Kekuasaan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla Meskipun ia telah memenangkan Kepresidenan, Yudhoyono masih lemah dalam parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai Demokrat, bahkan dikombinasikan dengan semua mitra koalisinya, memiliki perwakilan jauh lebih sedikit daripada Golkar dan PDI-P, yang memainkan peran oposisi.

Dengan kongres nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2004, Yudhoyono dan Kalla awalnya didukung Agung Laksono pembicara menjadi ketua Golkar. Ketika Agung dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono dan Kalla memberikan dukungan mereka pada Surya Paloh. Akhirnya, ketika Paloh itu dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono memberi lampu hijau bagi Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Golkar kepemimpinan. Pada tanggal 19 Desember 2004, Kalla terpilih sebagai ketua baru Golkar.

Kemenangan Kalla menimbulkan dilema bagi Yudhoyono. Meskipun sekarang memungkinkan Yudhoyono untuk lulus undang-undang, posisi baru Kalla berarti bahwa ia sekarang lebih kuat daripada Yudhoyono dalam hal pengaruh di parlemen. Setelah Tsunami tahun 2004, Jusuf Kalla tampaknya atas inisiatifnya sendiri, dirakit Menteri dan menandatangani kerja Keputusan memesan Wakil Presiden akan dimulai pada rehabilitasi Aceh. Legalitas Keputusan Wakil Presiden nya dipertanyakan meskipun Yudhoyono menyatakan bahwa dialah yang memberi perintah untuk Kalla untuk melanjutkan.<sup>173</sup>

Pada bulan September 2005, ketika Yudhoyono pergi ke New York untuk menghadiri tahunan PBB Summit, ia

---

<sup>173</sup> Ibid. hal 321.

meninggalkan Wakil Presiden Kalla yang bertanggung jawab. Yudhoyono menggelar Video conference dari New York untuk menerima laporan dari menteri. Para kritikus menyatakan bahwa ini adalah ekspresi ketidakpercayaan oleh Yudhoyono. Tampaknya publik melihat momentum ketika Kalla hanya muncul untuk satu konferensi video dan kemudian menghabiskan sisa waktu mengurus masalah Golkar.

Dugaan persaingan muncul kembali lagi pada bulan Oktober 2006 ketika Yudhoyono membentuk Unit Kerja Presiden untuk Organisasi Program Reformasi (UKP3R). Dia bertugas dengan meningkatkan kondisi untuk investasi bisnis, melaksanakan diplomasi dan administrasi pemerintahan, meningkatkan kinerja BUMN, perluasan peran usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan penegakan hukum secara keseluruhan. UKP3R dipimpin oleh Marsillam Simanjuntak, yang menjabat sebagai Jaksa Agung selama Kepresidenan Abdurrahman Wahid.

Pada bulan Februari 2007, Yudhoyono menambahkan kesejahteraan untuk tugas UKP3R dengan memerintahkan mereka untuk juga menempatkan fokus pada penghapusan kemiskinan, bantuan langsung tunai, pelayanan publik serta membantu program di bidang kesehatan dan pendidikan. Ada tuduhan bahwa ini adalah upaya Yudhoyono untuk mengecualikan Kalla dari pemerintah. Yudhoyono dengan cepat menjelaskan bahwa dalam mengawasi UKP3R, dia akan dibantu oleh Kalla.

Pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.

Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi seorang presiden yang masih bergelut dengan upaya



memulihkan kehidupan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP4R), sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simandjuntak pada saat pembentukannya pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.<sup>174</sup>

Sekitar bulan Juni 2005, Presiden SBY memulai layanan pesan singkat (SMS) ke nomor telepon seluler 0811109949, namun esok harinya terjadi gangguan teknis karena banyaknya SMS yang masuk. Kemudian diganti dengan SMS ke 9949, setelah itu SMS akan dipilih dan disampaikan ke presiden. Nomor 9949 adalah kode angka tanggal lahirnya, (9 September 1949). Tanggal 28 Juni 2005, Presiden SBY mengirimkan SMS kepada masyarakat dengan nama pengirim Presiden RI yang berisi tentang pencegahan narkoba. Kebenaran SMS ini sudah dikonfirmasi dan juru bicara Presiden menyatakan bahwa berbagai SMS akan menyusul.

Tanggal 13 April 2013, Presiden SBY mengirimkan kicauan pertamanya di akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono. Akun Twitter ini dikelola oleh SBY bersama stafnya. Tanda kicauan dari Presiden langsung adalah \*SBY\* pada setiap akhir kicauannya. Kicauan pertama presiden SBY adalah:

"Halo, Indonesia. saya bergabung ke dunia Twitter untuk berbagi sapa, pandangan, dan inspirasi. Salam kenal. \*SBY\*" Melalui Twitter inilah, Presiden berharap dapat semakin mendengarkan keluhan kesah masyarakat. Dirinya juga

---

<sup>174</sup> Ibid. hal 350.

menyatakan siap dicibir di Twitter oleh para pengguna Twitter lainnya.

Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang musisi dan pada masa mudanya ia pernah menjadi anggota grup musik *Gaya Teruna*. Pada tahun 2000-an, ia kembali merambah dunia musik dengan menulis tiga album pop.

- Tahun 2007, ia merilis album musik pertamanya yang berjudul *Rinduku Padamu*. Album ini adalah kumpulan lagu cinta dan religius. Album yang berisi 10 lagu ini melibatkan beberapa penyanyi papan atas Indonesia.[78]
- Tahun 2009, bersama Yockie Suryoprayogo, Yudhoyono merilis album *Evolusi*.
- Tahun 2010, ia merilis album ketiga berjudul *Ku Yakin Sampai Di Sana*.

## **B. Kebijakan Luar Negeri masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.**

Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering di panggil SBY dilantik menjadi presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY merupakan Presiden Indonesia pertama yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Beliau maju menjadi presiden didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Indonesia periode 2004 - 2009. Pada pemilu tahun 2009, beliau terpilih kembali menjadi presiden dengan didampingi oleh Boediono sebagai wakil presidennya.

Politik luar negeri Indonesia di era SBY telah berhasil membuat Indonesia berperan aktif di kancah Internasional , Pada tahun 2006 Indonesia terpilih menjadi anggota dewan hak asasi manusia (dewan ham /*human rights council*) Perserikatan Bangsa – Bangsa. Mantan Presiden Republik Indonesia yang ke - 6 tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas

kepercayaan anggota PBB dalam forum Majelis umum terhadap Indonesia , maka Indonesia harus menjadi pendorong semangat untuk meneruskan langkah-langkah reformasinya yang sedang dilakukan , antara lain makin mantap dan tumbuhnya demokrasi, penegakan hukum dan juga penghormatan kepada HAM.<sup>175</sup>

Penghormatan kepada HAM ini bukan hanya dari Negara kepada rakyatnya, tetapi harapan saya (SBY) juga antarwarga masyarakat Indonesia, antarkomponen bangsa. Kita harus dapat menjadi contoh bagi Negara yang lain bahwa makin ke depan penghormatan kepada HAM Itu dapat kita Lakukan dengan baik.. Dan pada pada periode PBB tahun 2007-2008 Indonesia akhirnya terpilih lagi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 1 Januari 2007 - 31 Desember 2008, dalam pemilihan yang berlangsung di Majelis Umum PBB di New York. Kepala penerangan utusan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Sanga Panggabean mengatakan, Indonesia memperoleh 158 suara dari 192 anggota Majelis Umum. "dengan terpilihnya indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB ini, maka terbuka peluang yang lebih luas lagi bagi indonesia , baik pada tingkay dewan keamanan PBB maupun di luar konteks , untuk berkontribusi di dalam penciptaan kewanman dan perdamaian dunia."<sup>176</sup>

SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia. Perubahan-perubahan global pun dijadiannyasebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakandengan istilah “mengarungi lautan bergelombang”, bahkan „menjembatani dua karang“. Haltersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia

---

<sup>175</sup> Op.cit, Ahmad Yani Basuki, hal. 290.

<sup>176</sup> Detik news, “ Indonesia Terpilih jadi anggota tidak tetap DK PBB”, Detik news, diakses dari <https://m.detik.com/news/berita/d-696631/indonesia-terpilih-jadi-anggota-tidak-tetap-dk-pbb> , pada tanggal 3 juli 2019 pukul 14.44.

untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah seperti pada kasus sengketa perbatasan antara Myanmar dan Kamboja Indonesia adalah yang menjadi penengah karena pihak-pihak yang berseteru tersebut menolak untuk saling bertemu akhirnya Indonesia melakukan shuttle diplomasi agar permasalahan tersebut berjalan dengan damai tanpa ada lagi Gendak Senjata yang telah memakan banyak korban. Adapun ciri-ciri politik luar negeri SBY adalah:

- Terbentuknya beberapa kemitraan-kemitraan dengan beberapa negara, antara lain: Amerika, Jepang, China dan Korea Selatan.
- Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional).
- Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan Multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
- Konsep TRUST, yaitu pembangun kepercayaan terhadap dunia Internasional.
- Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah *unity, harmony, security, leadership, prosperity*. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.
- Opportunity Driven, yaitu memanfaatkan segala kesempatan yang ada secara optimal.
- Win-Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
- Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.

- Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan pertimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.
- Soft Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara-cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara-negara Canada, Norwegia dan Australia.
- Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap-tiap negara untuk mengambil hati dan menjalin persahabatan dengan setiap mitra dialog.
- Dengan pendekatan yang dianut tersebut, maka Presiden SBY menerapkan politik luar negeri yang konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan internasional dengan membawa semboyan All Directions Foreign Policy (Politik luar negeri ke segala arah). Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga menganut paham A Million Friends, Zero Enemy yang artinya merangkul sebanyak-banyaknya kawan dengan menggunakan soft power sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh. Harapan-harapan terhadap politik luar negeri Indonesia dibangun dengan sistem bridge builder, consensus builder dan resolution conflict.

Kerjasama antarnegara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antarnegara bentuknya bermacam-macam, mulai kerjasama ekonomi, perdagangan dan lain-lain. Istilah kerja sama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional. Kerja sama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Dengan demikian kerja sama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan

negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Berdasarkan pengertian kerja sama, maka setiap negara yang mengadakan kerja sama dengan negara lain pasti mempunyai tujuan.

Di era kepemimpinan SBY ini Indonesia menjalin kerja sama dengan beberapa Negara salah satunya Amerika Serikat. Di bidang investasi, Amerika Serikat adalah Investor nomor dua setelah Jepang. Investasi ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena sebagai Negara yang berkembang Indonesia mempunyai keterbatasan modal, dan kerja sama di bidang Investasi ini tentu membawa manfaat yang besar. Di bidang Pendidikan ada kerja sama yang berlanjut dengan keuntungan bersama yang tentunya membawa kemajuan.

Banyak sekali putra dan putri Indonesia yang belajar di Amerika Serikat. Dan selama ini ada bantuan yang sangat signifikan. Di bidang Kesehatan, Amerika Serikat juga menjalin kerja sama dengan membantu kita, misalnya dalam mengatasi flu burung dan penyakit-penyakit menular lainnya. Di bidang penanganan bencana alam, kita patut berterimakasih kepada Amerika Serikat dan Negara-negara sahabat lain, khususnya ketika dulu tsunami menghantam Aceh dan Nias pada tahun 2004 bantuan kerja sama itu masih berlanjut. Demikian pula saat Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami gempa bumi, pada saat itu dimatangkan kerja sama kita dengan Amerika Serikat untuk membangun *early warning system* bagi tsunami.

Di bidang energy kita menjalin kerja sama sudah 30 tahun untuk mengembangkan energi alternatif, termasuk biofuel dan bioenergi. Kerja sama energy juga kita jalin dengan Jepang dan juga China. Di bidang pertahanan, kita telah memulihkan kerja sama teknik militer Indonesia dan Amerika Serikat. Saat itu difokuskan pada kerja sama membangun keterampilan untuk menghadapi bencana dan sejumlah keterampilan profesional sebagai seorang militer yang secara

universal dianut oleh tentara manapun, termaksud kerja sama dalam pengadaan senjata.<sup>177</sup> Jadi itulah salah satu kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dengan Negara lain di era kepemimpinan Presiden SBY.

Ada tiga hal yang menjadi tujuan utama politik luar negeri Indonesia saat SBY menduduki kursi presiden. Yang pertama adalah untuk meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa. Hal ini terealisasi dengan Indonesia aktif dalam keanggotaan ASEAN, SBY sadar bahwa sebagai anggota ASEAN, Indonesia harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan Negara-negara anggota ASEAN ataupun Negaramanapun di seluruh dunia. Dalam mottonya “Thousand Friends, Zero Enemy”. Indonesia bisa diartikan sebagai Negara yang menentang penjajahan serta Negara yang cinta damai. Tujuan yang kedua yaitu, untuk memperkuat persatuan dan kerjasama di dalam bidang ekonomi melalui kerjasama perdagangan maupun pertukaran barang.

Tujuan ketiga yaitu, meningkatkan kerjasama antar negara untuk membuat suatu kondisi damai dan ketertiban dunia demi kesejahteraan yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Di bidang kerjasama internasional, kinerja yang telah dicapai pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain, ialah :

1. Menyelesaikan masalah sengketa perbatasan Indonesia dengan negara lain . Misalnya perbatasan dengan Malaysia, dan Timor Leste sedangkan Papua Nugini masih dalam tahap perundingan.

---

<sup>177</sup> Ahmad Yani Basuki, *Globalisasi dan Kerja Sama Internasional Dari Pemikiran & Presiden Pidato SBY*, Staf Khusus Kepresidenan, Jakarta, 2013, 66.

2. Support Indonesia terhadap Palestina dalam konflik Palestina dengan Israel. support positif ini penting bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai bersifat pro aktif dan high profile dalam usaha untuk menciptakan perdamaian dunia.
3. Meningkatkan kerjasama di ASEAN dalam bidang ekonomi internasional, Indonesia terus mengikuti berbagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) seperti KTT APEC XII, KTT ASEAN, KTT Tsunami dan KTT Asia Afrika.
4. Kegiatan saling mengunjungi presiden dan wakil presiden ke Negara - negara lain menghasilkan perjanjian – perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak terutama didalam sector ekonomi yaitu banyaknya investasi masuk dan meningkatnya perdagangan Indonesia.

Pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono politik luar negeri menganut sistem politik bebas aktif yang melahirkan gagasan thousand friends zero enemy.<sup>178</sup> Yang intinya, Indonesia siap berteman dengan siapa saja di dunia. Tak ada lagi Blok Barat dan Timur gak ada lagi kubu komunis dan kapitalis.<sup>179</sup> Lebih baik punya banyak kawan dari pada musuh. "Bebas" berarti tidak terikat kepada suatu blok negara adikuasa tertentu. Sementara "aktif" berarti

---

<sup>178</sup> Julita Sari, "Kilas Balik Kebijakan Politik Luar Negeri SBY dengan Kebijakan Politik Joko Widodo", di akses dari <https://www.kompasiana.com/julitasari/57e4f3a3be22bdb743d750c6/kilas-balik-kebijakan-politik-luar-negeri-sby-dengan-kebijakan-politik-joko-widodo> pada tanggal 14 juli 2109 pada pukul 10.41.

<sup>179</sup> Andreas Gerry Tuwo, "SBY Jawab Kritik Kebijakan Luar Negeri Saat Jadi Presiden", di akses dari <https://www.liputan6.com/news/read/2604310/sby-jawab-kritik-kebijakan-luar-negeri-saat-jadi-presiden?>



aktif dalam mengembangkan kerjasama Internasional dengan negara lain.<sup>180</sup>

Indonesia menjadi negara yang cukup disegani oleh dunia internasional. Sebagai seorang Jenderal TNI (Purn). SBY memiliki karakter yang kuat dalam memimpin negara Indonesia ini. Beliau membuat negara Indonesia dipandang dan juga cukup disegani oleh dunia internasional. Dalam masa kepemimpinan SBY ini, Indonesia aktif mengikuti berbagai organisasi internasional hingga konvensi tingkat dunia. Di sini menunjukkan peran total diplomasi Indonesia dalam menarik perhatian negara lain di dunia serta menunjukkan bahwa Indonesia ikut berperan aktif dalam dunia internasional.

Beberapa bukti eksistensi Indonesia di mata internasional antara lain pada tahun 2011 Indonesia merupakan tuan rumah Sea Games XXIV di Palembang. Selain itu Indonesia juga menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada tahun 2011 serta KTT APEC pada Oktober 2013 di Bali, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Miss World 2013 di pulau Dewata Bali.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima peserta Konferensi Federasi Organisasi Insinyur se-ASEAN (ASEAN Federation of Engineering Organization/AFEO). Dalam pertemuan itu, SBY dianugerahi penghargaan Medali Kehormatan Patron (Honorary Patron Medal) dari AFEO.<sup>181</sup>

Beberapa langkah kerjasama internasional beserta pemantapan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia dalam masa kepemimpinan presiden SBY antara lain:

1. Memperkuat hubungan serta kerjasama bilateral, regional, maupun internasional di segala bidang.

---

<sup>181</sup> Rinaldo, "SBY Dianugerahi Medali Kehormatan dari Organisasi Insinyur ASEAN", di akses dari <https://www.liputan6.com/news/read/743252/sby-dianugerahi-medali-keh>

2. Meningkatkan peranan aktif Indonesia dalam proses integrasi ASEAN dan juga di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika dan hubungan antar sesama negara berkembang, serta organisasi internasional.
3. Meningkatkan peranan aktif Indonesia dalam keamanan dan perdamaian internasional, serta memperkuat multilateralisme.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada WNI di luar negeri.
5. Mendorong pencapaian Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional, serta upaya peningkatan investasi, penyediaan lapangan pekerjaan serta perkembangan teknologi.

Era reformasi memberikan dampak positif bagi perkembangan HAM di Indonesia. Reformasi juga memberikan kebebasan kepada rakyat dan khususnya adalah media massa dalam memberikan informasi. Sebagai salah satu usaha dalam pegakan hukum HAM di Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 2005 Indonesia telah meratifikasi dua instrumen internasional utama dalam bidang HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights/ICESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).

Ada level hubungan bilateral, telah dilaksanakan dialog tahunan antara Norwegia dan Kanada yang menghasilkan berbagai program kerja sama dalam peningkatan kapasitas dalam bidang HAM. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menggagas dialog serupa dengan Rusia dan Swedia. Pemerintah Indonesia secara aktif dan konsisten sangat mendukung pembentukan mekanisme regional HAM ASEAN

serta dimasukkannya strategi yang dalam bidang HAM ke dalam Rencana Aksi Masyarakat Keamanan ASEAN 2004 (ASEAN Security Community Plan of Action 2004).<sup>182</sup>

Kebijakan luar negeri lain yang di keluarkan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan mengarah ke bidang ekonomi adalah :

1. Menekankan program ekonomi makro daripada program peningkatan ekspor secara spesifik.
2. Resep perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur massal untuk menciptakan lapangan kerja baru.
3. Melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati.
4. Indeks harga saham gabungan (IHSG) membumbung ke rekor 861.318. Kurs antara Rp 8.900 sampai Rp 9.150 per US \$.
5. Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Dari kebijakan ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak modalitas yang bisa dikatakan cukup baik pada saat ini sebagai pelaku dalam politik internasional, selain itu di Era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono karena dari modalitas dari Indonesia yang saat ini sudah baik menjadikan bangsa Indonesia lebih percaya diri dalam mengambil peran di ranah politik internasional. Dari faktor ini juga mendorong Indonesia untuk kembali berminat dan mengambil peran aktif dalam masalah-masalah Internasional, Indonesia juga memiliki peluang yang besar dalam berinteraksi dengan dunia

---

<sup>182</sup>[http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&Treaty\\_page=2&sort=modified\\_time.desc](http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&Treaty_page=2&sort=modified_time.desc) di akses pada 14 juli 2019 pada pukul 11.29.

internasional dengan modal sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia dan posisi Indonesia sebagai anggota dalam Dewan Keamanan PBB serta Indonesia juga dianggap memiliki profil sebagai pemimpin negara berkembang di dunia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden selama 2 periode berturut-turut, yaitu periode pertama pada tahun 2004-2009 serta periode kedua pada tahun 2009-2014. Pada periode pertama, SBY memimpin bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, sedangkan pada periode kedua, SBY memimpin bersama Boediono. Gaya diplomasi soft power SBY dinilai unik karena mengedepankan politik santun, prosedural dan teoritis.<sup>183</sup> Pada kedua periode ini, SBY menjalankan politik luar negeri yang biasa disebut *million friend zero enemy*. Selain itu, SBY juga sering menjadikan Indonesia sebagai tempat konferensi-konferensi internasional, seperti KTT ASEAN, APEC, ARM, OKI, dsb. Dari konferensi-konferensi itulah strategi diplomasi soft power SBY dapat terealisasi, karena diplomasi soft power itu sendiri adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan caramembuat pihak lain tertarik sehingga keinginan pihak lain sejalan dengan keinginan kita tanpa melalui pemaksaan atau iming-iming imbalan.<sup>184</sup>

Pelaksanaan politik luar negeri SBY dirasa cukup bagus dan memberi dampak positif baik di dalam maupun diluar negeri. SBY mewujudkan suasana tenang, damai, dan bebas dari kerusuhan terhadap negara-negara tetangganya. Selain itu,

---

<sup>183</sup> Robertus Wardi, “pengamat: politik luar negeri SBY perlu di pertahankan”, di akses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/169285-pengamat-politik-luar-negeri-sby-perlu-dipertahankan.html> pada tanggal 14 juli 2019 pada pukul 11.36.

<sup>184</sup> Reni Windiani, “poliitk luar negeri indonesia dan globalisasi”, di akses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4894/4438> pada tanggal 14 juli 2019 pada pukul 11.41.

semasa pemerintahan SBY, kredibilitas Indonesia menjadi semakin meningkat dimata dunia. Negara-negara berkembang yang bertetangga dengan Indonesia seperti Thailand dan Myanmar menginginkan untuk membangun negaranya menjadi lebih terstruktur.

Tetapi dibalik kelebihan dari politik luar negeri SBY masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal yaitu, Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY kurang bisa menyelesaikan masalah-masalah domestik. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY dengan sebutan “ It’s about Image”. Hal ini karena SBY berlaku hanya untuk memulihkan citra baik Indonesia di luar negeri dan kurang memperhatikan keadaan di dalam negeri. Indonesia sangat aktif mengikuti berbagai forum-forum kerjasama internasional baik dalam G20, APEC, WTO, maupun ASEAN. Namun, keterlibatan tersebut masih belum mampu memenangkan kepentingan nasional. Bahkan, kebijakan luar negeri yang dikomitmenkan oleh SBY lebih banyak membawa kerugian bagi Indonesia baik dari sisi kerjasama ekonomi, politik, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.<sup>185</sup>

Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum for Foreign Policy) mencatat kegagalan kebijakan luar negeri SBY meliputi :

1. Gagal melindungi buruh migran. Kebijakan politik luar negeri pemerintahan SBY tidak berhasil melindungi buruh migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Migrant Care mencatat sepanjang 2013 setidaknya ada 398.270 kasus yang menimpa buruh migran di berbagai negara tujuan. Para korban mayoritas perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga, khususnya yang bekerja di Malaysia dan Arab

---

<sup>185</sup><https://igi.or.id/rapor-merah-kebijakan-politik-luar-negeri-sby/> di akses pada tanggal 14 juli 2019 pada pukul 11.55.

Saudi. Pada tahun 2013, Migrant Care juga mencatat 265 tenaga kerja Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri. Sepanjang 10 tahun masa pemerintahan SBY, ada tiga buruh migran Indonesia (Yanti Iriyanti, Agus Damnsiri dan Ruyati) dieksekusi mati tanpa pembelaan yang berarti.

2. Pemenuhan pangan bergantung impor. Indonesia menjadi negara yang pangannya bergantung pada impor. BPS mencatat Indonesia mengimpor 472,7 miliar ton beras di tahun 2013. Sementara harga beras eceran semakin mahal. Pada bulan Februari 2014 harga beras mencapari Rp 11.389 per kilo dari Rp 10.819 per kilo di Februari 2013. Kedelai lebih parah lagi di mana sekitar 70% dari kebutuhan di dalam negeri harus impor. Tercatat sebagian besar produk pangan harus didatangkan melalui impor. Ini menunjukkan kegagalan diplomasi Indonesia di bidang perdagangan dan kedaulatan pangan.
3. Ekspor berbasis eksploitasi sumber daya alam. Melalui dokumen RPJMN 2015-2019, strategi pembangunan masih menyandarkan pembangunan disektor sumberdaya alam. Untuk menopang hal tersebut dibangun rancangan induk pembangunan MP3EI. Desain MP3EI bukan hanya melestarikan dan memperluas pemberian konsesi-konsesi skala besar untuk produksi komoditas global tersebut, melainkan juga memperdalamnya melalui kebijakan pengolahan komoditas hingga ke tingkat hilir, atau biasa disebut dalam dokumen MP3EI sebagai hilirisasi. Dengan kebijakan hilirisasi semacam ini artinya negara secara lebih lanjut memperluas pembentukan kawasan-kawasan ekonomi atau kawasan industri.
4. Investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang publik. Indikatornya meliputi pertama meskipun investasi asing naik dari 2011 hingga 2013, namun

penyerapan kerja malah menurun. Sementara investasi lebih bertumpu pada sektor jasa seperti sektor keuangan, komunikasi, dan telekomunikasi dibanding sektor padat karya. Kedua, bertumpu pada swasta melalui skema PPP (Public Private Partnership). Indonesia gencar mengusulkan investasi swasta untuk pembangunan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan PPP (Public Private Partnership) yang lebih menguntungkan swasta dibanding publik. Contohnya dalam pembangunan PLTU Batang yang menggunakan skema PPP diwarnai protes masyarakat pemilik lahan dan nelayan, namun tetap saja pemerintah memaksa PLTU tetap dibangun. Pola ini memperlihatkan bahwa arah politik investasi Indonesia memiliki kepatuhan yang dalam terhadap policy driving yang didesain oleh lembaga keuangan internasional tanpa mempertimbangan dimensi konstitusi.

5. Diplomasi perubahan iklim minim implementasi di dalam negeri. Komitmen Pemerintah SBY untuk menurunkan emisi karbon hingga 20% hanyalah isapan jempol belaka. Meski mendapatkan apresiasi negara lain di luar negeri namun tidak begitu kenyataan di dalam negeri. Mengingat sejak Pemerintah SBY, Indonesia tak pernah menunjukkan upaya serius untuk menghentikan laju deforestasi. Melainkan terus menerus mengeluarkan kebijakan konversi hutan alam. Bukti nyata antara lain seperti mengeluarkan 20 izin RKT seluas ratusan ribu hektar diatas hutan alam di propinsi Riau pada tahun 2008 untuk mendukung kebutuhan kayu industri bubur kertas dan terus akan mengembangkan perkebunan monokultur seluas 12,9 juta hektar di 12 wilayah untuk mendukung program penggunaan bahan bakar minyak nabati di Indonesia. Hal ini juga sejalan

dengan tujuan pemerintah untuk terus meningkatkan produksi CPO sebesar 40 juta ton pada tahun 2020 untuk mendukung kebutuhan ekspor sebesar 60% dan sisanya untuk kebutuhan energi, pangan dan lain sebagainya. Padahal sebagaimana yang kita ketahui setiap satu ton CPO akan menghasilkan dua ton CO<sub>2</sub> (Wetlands International, 2006). Kebijakan untuk terus mengkonversi hutan alam tentu saja bertentangan dengan apa yang menjadi perhatian bersama negara-negara di dunia untuk segera mengurangi emisi dari sector kehutanan dan perkebunan pada tahun 2020.

6. Ekstraktif Industri dan Tunduknya Negara Terhadap Korporasi Raksasa dan Multinasional. Negara memberikan dan memperluas konsesi skala besar untuk produksi komoditas global kepada korporasi-korporasi raksasa di bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan untuk memproduksi beragam komoditas global atau komoditas keperluan ekspor. Model semacam ini sebenarnya telah berjalan sejak masa kolonial.

- Pada wilayah hutan, misalnya, negara memberikan konsesi-konsesi yang berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan untuk Tanaman Industri (HPHTI), yang merupakan dua bentuk konsesi kehutanan terutama untuk ekstraksi kayu. Hingga tahun 2005, luas areal konsesi kehutanan yang tersisa sekitar 28 juta hektar yang dikuasai hanya oleh 285 unit. Dengan lain kata, setiap unit menguasai sekitar 98.000 hektar lahan. Negara secara terbuka dengan skema investasi memberikan keleluasaan bagi rejim perdagangan untuk memutar stagnasi finansial ke berbagai sektor di Indonesia. Pencabutan izin HPH tahun 2004 dan berganti



dengan IUPHHK Hutan Alam tahun 2006 seluas 4,1 juta hektar. Pada tahun 2012 melonjak lebih dari 5 kali lipat menjadi 20,2 juta hektar melalui 313 izin.

- Sementara, untuk Konsesi Pertambangan negara memberikan sejumlah izin yang berupa Kontak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), atau Izin Usaha Pertambangan bagi beroperasinya industri tambang skala besar. Hingga tahun 1999 saja, Departemen Pertambangan mengalokasikan sekitar 264,7 juta hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan, baik perusahaan dalam negeri (swasta dan BUMN) dan perusahaan asing, untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi barang tambang. Dengan kata lain, rata-rata setiap perusahaan menguasai sekitar 0,5 juta hektar tanah melalui izin konsesi pertambangan.
- Untuk usaha perkebunan, negara memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan untuk berbagai macam usaha perkebunan (Bachriadi dan Wiradi 2011: 12-14). Data tahun 2013 saja, misalnya, mencatat lebih dari 13,5 juta hektar diperuntukkan hanya untuk perkebunan sawit. Lebih dari separuhnya adalah perkebunan milik korporasi asing, domestik, maupun perusahaan negara. Dalam waktu 6 tahun terakhir juga terjadi peningkatan pemberian izin terhadap HTI lebih dari 2 kali lipat dari 108 izin seluas 3,5 juta hektar menjadi 221 izin dengan total luas 8,8 juta hektar. Dimana terjadi peningkatan pengeluaran izin penebangan hutan alam seluas 16 juta hektar dalam waktu 6 tahun atau rata

rata diatas 3,7 juta hektar setiap tahun. Pengeluaran izin ini sangat kuat kaitannya dengan perhelatan politik dimanaterjadi lonjakan pengeluaran izin pada tahun 2009 pada IUPHHK-HA 44 izin dan 34 izin pada IUPHHK-HTI dengan luas 4,7 juta hektar.

7. Transparansi dan akuntabilitas sektor sumberdaya alam dan ekstraktif masih jauh dari harapan. KPK pernah mengingatkan korupsi di sektor minyak bumi dan gas merupakan yang terbesar. Selain itu, data hasil tim koordinasi dan supervisi KPK di sektor mineral dan batubara menyebutkan potensi kerugian Negara mencapai Rp 35,6 triliun. Pemerintahan SBY ternyata tidak mampu menciptakan perbaikan yang signifikan dalam proses tata kelola sektor migas dan minerba. Sejumlah pekerjaan rumah masih disisakan oleh SBY, seperti renegosiasi kontrak tambang-migas, pengurangan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak bertanggungjawab, maraknya praktek rente disektor migas dan minerba. Pemerintahan SBY juga tidak mampumemrpendek rente perdagangan minyak mentah untuk efisiensi dan kebutuhan domestik.
8. Ketiadaan komitmen pemerintah dalam mendorong penghormatan standar HAM dan perlindungan buruh anak pada rantai pasokan barang dan jasa. Indonesia telah memiliki UU No. 13 tahun 2007 mengenai pekerja anak. Aturan ini menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun pada bagian lain undang-undang ini menyatakan pengecualian bagi anak yang berumur 13 ( tiga belas ) tahun sampai dengan 15 ( lima belas ) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Ketidaktegasan ini berimplikasi pada lemahnya penegakan aturan, inspeksi dan monitoring untuk

mengidentifikasi, melaporkan dan mengatasi masalah pekerja anak pada setiap tahapan dan mata rantai produksi berbagai perusahaan tersebut. Berdasarkan data dari Survei Tenaga Kerja Nasional (2010), terdapat sekitar 4,7 juta anak berusia 10 – 17 tahun yang aktif secara ekonomi. Dan dari total jumlah pekerja anak tersebut, sekitar 3.4 juta anak diserap oleh pasar sebagai pekerja. Besarnya pasar yang ada di Indonesia sebagai implikasi dari globalisasi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi ekonomi pada anak di setiap tahapan dan mata rantai produksi

9. Tidak mampu menangani pelarian dan penghindaran pajak. Sedikitnya ada Rp 500 triliun potensi pajak yang hilang akibat berlindung di surga pajak (tax havens). Menurut Studi INFID dan Perkumpulan Prakarsa mencatat ada Rp 3.600 triliun aset orang-orang superkaya yang belum dikenai pajak akibat penghindaran pajak. Pemerintah Indonesia masih sangat enggan menjadi bagian dari komitmen internasional untuk memerangi kejahatan perpajakan lintas negara.
10. Diplomasi Kerjasama Ekonomi yang semakin mendorong liberalisasi dan merugikan petani, nelayan, buruh, perempuan, dan usaha rakyat kecil. Bukti nyata adalah ketika Indonesia menjadi Tuan Rumah KTM 9 WTO tahun 2013. Saat itu, pilihan strategi diplomasi SBY lebih memfasilitasi kepentingan korporasi dalam agenda Trade Facilitation dibandingkan mempertahankan kepentingan petani dalam proposal

pertanian yang hendak menghapus pembatasan subsidi untuk petani.<sup>186</sup>

Kegagalan demi kegagalan ini memperlihatkan bahwa klaim keberhasilan peran diplomasi Indonesia yang ditunjukkan dalam keaktifan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di forum internasional adalah klaim yang semu dan tidak mendasar karena tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat Indonesia. Memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu bangga menjadi Cho-Chair dalam High Level Panel of Eminent Person of Post-2015 Development Agenda, Ketua ASEAN di tahun 2011, Ketua APEC di tahun 2013 dan Tuan Rumah KTM WTO 2013 serta secara reguler menyelenggarakan dialog demokrasi di Bali (Bali Democracy Forum) sejak 2008, namun tampaknya sederetan catatan itu tak lebih dari upaya pencitraan. Dalam mekanisme UN, Indonesia juga menjadi anggota berbagai mekanisme HAM PBB dan menjadi peratifikasi Konvensi PBB, namun tak pernah mampu memaksimalkan dan memanfaatkannya untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bahkan dalam rekomendasi UPR dan Komite Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya PBB, Indonesia masih menanggung banyak utang penegakan HAM yang belum tuntas.

Ironi terakhir terlihat di Bali Democracy Forum yang digelar 10-12 Oktober 2014, forum yang membicarakan masa depan demokrasi global ini digelar pada saat demokrasi di Indonesia berada dalam ancaman setelah UU Pilkada mengakhiri era pilkada langsung yang demokratis. Akibat kondisi tersebut, masyarakat harus menanggung beban yang teramat berat. Harga pangan melonjak, lapangan kerja terbatas,

---

<sup>186</sup> Ihsanuddin, "Dalam 10 Hal Ini SBY Dianggap Gagal soal Kebijakan Politik Luar Negeri", di akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/12/16521291/Dalam.10.Hal.Ini.SBY.Dianggap.Gagal.soal.Kebijakan.Politik.Luar.Negeri>, pada tanggal 14 juli 2019 pada pukul 11.58.

bencana akibat rusaknya alam, ketimpangan yang kian meningkat, hingga kekerasan terhadap perempuan meningkat baik di rumah tangga maupun di tempat kerja. Kebijakan politik luar negeri hendaknya mencerminkan kepentingan nasional yaitu mendorong keadilan sosial dan mensejahterakan rakyat, serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Politik dan kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode ini dirasa cukup baik dan lebih spesifik dengan menyatakan adanya perubahan pada kata “bebas aktif” menjadi “million friends and zero enemies.” Perubahan ini memudahkan seseorang untuk menafsirkan apa arti kata dari “bebas aktif” itu sendiri. Tidak seperti presiden presiden sebelumnya yang sangat kentara melakukan politik luar negeri yang cenderung kearah poros tertentu seperti barat dan timur, politik masa pemerintahan presiden SBY dirasa terkesan acak. Dikarenakan tak adanya lagi 2 poros di perpolitikan dunia pasca perang dingin berakhir, pergerakan politik luar negeri yang dilakukan di era reformasi yang acak kemudian menjadi pijakan awal politik luar negeri pemerintahan SBY. Maksud dari kata acak sendiri adalah, lebih kearah membangun tali silaturahmi yang baik ke semua negara dan memilih untuk menjadi penengah atau netral dalam setiap adanya konflik di antara negara-negara dunia.

Kondisi yang berbeda dari masa-masa kemasa kami rasa menjadi salah satu factor yang sangat mempengaruhi pergerakan politik luar negeri presiden SBY. Terlepas dari adanya atau tidak poros di dunia politik internasional, politik luar negeri presiden SBY yang cenderung mengalir seperti air mendapatkan tempat tersendiri dihati para pemimpin negara lain. Pembawaan pak SBY yang tenang dan penuh kewibawaan juga merupakan daya tarik tersendiri untuk negara lain agar dapat bekerjasama dengan Indonesia.

## **BAB IX**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA PRESIDEN JOKO WIDODO**

#### **A. Profil Presiden Joko Widodo.**

Ir. H. **Joko Widodo** atau **Jokowi** (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961; umur 58 tahun) adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilu Serentak 2019. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.[5] Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).<sup>187</sup>

Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak tiga kali ketika dia masih kecil, tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tanggal 20 September 2012,

---

<sup>187</sup> Op.cit. Setyohadi.Tuk, hal 108.

Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "muda" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan, nama Jokowi terus unggul. Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sudjiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati. Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.<sup>188</sup>

Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12

---

<sup>188</sup> Ibid. hal 109.

tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak tiga kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.

Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi menikah dengan Iriana di Solo, tanggal 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka (1988), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1995).

Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta". Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala silvagama.<sup>189</sup>

Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun

---

<sup>189</sup> Wasis Widjiono, 2018, *Jadul Kinanti Jokowi Dulu Kini Dan Nanti*, Yogyakarta: Kelopak 6. Hal. 24.



karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp30 juta dari ibunya.

Usaha ini membawanya bertemu Mici Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya yaitu daerah Surakarta.<sup>190</sup>

Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia". Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta

---

<sup>190</sup> Ibid. hal 25.

dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur.

Sebagai wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran. Namun hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, sementara Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara.

Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010 serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya. Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.

Pertarungan politik juga merambah ke media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan *media center*, serta pemanfaatan media baru seperti Youtube. Putaran kedua juga diwarnai tudingan kampanye hitam yang antara lain berkisar

dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional. Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012–2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.

Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway.

Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorel terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil.

Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja. Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan. Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan.

Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Night Festival, Pesta rakyat, dan Festival Keraton Sedunia. Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain dengan melarang atraksi Topeng Monyet. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang

membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.

Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDI-P harus disetujui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut.

Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Namun, lawannya, Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan, membingungkan warga Indonesia.

Pada 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari pilpres. KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian. KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara (70.997.859 pemilih), sementara Prabowo mendapatkan 46,85% (62.576.444 suara), meskipun kubu Prabowo membantah total ini. Setelah kemenangannya, Jokowi

menyatakan bahwa, tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup, ia tidak pernah menyangka seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. *The New York Times* melaporkan dia mengatakan "sekarang, ini sangat mirip dengan Amerika, ya? Ada impian Amerika, dan di sini kita memiliki impian Indonesia". Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elite politik, dan menurut komentator politik Salim Said, rakyat memandang Jokowi sebagai "seseorang yang merupakan tetangga kita, yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".

Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran, namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.

Mulai tanggal 8 November, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing, sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.<sup>191</sup>

Sekembalinya dari luar negeri, ia menunjuk Faisal Basri

---

<sup>191</sup> *Satu Tahun Joko Widodo Berjalan di atas Gelombang*, Penerbit Nawa Cita Indonesia, Jakarta, 2015.hal 27.

sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.<sup>192</sup>

Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan. Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani. Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.

Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.

Di bidang infrastruktur, Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini, di antaranya adalah melakukan Jalan Tol Trans-Sumatra, Tol Solo-Kertosono, pelabuhan Makassar, meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari *Greater Surabaya Metropolitan Port*, dan lain sebagainya. Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai, dengan

---

<sup>192</sup> Ibid. hal 29.

membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani.

Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia–Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.

Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.

Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif. Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004

hingga 2009.) Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan menteri pertahanan dan hakim agung Mahkamah Konstitusi.

Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya. Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.

Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan. Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya. Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang dengan menyatakan "Saya tidak tahu tentang Xinjiang" dan tidak memberikan komentar.

Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%. Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen. Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen.

Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia



pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali. Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tuduhan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45." Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan serban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".

Sebagai Presiden Indonesia terpilih, Jokowi menegaskan sikap politiknya untuk memimpin Indonesia dengan kekayaan manusia, budaya, dan pluralitasnya supaya tidak kehilangan arah dalam mengejawantahkan isi UUD 1945 dan makna Pancasila. Sikap ini menurutnya juga dipandang perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin pada semua level pemerintahan baik kota hingga skala nasional. Jokowi memilih memaknai lewat ajaran trisakti Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan.

"Saya sebagai seorang Presiden juga harus punya ideologi jelas, apa itu? Berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Ideologi kita sama, Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda. Ada yang lewat gerakan perubahan restorasi Indonesia, ada yang lewat cara cara lain. Seorang pemimpin baik di kota, kabupaten, gubernur provinsi, tingkat nasional, memimpin itu harus punya ideologi. Tanpa itu kita tak punya arah. Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008". Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh

2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.

Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke-3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.

Atas kemampuannya mensosialisasikan program-program pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia dianugerahi sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology. Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan bumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluhan mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan". Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan meluncurkan suatu program. Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan

adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.

Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum. Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti *online tax*, *e-budgeting*, *e-purchasing*, dan *cash management system*. Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.

Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan. Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro. Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".

Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau *Jokowi Ahok Social Media Volunteer*, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran. Selain itu, Jokowi juga membentuk *media center* dan mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru. Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.

Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp16,31 miliar,

sementara pengeluarannya mencapai Rp16,09 miliar. Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp2,1 miliar. Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp516 juta. Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil. Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp62,63 miliar.

Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah. Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo. Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.

Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat. Namun, Jokowi membantah hal tersebut, dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi". Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta, walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibu kota. Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet. Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitasnya menurun. Data dari BPS juga menunjukkan

angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi wali kota Solo.

Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi. Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana. Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.

Dia kembali menuai kontroversi setelah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. HM Prasetyo dinilai tidak punya pengalaman cukup baik di Kejaksaan dan dianggap sebagai titipan partai politik. Dia juga dinilai tidak konsisten karena mengangkat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian, setelah awalnya meminta menteri tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Sebelumnya Puan Maharani juga menjabat Ketua DPP PDIP beberapa waktu saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan.

Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional dan kedatangan Jokowi di kampus ITB juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.

Pada masa kepresidenannya, Jokowi juga menuai kecaman setelah salah menyebutkan kota tempat kelahiran Presiden RI pertama Ir. Soekarno dalam pidatonya di alun-alun Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2015. Jokowi menyebutkan Soekarno lahir di Blitar, namun secara sejarah Soekarno dilahirkan di Jalan Pandean, Peneleh, Kota Surabaya. Beragam kritik pun dialamatkan kepada bawahannya seperti Setneg dan Tim Komunikasi Presiden akibat memberikan *bahan yang salah*

kepada Presiden.

Jokowi kembali menuai kontroversi dan protes luas dari berbagai elemen masyarakat ketika mengajukan calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke DPR pada pertengahan Januari 2015. Budi dianggap sebagai calon Kapolri yang *tidak bersih* oleh publik serta pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang dianggap sebagai politik *balas jasa*. Sehari sebelum disahkan sebagai calon Kapolri oleh DPR, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan rekening gendut. Presiden Jokowi lalu memutuskan untuk menunda pelantikannya sebagai Kapolri hingga proses hukum yang membelit Budi Gunawan selesai serta menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri. Pada akhirnya Badrodin Haiti resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 April 2015, lalu digantikan Tito Karnavian, sementara Budi Gunawan menempati posisi Kepala BIN.

Presiden Jokowi juga kembali menuai kecaman keras setelah menandatangani Peraturan Presiden tentang Kenaikan Uang Muka Mobil Pejabat. Jokowi pun mengaku tidak tahu Perpres yang ditandatanganinya dan akhirnya mencabut Peraturan tersebut. Namun terlanjur menghasilkan tertawaan "I Don't Read What I Sign".

Karena merupakan pemimpin yang muncul di masa maraknya penggunaan media sosial, Joko Widodo adalah salah satu tokoh yang sering diserang dengan pemberitaan palsu, di antaranya adalah memiliki orang tua Tionghoa, non-muslim, keluarga keturunan PKI, menantu hamil di luar nikah, dan lainnya.

Jokowi dalam budaya populer dari hasil karya film antara lain:

- Jokowi (film), adalah film drama Indonesia tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Teuku Rifnu Wikana dan Prisia

Nasution. Film ini dirilis pada tanggal hari Kamis, 20 Juni 2013 untuk menyambut hari ulang tahun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang ke-52 pada tanggal hari Jumat, 21 Juni 2013, bersamaan dengan perayaan ulang tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ke-486 pada tanggal hari Sabtu, 22 Juni 2013.

- **Jokowi adalah Kita** adalah film drama Indonesia yang mengisahkan tentang Joko Widodo. Film ini dibintangi oleh Ben Joshua, Sylvia Fully, dan Agustin Taidy. Film ini akan dirilis pada tanggal 20 November 2014. Namun penayangannya mengalami penundaan karena keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

## **B. Kebijakan Luar Negeri Masa Presiden Joko Widodo.**

Sistem politik luar negeri yang dianut negara Sejak pemerintahan soekarno sampai presiden Joko Widodo, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif. Bebas dikatakan sebagai berkebabasan politik menentukan dan menyatakan pendapat sendiri terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa keberpihakan pada suatu negara. Jokowi aktif dalam hubungan internasional dan aktif dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.<sup>193</sup>

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Kepentingan nasional dapat dicapai dalam wilayah negara itu sendiri dan dapat pula dicapai di luar wilayah negara. Dalam hal pencapaian kepentingan nasional dilakukan diluar batas wilayah negara, instrument yang digunakan ialah politik luar negeri.<sup>194</sup> atas dasar pemahaman tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan

---

<sup>193</sup> Sabir, M. 1987. Politik bebas aktif. Hal. 3

<sup>194</sup> Reni, windani. Politik luar negeri Indonesia dan globalisasi. Jurnal.hal. 1

instrument politik luar negeri yang efektif dan efisien agar mampu berkiprah untuk memenuhi kepentingan nasional dalam kancan internasional. Tuntutan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 mengenai rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025, yang menyatakan bahwa salah satu sasaran pokok pembangunan nasional Indonesia adalah “terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional”<sup>195</sup>

Joko widodo Sebagai presiden ke-7 republik Indonesia mempunyai visi yang dikenal dengan nama Nawacita yang dijadikannya sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat kita lihat dari **Visi dan Konsep:** Jokowi merupakan sosok pemimpin nasional yang kesetiannya kepada pancasila, UUD 1945, Negara kesatuan republic Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sangat kuat dan tidak perlu diragukan. Jokowi mengembangkan visi nawacita berikut konsep pembangunann nansional yang komprehensif dengan skala prioritas yang jelas dan terukur untuk apat iturunkan kedalam program-program pembangunan yang konkret. Sehingga demikian, proses akselereasi pembangunan nasional memperoleh topangan yang kuat. Visi “Indonesia Sentris” jokowi adalah upaya menjaga persatuan bangsanya yang rentan perpecahan.

Bagi Jokowi alam situasi sekarang potensi perpecahan bangsa muncul dari dalam negeri sendiri akibat ketiakadilan dan ketimpangan yang dirasakan daerah atas pembangunnn an sumberdaya alamnya. Oleh karena itu dalam nawacita dinyatakan bahwa, “prioritas pemerintahannya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah-daerah terluar. Jokowi memiliki keterpanggilan yang tinggi untuk masuk dan berkiprah nyata di dunia politik dalam rangka

---

<sup>195</sup> Ganewati, Wuryandari. Politik luar negeri Indonesia: Refleksi dan prediksi 10 tahun. Jurnal. Hal. 60



mengabdikan untuk memajukan kehidupan masyarakat atau rakyat, bangsa, dan Negara. Keterpanggilan ini diwujudkan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam tugas-tugas kepemimpinan, termasuk dalam konteks melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Disisi lain, Jokowi memiliki komitmen yang tinggi dalam kerangka memajukan martabat kemanusiaan universal,.

Dalam konteks ini, paradigma pembangunan nasional Presiden Joko Widodo berbasis *Nawacita* merupakan paradigma pembangunan nasional yang berorientasi pada kemanusiaan universal. Inisiatif, Inovasi, dan keberanian mengambil resiko: mengedepankan jargon “kerja, kerja, kerja” Jokowi memiliki kekuatan dalam berinisiatif dalam kepemimpinannya, ditunjukkan oleh banyaknya inovasi kebijakan, bahkan terobosan-terobosan nyata dalam pemerintahan, guna memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik dan progresif(maju). Jokowi merupakan tipologi pemimpin yang memiliki keberanian dalam mengambil resiko, kendatipun pilihan kebijakannya kurang populer, selama apa yang dilakukannya diyakini merupakan kebijakan terbaik bagi kepentingan rakyat dan bangsa, baik secara jangka pendek, menengah, dan panjang.

Efektivitas, percaya Diri, dan skala prioritas: Jokowi merupakan pemimpin yang berkarakter dan teruji keefektifitas kepemimpinannya, memiliki kepercayaan diri yang tinggi sebagai pemimpin nasional atau bangsa, dan mampu menetapkan skala prioritas pembangunan nasional yang rasional dan visioner. Selain itu, karena hal-hal tersebut Jokowi memiliki pengaruh kepemimpinan yang kuat ditingkat regional (kawasan) maupun internasional. Jokowi mampu meyakinkan negara-negara lain (dan pihak-pihak swasta lainnya) untuk bekerjasama, dan terutama menanamkan investasinya di Indonesia.

Dengan melihat kepribadian Joko Widodo, maka hal ini dapat dikaitkan dengan perpolitikan Presiden Joko Widodo,

maka dapat dikatakan bahwa Jokowi merupakan pemimpin sederhana, penuh percaya diri, serta penuh kasih sayang dalam kepemimpinannya. Hal ini jelas terlihat, ketika Presiden Jokowi melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri.<sup>196</sup>

Presiden Jokowi menyempatkan untuk mendengar secara langsung keluhan warga negara nya yang beraa di luar negeri, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa presiden jokowi memiliki karakter yang berbeda dalam menentukan substansi dari politik luar negeri bebas aktif dibandingkan dengan presiden sebelumnya.<sup>197</sup>

Pengaruh Karakteristik Joko Widodo dalam pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri Terdapat tiga model pembuatan kebijakan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

### ***1. RAM atau rational Actor Model***

Setiap pemerintah atau pembuat keputusan politik luar negeri melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai informasi, fakta, dan peristiwa yang terjadi. Keputusan dan kebijakan negara-negara lain pun dicermati dan dikaji. Hasil kajian yang terkerangka melalui *cost and benefit analysis* akan bermuara pada pengambilan kebijakan yang lebih menguntungkan.

Adanya prosedur-prosedur organisasional baku didalam menjalankan tugas-tugasnya serta apabila menghadapi persoalan-persoalan tertentu. Ini menjadi acuan perilaku dan tindakan para pembuat dan pelaksana keputusan luar negeri. Kehebatan atau tingginya kualitas kebijakan yang diambil sangat ditentukan oleh tingkat institusionalisasi organisasi pembuat keputusan itu sendiri.

---

<sup>196</sup> Nur, maliyah. 2015.kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Skripsi. Hal 37.

<sup>197</sup> Ibid

## **2. *Governmental political model***

Model politik pemerintahan ini menjelaskan proses pengambilan kebijakan luar negeri sebagai *political games* yakni pertarungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan preferensi-preferensi atau kepentingan-kepentingan tertentu. Keputusan yang diambil merupakan hasil tawar menawar dan/ kompromi. Sebagai permainan politik, pertarungan dan negosiasi tiak berlangsung hanya di ruang-ruang public yang melibatkan kekuatan massa dan opini masyarakat. Sangat besar kemungkinan dimana kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar pada akhirnya akan menentukan kebijakan yang akan diambil.

## **3. *Idiosyncrasy Model***

Model ini menggariskan empat dimensi yang perlu dicermati, yaitu *cognitive, social perception, motivational, dan emotional*. Dimensi kognitif ini nmenggambarkan pengetahuan dan pemahaman seseorang pemimpin terhadap kompleksitas masalah-masalah internasional; relasi atau interaksi yang berlangsung; identitas, nilai, dan kepentingan yang terkandung atau terlibat dalam setiap relasi internasional; regulasi-regulasi, ekpektasi-ekspektasi, serta kekuatan-kekuatan yang bermain; dan proses-proses dan pola kerjasama internasional dan nasional.

Sementara itu, *social perception* menunjukkan pola hubungan antara *self* atau diri sendiri dan *other* atau yang lain. Kesederhanaan, kejujuran, keterbukaan, atau ketegasan dan keberanian merupakan aspek-aspek dari *selfness* yang menentukan *others* berupa prioritas kepentingan dan pengetahuan tentang orang atau yang lain. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kesederhanaan dan kejujuran Jokowi akan sangat menentukan prioritas-prioritas dalam politiknluar negeri

Indonesia, disisi lain, ketegasan dan keberanian Jokowi dapat muncul apabila menghadapi negara atau non negara yang dinilai berlawanan atau melawan kesahajaan dan kejujuran.

Dimensi *motivational* mengarah pada *self realization* dan *self-actualization*. Seperti halnya presiden-presiden terdahulu, misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat pentingnya keteraturan (seremonial dan protokoler) serta reoutasi (posisi dan rasa hormat), hal ini terlihat jelas saat masa kepemimpinannya selama 10 tahun yang mempengaruhi tampilan politik luar negeri inonesia. Sedangkan Jokowi, yang dikenal dengan kepribadian yang sederhana dan jujur serta mementingkan kerja sama yang konkrit dimana hal-hal tersebut diinginkan untuk direalisasikan dan tampilkan. Dengan kata lain, presiden Jokowi mengkhendaki politik dan hubungan luar negeri yang lebih berlandaskan hubungan kerjasama yang sederhana tapi tetap jujur serta memberi hasil positif dan konkrit bagi pihak-pihak yang terlibat.

Aspek yang terakhir yaitu emosional. Ini menyangkup emosi-emosi positif serta emosi-emosi negative. Pengenalan melalui pemberitaan media nampaknya Jokowi memiliki emosi-emosi positif yang lebih kuat atau menonjol dibandingkan emosi-emosi negative. Dia merasa aman dan nyaman dalam keramahan di tengah masyarakat.

Joko widodo-JK memiliki Visi yang dikenal dengan visi Nawacita. Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa sanskerta, nawa (Sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Nawacita berisi Sembilan agenda pokok pemerintahan Jokowi-JK , yang diderivasi dari dan untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan pokok pikiran yang dipaparkan dalam Visi Nawacita, sebagai berikut.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga negara, melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan tata kelola pemerintah yang bersih efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem an negara hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia kerja” dan “Indonesia sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan social untuk rakyat ditahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia nisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan

kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, serta pengajaran sejarah pembentukan bangsa dan nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat membelak negara dan budi pekerti didalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Sehingga dari 9 poin dalam nawacita kita dapat melihat bahwa sesungguhnya visi tersebut berorientasi kedepan, mengutamakan percepatan pembangunan diberbagai bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan social. Selain itu, presiden Joko Widodo sangat jelas menekankan pada kemandirian negara RI dalam menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dengan melihat jati diri atau identitas negara sebagai negara kepulauan. presiden Joko widodo dalam kebijakan luar negerinya, akan menekankan pada *maritime centered (maritime centered foreign policy)* strategi yang dilakukan oleh presiden Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur maritime ( tol laut, pelabuhan, dan perkapalan), pengembangan sumber daya maritime, pengembangan sektor perikanan, dan promosi UKM.<sup>198</sup> Presiden Joko widodo dalam mewujudkan visinya tersebut, hal itu akan ditempuh dengan misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

---

<sup>198</sup> Ibid, hal 35

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan sejahtera.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.<sup>199</sup>

Prinsip luar negeri Indonesia yang dianut adalah prinsip bebas dan aktif. Ini dapat dilihat dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi-JK, yakni “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi ini mempertegas makna “kebebasan” Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional. Didalamnya juga terdapat makna dari sifat “aktif” untuk merealisasikan kemandirian nasional atas landasan kerjasama positif dan konstruktif.

Terdapat 4 agenda strategis politik luar negeri Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama Internasional;
2. Meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia;
3. Memperluas mandala keterlibatan regional di Indo-pasifik, dan;

---

<sup>199</sup> Ibid

4. Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi, dan keterlibatan masyarakat. (Mangadar, Situmorang, 2018: hal.71)

Secara garis Besar, terdapat lima fokus garis besar kebijakan luar negeri 2015-2018, yaitu Diplomasi ekonomi, keamanan dan perdamaian, Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri, kerja sama ASEAN, dan Diplomasi maritime. Dalam diplomasi ekonomi Jokowi memberi bobot ekonomi dan bisnis dari aktivitas ekonomi. Praktik diplomasi ekonomi ditunjukkan secara mencolok oleh presiden pada tiga pertemuan internasional di akhir tahun 2014, yakni: KTT APEC 2015 di Beijing, china 10-11 november; KTT ASEAN ke-25 di Naypidaw, Myanmar 12-13 November; dan KTT G-20 di Brishbane, Australia 15-16 November. Presiden memanfaatkan forum ini untuk menggalang kemitraan ekonomi dalam proyek infrastruktur dan kerjasama ekonomi lainnya. Pendekatan yang menekankan kepentingan domestic terus dipertahankan hingga sekarang, dan justru menjadikan politik luar negeri berjalan nyaris tanpa kritik.

Diplomasi ekonomi ini memiliki tiga tujuan, yakni menarik investasi asing, membuka pasar luar negeri, dan mendatangkan turis asing.<sup>200</sup>

Dalam diplomasi ekonomi, RI membangun tiga kemitraan yang saling menguntungkan dengan Arab Saudi, China, dan Rusia. Hubungan dengan Arab Saudi ditandai dengan kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia dalam rangka menjalin kesepakatan investasi dan kerjasama ekonomi. Begitupun dengan China dan Rusia.<sup>201</sup> Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai forum ekonomi dan

---

<sup>200</sup> Haryono, Endi. Politik lauar negeri tiga tahun jokowi. Diakses di <https://m-mediaindonesia-com.cdnampproject.org> tanggal 18 juli 2019

pukul 23.02

<sup>201</sup> ibid



pembangunan dilevel intra-kawasa, antar-kawasan, dan multilateral, antara lain dalam perkumpulan G20, APEC, dan ASEM.

Dalam Politik Luar Negeri Indonesia, ASEAN memang bias dikatakan sebagai prioritas di level regional sebagai lingkaran pertama sasaran kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. ada tiga prioritas utama dalam kerjasama ASEAN bagi Indonesia, yaitu: keamanan, pertumbuhan Ekonomi, dan kerjasama sosial dikawasan.

Nawacita Presiden Joko widodo yang pertama berbunyi “ menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara “ diterjemahkan oleh Kemenlu dalam aktivitasnya sesuai dengan arahan RPJMN, yang tertuang dalam Renstra Kemlu 2015-2018 dan pernyataan pers Tahunan dihadapan komisi 1 DPR RI.

Diplomasi maritim dan perbatasan adalah upaya menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan, dan memberikan kepastian hukum atas batas wilayah NKRI.<sup>202</sup> salah satu kebijakannya yaitu diplomasi Maritim ini digagas oleh Presiden Joko widodo yang ingin mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa pelaut. Inti dari gagasan ini terletak pada peningkatan infrastruktur maritime yang selama ini terbengkalai. Akibatnya Indonesia kehilangan banyak peluang yang seharusnya bias menjadi sumber pendapatan negara. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa peristiwa permasalahan dibidang kelautan. Misalnya illegal fishing.<sup>203</sup>

Untuk mengimplementasikan kebijakan poros maritim dunia, Jokowi mengenalkan lima pilar utama, yaitu budaya maritim; menjaga dan mengelola sumber daya laut;

---

<sup>202</sup> Kementerian luar negeri, *laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015*, hal. 45

<sup>203</sup> Maksum, ali. 2015. Poros maritime dan politik luar negeri jokowi. Hal.2

pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; dan membangun kekuatan pertahanan maritime. Tujuan kelima pilar tersebut adalah tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>204</sup>

Selama masa kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam kurun waktu 5 tahun tentu saja telah banyak menghasilkan prestasi-prestasi, yaitu Kepemimpinan dalam diplomasi internasional antara lain:

### **1. Mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar-peradaban.**

Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian Palestina, yakni dengan melakukan:

- Menolak status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
- Mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel
- Menegaskan dukungan terhadap Palestina dalam pertemuan OIC Extraordinary Summit di Istanbul, Turki
- Membebaskan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sejak tahun 2018 agar Palestina semakin mendapatkan keuntungan.

Hal ini terkait dengan peristiwa di akhir tahun 2017 ketika presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Dalam pidatonya di *diplomatic reception room*. Dgedung putih, Trump menegaskan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke yerusalem. Ini pun menambahkan daftar panjang penderitaan masyarakat

---

<sup>204</sup> Ibid, hal. 11

palestina. Sehingga pada hari kamis tanggal 7 desember 2017 di istana bogor, presiden Joko widodo pun mengecam keras sikap Donald Trump tersebut dan meminta Amerika Serikat agar mempertimbangkan kembali keputusan sepihak tersebut meski tidak digubris sama sekali oleh Trump.

Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara:

- Presiden Jokowi mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan yang melakukan kegiatan ekstremisme dan kekerasan
- Indonesia memberikan bantuan beasiswa pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan
- Penyelenggaraan pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia di Istana Presiden Bogor, 11 Mei 2019
- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menandatangani perjanjian pembangunan klinik "Indonesia Islamic Center."

Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Tercatat sebanyak 2.695 *peacekeeper* yang merupakan personel TNI/Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia. Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik. Indonesia juga aktif mengirimkan bantuan dan aktivis kemanusiaan ke daerah konflik di Asia dan Timur Tengah, misalnya Cox Bazaar dan Rakhine State, Myanmar; Jalur Gaza, Palestina-Israel dan Marawi, Filipina. Upaya mewujudkan perdamaian dunia juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara:

- Melanjutkan dialog Intas agama secara bilateral dan multilateral dengan 30 negara dan 3 forum multilateral
- Mengembangkan dan membangun pemahaman Islam Wassatiyyat kepada dunia melalui High Level Consultation of World Moslem Scholars on Wassatiyyat di Indonesia pada Mei 2018. Pertemuan ini melahirkan Bogor Ulama Declaration for Peace
- Mengembangkan Bali Democracy Forum sebagai sarana strategis pengembangan demokrasi di kawasan dan dunia.

## 2. **Diplomasi ekonomi**

Melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif dan *zero enemy*, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang dengan sejumlah negara. Indonesia juga mendorong terbukanya pasar-pasar baru non-tradisional agar produk Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi negara lain. Berikut yang telah dilakukan untuk peningkatan hubungan dagang dengan negara lain :

- Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum 2018.
- Melalui acara ini, Indonesia meraih transaksi sebesar 586,56 juta dollar Amerika Serikat dan 'business announcement' sebesar 1,3 miliar dollar Amerika Serikat.
- Indonesia Fair 2018 di Bangladesh
- Menghasilkan business deal sebesar Rp 3,76 triliun.
- Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia
- Indonesia berhasil meraih transaksi bisnis dengan Rusia sebesar 50 juta dollar Amerika Serikat dari sawit dan kopi, Kopi Kapal Api sebanyak 25 kontainer senilai 850.000 dollar Amerika Serikat, dan kopi roasting dari

Malang sebanyak 12 kontainer dengan nilai 1,2 juta dollar Amerika Serikat per tahun.

- Annual Meeting IMF-World Bank di Bali 2018

Presiden Jokowi, dalam pidato saat acara ini, mengajak para pembuat kebijakan fiskal dan moneter dunia untuk mengesampingkan tujuan kejayaan negaranya dan lebih mengutamakan kerjasama global demi terciptanya kehidupan dunia yang harmonis. Dalam pertemuan yang menelan biaya Rp 566 miliar itu, Indonesia menerima sejumlah manfaat langsung, yakni investasi untuk BUMN sebesar Rp 200 triliun dan penerimaan pajak yang diprediksi mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Adapun, bagi Bali yang menjadi tempat acara, yakni peningkatan volume ekonomi sebesar Rp 5,9 triliun.

### **3. Perlindungan WNI**

Dalam hal perlindungan WNI, berikut catatan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam 4 tahun:

- Sebanyak 51.088 kasus WNI di luar negeri diselesaikan
- Sebanyak 39 WNI yang disandera di Filipina, Somalia, dan Libya dibebaskan
- Tim hukum Indonesia membebaskan 443 WNI dari ancaman hukuman mati
- Mengevakuasi sebanyak 16.432 WNI dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia
- Mengembalikan hak finansial WNI/ TKI di luar negeri sebesar Rp 388 miliar
- Sebanyak 181.942 TNI berhasil direpatriasi ke Tanah Air.

Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Suzie Sudarman berpendapat, kinerja paling positif dari pemerintahan Jokowi-JK dalam hal politik luar negeri adalah soal perlindungan WNI di luar negeri. Menurut dia, hanya pemerintahan Jokowi-JK yang berani memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri. Salah satu contohnya adalah WNI yang berada di Syria. Itu WNI di sana bisa diikuti sehingga mendapatkan informasi yang jelas mengenai mereka. Padahal itu daerah perang ya, daerah konflik, jarang sekali diperhatikan pada pemerintahan sebelumnya.<sup>205</sup>

Instruksi Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus memasuki pasar negara-negara non-tradisional. Hal ini merupakan peluang baru bagi peningkatan kapasitas ekspor Indonesia yang berujung kepada perbaikan neraca perdagangan. Namun, menurut dia, hal yang masih menjadi kendala adalah pola pikir dan cara pandang para diplomat Indonesia yang bertugas di penjuru dunia. Diplomat kita tidak dilatih untuk mencari pasar perdagangan. Jadi langkah yang baru saat ini, adalah pembalikan cara berpikir. Bagaimana mereka mengutamakan perdagangan.

Pemerintah yang menjaga agar ekonomi Indonesia tidak bergantung pada satu blok saja. Hal ini sudah sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang dianut, yakni *zero enemy*. "Dia tidak menunjukkan permusuhan. Dia menerima IMF-World Bank, sekalipun dia tidak sepakat karena orangnya populis. Jadi, saya lihat cukup ada fleksibilitas. Misal lain, ketika berhubungan dengan China, dia imbangi juga dengan Amerika, Indo-Pasifik dan Timur Tengah.

Soal upaya Indonesia mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia sudah cukup baik. Namun, narasi yang harus selalu

---

<sup>205</sup> Tiga Tahun Jokowi Wujud Kerja Nyata, Penerbit Nawa Cita Indonesia, Jakarta tahun 2017.hal 53.

digelorakan adalah perjuangan Indonesia atas perdamaian dunia, mulai dari Palestina, Afghanistan hingga Myanmar, bukan semata-mata disebabkan Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, karena itu adalah amanat konstitusi. Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis, "...kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan..."

#### **4. Indonesia Mendapat Giliran Menjabat Sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB**

Indonesia terpilih sebagai anggota dewan keamanan tidak tetap PBB, setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020. Dalam situs resmi PBB negara akan bergantian setiap bulannya pada tahun ini untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan. Giliran tersebut diurutkan berdasarkan abjad bahasa inggris masing-masing negara. Indonesia mendapatkan kesempatan menjabat Presiden DK-PBB mulai 1 Mei 2019. Sejak awal tahun 2019, beberapa negara telah memimpin yang dimulai oleh Republik Dominika, Guinea Khatulistiwa, Perancis, dan Jerman.<sup>206</sup>

Setelah Indonesia, Presiden DK PBB akan dipegang oleh Kuwait, Peru, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Inggris, dan AS. Presiden DK PBB merupakan kepala delegasi dari negara anggota DK PBB, yang bertugas memimpin rapat, mengawasi krisis, membuat pernyataan pencapaian, dan sebagainya. Indonesia akan mengambil tema Investasi dalam bidang perdamaian, meningkatkan keamanan, dan kinerja pasuka perdamaian PBB, selama memegang jabatan itu dalam satu bulan.

Sebagai informasi, DK PBB terdiri dari 15 negara

---

<sup>206</sup> Ibid. hal 56.

anggota, yang terbagi menjadi 5 negara anggota tetap, yakni AS, Inggris, Perancis, China, dan Rusia, serta 10 negara anggota tidak tetap. Untuk negara anggota tidak tetap dipilih masing-masing lima negara setiap tahunnya melalui pemungutan suara Majelis Umum PBB dan akan menjabat selama dua tahun. Sebelum menjalankan tugasnya, masing-masing negara terpilih akan memimpin dewan untuk jangka waktu satu bulan selama mandat mereka.<sup>207</sup>

Berkesempatan menjabat sebagai presiden dewan keamanan, Indonesia memanfaatkan ini untuk mengangkat berbagai isu, salah satunya soal perdamaian di palestina. Dirjen kerjasama multilateral kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan, isu perdamaian di palestina ini akan diangkat lewat diskusi informal bertajuk “Arria Formula” yang akan digelar pada 9 mei menatang di markas PBB, New York. Focus pembahasan adalah mengenai pembangunan berbagai kawasan permukiman illegal oleh Israel yang menjarah tanah milik rakyat palestina.

Sejumlah pembicara akan dihadirkan termasuk video Conference dengan salah satu pejuang Palestina di Tepi Barat. Selain itu, ada juga acara debat terbuka bertajuk “menabur benih perdamaian yang akan digelar pada 7 mei 2019. Selanjutnya pada tanggal 23 mei 2019 akan digelar debat terbuka dengan tema “perlindungan masyarkat sipil dari konflik bersenjata”. Kedua acara tersebut juga akan dipimpin langsung oleh Menlu Retno Marsudi dan diisi sejumlah pembicara, salah satunya sekjen FBB yaitu Antonio Gutierrez. Febrian menyebutkan, pameran foto an pertunjukan budaya Indonesia juga akan dilaksanakan. Ia mengatakan, kesempatan Indonesia menjadi presiden DK PBB selama sebulan akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong perdamaian

---

<sup>207</sup> <https://amp.kompas.com/international/rea/2019/04/26/11351161/1-mei-2019-indonesia-dapa-giliran-jabat-presiden-dewan-keamanan-pbb>



dunia.<sup>208</sup>

Pasca terpilihnya inonesia sebagai Presiden DK PBB, beberapa kegiatan yang akan dieksekusi oleh kemlu RI yakni melaksanakan presidensi yang bertemakan “*peacekeeping*” yaitu misi pemeliharaan perdamaian. Hal ini cukup berasal, terkait track record Indonesia menjadi salah satu negara yang telah berkontribusi besar dalam perdamaian dunia, seperti halnya dalam konflik di Lebanon dan beberapa kasus lainnya. Selain itu, tema tersebut akan mempengaruhi dalam kebijakan perdamaian internasional dan bagi para *peacekeepers* dalam menukung terciptanya perdamaian dunia. Dalam sambutan menteri luar negeri Retno Marsudi merasa senang dan bangga atas terpilihnya Indonesia sebagai Presiden DK PBB. Sebab, sebagai Presiden DK PBB, Indonesia memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan dan langkah taktis untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kaitannya dengan konflik di beberapa negara di Dunia. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan negara Indonesia atas prestasinya mendukung terlaksana perdamaian dunia.<sup>209</sup>

Selama menjabat sebagai presiden DK PBB, Indonesia mendapatkan apresiasi dari para duta besar negara anggota PBB. “presidensi indoensia berjalan lancar dengan program-program yang sangat baik, dan kami apresiasi kepemimpinan Indonesia sebagai presiden Dewan Keamanan PBB yang tegas dan berwibawa pada bulan ini,” ujar wakil tetap Rusia untuk PBB di New York, yaitu Vasily Nebenzia. Selain itu, apresiasi juga datang dari kalangan media di PBB serta organisasi masyarakat madani, yang memandang kepemimpinan Indonesia dijalankan sangat terbuka, profesional, dan Objektif.

Dibawah presidensi Indonesia juga telah dilaksanakan

---

<sup>208</sup> <https://amp.kompas.com/nasiona/read/2019/05/02/12464011/jadi-presiden-dewan-keamanan-pbb-indonesia-angkat-isu-palestina>

<sup>209</sup> <https://m.detik.com/news/kolom/d-4548710/pasca-terpilihnya-indonesia-sebagai-presiden-dk-pbb>

dua sidang terbuka tentang pemeliharaan perdamaian PBB dan perlindungan warga sipil; 15 *Briefing* terbuka; 14 konsultasi tertutup; dan tiga pertemuan dengan format Arria. Terdapat total 45 kegiatan dalam kurun waktu 22 hari kerja PBB.<sup>210</sup>

Politik Luar Negeri Selama masa kepemimpinan presiden Joko Widodo bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan nasional untuk masyarakatnya dan sekaligus untuk menunjukkan peran keterlibatan Indonesia di kancah Internasional. Salah satu bentuk keaktifan Indonesia di kancah internasional di masa pemerintahan Jokowi adalah menjabat sebagai presiden DK PBB selama satu bulan yaitu dibulan Mei 2019.

Dalam masa sebulan seperti itu Indonesia mengusung tema perdamaian dimana telah sejak dulu Indonesia konsisten mendukung perdamaian negara-negara di dunia telah diatur dalam pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Fokus utama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur di semua wilayah Indonesia dan perbatasan-perbatasan. Alasan ini dijadikan sebagai strategi untuk mencari investor dari negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan seperti itu pembangunan infrastruktur dapat berjalan maksimal.<sup>211</sup>

---

<sup>210</sup> <https://m.anatarnews.com/berita/897315/peran-indonesia-sebagai-presiden-dk-pbb-mendapat-apresiasi>

<sup>211</sup> Situmorang, Mangadar. 2018. "*Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla*." Jurnal. Universitas Katolik Parahyangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

Abdulgani, H. Roeslan. 1971. *25 Tahun Indonesia-PBB*. Jakarta: Gunung Agung.

Abdulgani, Roeslam. 2011. *THE BANDUNG CONNECTION, Konperensi Asia-Afrika di Bandung 1955*. Penerbit Gunung Agung.

Ahmad, Munawar. 2010, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Agung Banyu Perwita, Anak, dan Yanyan Mochammad Yani 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Alit, Kawulo 2015. *100 Hari Jokowi Kerja Kerja Kerja*, Penerbit Nawa Kencana, Jakarta.

Ambarita, Domu D.; Megawati Soekarnoputri (pengantar). 2012. *Jokowi: Spirit Bantaran Kali Anyar*.

Badri, Yusuf, 2001, *Kiat Diplomasi Pengertian & Ruang Lingkup*, Jakarta: Restu Agung.

Bandoro, Bantarto, 1994, *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*, Jakarta: CSIS

Basuki, Ahmad Yani.2013. *Politik Luar Negeri Dari Pemikiran Dan Pidato Presiden SBY*. Jakarta : staff khusus kepresidenan republic Indonesia .

Barton, Greg, Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID, (Yogyakarta: LkiS, 2006)

Basuki, Ahmad Yani, 2013, *Globalisasi dan Kerja Sama Internasional Dari Pemikiran & Presiden Pidato SBY*, Staf Khusus Kepresidenan, Jakarta.

Budiarjo, Meriam 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.

Burchil , Scott dan Andrew Linkarter.2009, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Nusa Media, Bandung.

Djalal, Hasjim, 1997, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990*, Jakarta: CSIS.

Djelantik, Sukawarsini. 2008: *Diplomasi Antara Teori & Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Coulombis, Theodore A. & John H. Wolfe, 1985. *Introduction to International Relations*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Edi Swason, Sri. 2001. *Reformasi Menjadi Deformasi dari Lengser ke Lengser*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Efantino dan Arifin SN. 2009. *Ganyang Malaysia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.Gonggong.

Endah, Alberthiene. 2012. *Jokowi: Memimpin Kota Menyentuh Jakarta*.

Elson, R.E., 2009. *The idea of Indonesia*. Jakarta: Penerbit Serambi.

Gaozali, Syadam, 2014. *Dari Bilik Suara kemasa Depan Indonesia( Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi)*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Gouda, Frances, 2008, *Indonesia Merdeka Karena Amerika?*, Jakarta: Serambi.

Hermawan, Yulius P. 2007, *Transformasi dalam Study Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Imu.

Husken, Frans, Dkk,1997. *Indonesia Di Bawah Orde Baru*, Jakarta: Grasindo.

Jackson, Robert, Georg Sorensen. 2005,*Pengantar Study Hubungan Internasional*, Yokjakarta: Pustaka Pelajar.

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Politik* ,Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fortuna, Dewi Anwar. 2001. *Implementasi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia Terhadap Indonesia, Studi Kasus Timor Timur (1966-2000), dalam Ganewati* .

Garnett, John C, Marcedes Marbun 2004, *Commonsense dan Teori Politik Internasional*,Jakarta: Abardin.

Griffiths, Martin. 2007. *International Relations Theory in 21st Century: An Introduction*, (London dan NewYork: Routledge.

Hasan, M. Zein. 1980. *Diplomasi Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hidayat, L.M., 2007. *Reformasi administrasi: Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden: Bacharuddin Jusuf*

Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri. Gramedia Pustaka Utama.

Habibie, B.J., 2010. *Habibie & Ainun*. THC Mandiri.

Hatta, Mohammad. 1986. *Mendayung Diantara Dua Karang*, Jakarta: Djembatan.

Hatta, Mohammad. 1992. *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Ibad, Nurul. 2018. *Jokowi Dalam Cermin Dunia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Ihlas, Y.I., 2014. *Cagar Budaya di Gorontalo sebagai Laboratorium Pembelajaran Sejarah dan Kearifan Lokal*(Doctoral dissertation, Universitas Negeri Gorontalo).

Kusumaaatmadja, Mooctar 1983, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Bandung: Penerbit Alumni,.

Leifer, Michael. 1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Rafick, Ishak. 2007. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia:Sebuah Inverstigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi dan Jalan Baru Membangun Indonesia*. Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci.

Mansbach, Richard W. and Kirsten L. Refferty. 2012. *Introduction to Global Politics*. New York: Routledge.

Ricklefs, M.C.2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.

Robert Jackson dan Georg Sorensen 2009, buku terjemahan: *Pengantar studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mahardi, Dedi. 2018. *Indonesia Butuh Jokowi*. Jakarta: Buana Ibnu paper.

Majeed, Rushda. 2012. *"Defusing a Volatile City, Igniting Reforms: Joko Widodo and Surakarta, Indonesia, 2005-2011."* Innovations for Successful Societies. Universitas Princeton.

Makka, Makmur.A. 2008, *The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan*, Jakarta : PUSTAKA IMAN.

Marham, Idrus. 2017. *Keutamaan Jokowi: studi kepemimpinan nasional dalam perspektif Kesindekberikan pembangunan*. Bekasi: Penjuru Ilmu.

Mas'ood Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.

Nasution, A.H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid 6. Bandung.

Nasution, Dahlan 1984, *Perang atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional*, Bandung: Reamadja Karya, CV.

Nasution, Dahlan 1989, *Politik Internasional: Konsep dan Teori* Bandung: Erlangga.

Noer, G.S., 2015. *Rudy: Kisah Masa Muda Sang Visioner*. Jakarta: Bentang Pustaka.

Nusa Bhakti, Ikrar. Reinterpretasi Politik Luar Negeri Indonesia dan Kemandirian Regional Asia Tenggara (*Studia Politika* 2). Jakarta:1998.

Papp, Daniel S. Papp 1988, "*Contemporary International Relation*" : *A Framework for Understanding*, Second Editions New York: MacMillan Publishing Company.

Poesponegoro, Marwati Djoeneddan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sabir, M. 1987. Politik Bebas Aktif. Jakarta: Haji Masagung.

Salam, S., 1986. *BJ Habibie, Mutiara dari Timur*. Intermasa.

Setyohadi.Tuk. 2004. *Perjalan Bangsa Indonesia Dari Masa ke Masa*. Bogor: Rajawali Corporation.

Simanjuntak, P. N. H. (2003). *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.

Sudarsono, Juwono,dkk, 1996. *Perkembangan Study Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Soeprapto R, 1997, *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi Dan Perilaku*, Jakarta: Radjawali Press.

Sudirman, Adi. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia. Jogjakarta: DIVA Press.Sjamsudin, Helius. 2007.

Suryadinata, Leo. 1998, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Soeharto*, Jakarta: LP3ES.



Suryo B. Sulistyo.1999."Kebijakan ekonominya mengandalkan kekuatan pasar", dalam Badaruddin et.al. *Kepemimpinan BJ. Habibie. Visi, Misi, dan Stategi*, Jakarta: Yayasan Bina Profesi dan Wirausaha.

Taufik Adi. 2008. Soekarno Biografi Singkat 1901-1970. Jogjakarta: GARASI.

Steane Jill & Liyoyd Pettiford, 2009, *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Yulianto, Arif. 2002. *Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orba Di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Vioti, Paul R, Mark V. Kauppi.1998, *International Relation Theory*, United States America: Needham Heights.

Wahid, Abdurrahman, 2006, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute.

Wasis Widjiono, 2018, *Jadul Kinanti Jokowi Dulu Kini Dan Nanti*, Yogyakarta: Kelopak 6.

Wibisono, Makarim, 2006, *Tantangan Diplomasi Multilateral*, Jakarta: LP3ES.

Wijaya, J.H. and Permatasari, I.A., 2018. *Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia*. Jakarta: Caktawala.

Winarno, Budi. 2015. *Sistem politik Indonesia era reformasi*. Yogyakarta: Media Presindo.

Wirajuda, Hasan. 2004, *Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Wuryandari, *Indonesia dan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia 1966-2001*. Jakarta : Pusat Pendidikan Politik (P2P) LIPI.

Wuryandari, Ganewati, dkk. 2007. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik- LIPI.

Wuryandari, Ganewati (ed.). 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P-LIPI.

Yusuf, Suffri, 1989, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta: Sinar harapan.

## **B. Dokumen**

Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000). 2001. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pemerintah Indonesia. 1966. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia. . 1966.

Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. 1968.

Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.1973.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN.

PUSDATINKOMTEL. 2010. *UU. No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kependudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Fitriani, dan Chandra, vidio. “ *analisis kinerja kementerian Luar Negeri Indonesia 2015-2018*”. Paper. Centre for strategic and International studies.

*Satu Tahun Joko Widodo Berjalan di atas Gelombang*, Penerbit Nawa Cita Indonesia, Jakarta, 2015.

*Tiga Tahun Jokowi Wujud Kerja Nyata*, Penerbit Nawa Cita Indonesia, Jakarta tahun 2017.

Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Dan Efek Elektoralnya, *Indikator Politik Indonesia*, Temuan Survey Nasional, 2018.

Departemen Luar Negeri. 1971. *Dua Puluh Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Karyawan Deplu.

Tanpa Tahun. *10 Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru*, Jakarta. Departemen Penerangan. 1967. *Pidato Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna 12 Desember 1967*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Departemen Penerangan, *Pidato Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna 12 Desember 1967*,

ICMI: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dalam sorotan pers, Desember 1990-April 1991.

### **C. Jurnal.**

Ali, maklsum. 2015. “*Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi*”. *Andalas Jurnal of international Studies*, vol. 4 no. 1. Andalas Institute.

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Cina pada Awal Orde Baru”, dalam *Indonesian Perspective*, Vol. 1 No. 1 (2016).

Heike Krieger, “East Timor and The International Community: Basic Documents”, dalam *CambridgeInternational Documents Series*, Vol. 10 , 1997, New York: Cambridge University Press.

Habibie, B.J., 1990. Sophisticated technologies: taking root in developing countries. *International Journal of Technology Management*, 5(5), pp.489-497.

Hafid Adim Pradana, “Persepsi Soeharto dan Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Cina pada Awal Orde Baru”, dalam *Indonesian Perspective*, Vol. 1 No. 1 (2016).

Supriyadi, H., 2018. Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*.

Majeed, Rushda. "The City With a Short Fuse." *Foreign Policy*. September 2012.

Malik, Adam. 1979. *Mengabdi Republik Volume 2*. Jakarta: Gunung Agung.

Nasir.2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Komunikasi Penelitian 18* (Diakses tanggal 11 Mei, 2013).

Nusa Bhakti, Ikrar. Reinterpretasi Politik Luar Negeri Indonesia dan Kemandirian Regional Asia Tenggara (*Studia Politika 2*). Jakarta:1998.

Reni, windani. Politik luar negeri Indonesia dan globalisasi. Jurnal HI.

Situmorang, Mangadar. 2018. “*Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Joko widodo dan Jusuf kalla.*” Jurnal. Universitas khatolik Parahyangan.

Poesponegoro, Marwati Djoened, et.al. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia Volume 4*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pradana, Hafid Adim. 2016. “Persepsi Soeharto dan Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Cina pada Awal Orde Baru” dalam *Indonesian Prespective* Vol. 1 No. 1.

#### **D. Website.**

Haryono, Endi. Politik luar negeri tiga tahun jokowi. Diakses di <https://m-mediaindonesia-com.cdnampproject.org> tanggal 18 juli 2019 pukul 23.02.

<https://m.detik.com/news/kolom/d-4548710/pasca-terpilihnya-indonesia-sebagai-presiden-dk-pbb>

<https://amp.kompas.com/nasiona/read/2019/05/02/12464011/ja-di-presiden-dewan-keamanan-pbb-indonesia-angkat-isu-palestina>.

Putrid, Sindy ( 2019, 24 Februari) .*Kebijakan Politik* Basuki, Ahmad Yani. 2013. *Politik Luar Negeri Dari Pemikiran Dan Pidato Presiden SBY*. Jakarta : staff khusus kepresidenan republic Indonesia

Wardi, Robertus ( 2014, 4 Maret) . *Pengamat: Politik Luar Negeri SBY Perlu Dipertahankan*. Di kutip 14 juli 2019 dari berita satu : .

Rony Wijaya. *Biografi Presiden Soeharto* dalam <https://bio.or.id/biografi-presiden-soeharto/>

<https://fatonipgsd071644221.wordpress.com/2010/11/05/perke-mbangan-politik-luar-negeri-indonesia/>

<https://kinanti0205.wordpress.com/tag/habibie/>  
[http://www.kompasiana.com/veyosarian/politik-luar-negeri-indonesia-gaya-perpolitikan-dan-dominasi-politik-luar-negeri-gus-dur\\_550ffc998133119f36bc60d4](http://www.kompasiana.com/veyosarian/politik-luar-negeri-indonesia-gaya-perpolitikan-dan-dominasi-politik-luar-negeri-gus-dur_550ffc998133119f36bc60d4).

<http://wartasejarah.blogspot.co.id/2016/05/masa-pemerintahan-presiden-megawati.html?m=1>

<http://pembelajaranhistory.blogspot.com/2012/06masa-pemerintahan-megawati.html>

<http://www.endikkoeswoyo.com/2016/02/analisis-politik-luar-negeri-pada-masa.html>

<https://isias.wordpress.com/2009/12/10/kebijakan-luar-negeri-ri-di-era-pemerintahan-sby-jilid-ii-pemahaman-terhadap-keinginan-proses-dan-konteksnya/>

<https://abdussofi16.wordpress.com/history/perekonomian-masa-jokowi/>

<http://www.rappler.com/indonesia/149641-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk>

<https://indocropcircles.wordpress.com/2016/06/21/cina-akui-natuna-milik-indonesia-tapi-inilah-masalahnya/>

<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39114491>

[http://www.kompasiana.com/kanopi\\_feui/kebijakan-pangan-jokowi-jalan-menuju-ketahanan-pangan-indonesia\\_55e98d9f8e7e61b90ab31707](http://www.kompasiana.com/kanopi_feui/kebijakan-pangan-jokowi-jalan-menuju-ketahanan-pangan-indonesia_55e98d9f8e7e61b90ab31707)

<http://news.okezone.com/read/2016/10/11/337/1512009/lima-poin-paket-kebijakan-hukum-presiden-jokowi>

<http://news.liputan6.com/read/2630652/5-gebrakan-jokowi-jk-di-bidang-hukum-selama-2-tahun-memerintah>

<http://oase.kompas.com/read/2009/06/18/02590466/budaya.baca.indonesia.terendah.di.asia.timur>

<http://www.antaranews.com/berita/432746/dpr-akan-wacanakan-penghapusan-un-sd-dan-smp>

*"List of Fellow: Habibie, Professor Dr Ing Bacharuddin Jusuf FREng: 1990". Royal Academy of Engineering. 1990. Diakses tanggal 2014.*

Andy Rachmianto, *Politik Pemerintahan Masa Megawati*. Di akses pada

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F14435/Politik%20Luar%20Negeri%20Pemerintahan.htm> 2 Agustus

Sindy Eka Putri, “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dalam Hubungan Internasional”, <https://www.kompasiana.com/sindyekaputrirahayu/5c728c2cab12ae27cc79e693/kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia-bebas-aktif-dalam-hubungan-internasional> pada tanggal 14 juli 2019 pada pukul 10.46.

Sarah Farida Ainun, “PLNRI di Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/241463254/Politik-Luar-Negeri-Indonesia-di-Era-Kepemimpinan-Presiden-Susilo-Bambang-Yudhoyono-2004-2014> pada tanggal 14 juli 2019 pada pukul 11.01.

Reni Windiani, “poliitk luar negeri indonesia dan globalisasi”, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4894/4438> pada tanggal 14 juli 2019 pada pukul 11.41

Haryono, Endi. Politik lauar negeri tiga tahun jokowi. Diakses di <https://m-mediaindonesia-com.cdnampproject.org> tanggal 18 juli 2019 pukul 23.02

<https://amp.kompas.com/international/rea/2019/04/26/11351161/1-mei-2019-indonesia-dapa-giliran-jabat-presiden-dewan-keamanan-pbb>

<https://amp.kompas.com/nasiona/read/2019/05/02/12464011/ja-di-presiden-dewan-keamanan-pbb-indonesia-angkat-isu-palestina>



<https://m.detik.com/news/kolom/d-4548710/pasca-terpilihnya-indonesia-sebagai-presiden-dk-pbb>

<https://m.anatarnews.com./berita/897315/peran-indonesia-sebagai-presiden-dk-pbb-mendapat-apresiasi>

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1684174/30-tahun-lebih-berebut-lahan-smak-dago> *Atma, Weda S. (2017). Kisah, Perjuangan, & Inspirasi B. J. Habibie. Checklist. hlm. 236.*

<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/22/11462431/infografik-serial-presiden-bj-habibie?page=all>

<http://www.kedaipena.com/cerita-habibie-bebaskan-tahanan-politik-di-era-soeharto-beda-pendapat-itunormal/>

<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/12/ml4fgy-ini-alasan-habibie-bebaskan-pers-saat-jadi-presiden>